

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bima menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Bima selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima secara umum menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan

Bupati Bima Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Pasal 5 ayat (2) penyajian laporan keuangan terdiri atas : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pendapatan.
- 2) Belanja.
- 3) Transfer.
- 4) Surplus/deficit.
- 5) Pembiayaan.
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan secara komparatif dengan periode pos-pos sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencantumkan pos-pos berikut :

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal (saldo Tahun sebelumnya).
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.

- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun berjalan.
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya.
- 5) Lain-lain.
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir untuk periode berjalan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut :

- 1) Kas dan Setara Kas.
- 2) Investasi Jangka Pendek.
- 3) Piutang Pajak dan Bukan Pajak.
- 4) Persediaan.
- 5) Investasi Jangka Panjang.
- 6) Aset Tetap.
- 7) Kewajiban Jangka Pendek.
- 8) Kewajiban Jangka Panjang.
- 9) Ekuitas Dana.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO dalam penyajian yang wajar secara komparatif.

Laporan Operasional menjelaskan lebih lanjut Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu

Tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci dan angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Operasional sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut :

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional.
 - 2) Beban dari kegiatan operasional.
 - 3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional.
 - 4) Kegiatan Non Operasional.
 - 5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa.
 - 6) Pos luar biasa.
 - 7) Surplus/defisit-LO.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
- Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos sebagai berikut :
- 1) Ekuitas Awal.
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 4) Ekuitas Akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan memeberikan informasi kualitatif dan

mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama Tahun pelaporan.
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan, daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Bima Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022;

23. Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Bima Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.
25. Peraturan Bupati Bima Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bima Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima;
26. Peraturan Bupati Bima Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
27. Peraturan Bupati Bima Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.3. Gambaran Umum Daerah

1. Geografis dan Iklim

1) Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Bima merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Bima memiliki luas wilayah daratan sebesar 4.389,40 Km² dan luas wilayah perairan laut seluas 3.760,33 Km² dengan panjang garis pantai sebesar 687,43 Km². Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima 37,71% dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa 9.970,96 Km² atau 29,26% dari luas wilayah perairan laut Provinsi Nusa Tenggara Barat 12.852,14 Km².

Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Timur : Selat Sape
- Sebelah Barat : Kabupaten Dompu

Peta wilayah administrasi Kabupaten Bima sebagai berikut :

Gambar 1.1



2) Luas Wilayah

Berdasarkan letak geografis, wilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur dari delapan Kabupaten dan dua Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Woha. Secara geografis terletak pada :

- Barat – Timur : $118^{\circ} 44'$ – $119^{\circ} 22'$ Bujur Timur
- Utara – Selatan : $08^{\circ} 08'$ – $08^{\circ} 57'$ Lintang Selatan

Kabupaten Bima memiliki luas wilayah perairan laut berdasarkan data yang diukur oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mataram seluas $3.760,33 \text{ Km}^2$ dengan panjang garis pantai sebesar $687,43 \text{ Km}^2$. Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima $37,71\%$ dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa $9.970,96 \text{ Km}^2$ atau $29,26\%$ dari luas wilayah perairan laut Provinsi Nusa Tenggara Barat $12.852,14 \text{ Km}^2$.

Adapun wilayah administrasi Kabupaten Bima terbagi atas 18 kecamatan dengan luas wilayah yang bervariasi, 191 desa, 794 Dusun, 1.057 Rukun Warga (RW) dan 2.492 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Tambora merupakan kecamatan paling luas wilayahnya yaitu 62.782 Ha atau sebesar $14,30\%$, sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya

yaitu Kecamatan Belo dengan luas wilayah sebesar 4.476 Ha atau 1,02% dari luas wilayah Kabupaten Bima. Namun demikian, Kecamatan yang paling banyak desanya yaitu Kecamatan Sape dengan jumlah desa sebanyak 18 desa, sedangkan yang paling sedikit desanya yaitu Kecamatan Parado dengan jumlah desa sebanyak 5 desa.

Jumlah desa pada setiap kecamatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Dusun
di Kabupaten Bima

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah			
		Ha	%	Desa	Dusun	RT	RW
1.	Monta	22.752	5,18	14	51	169	68
2.	Parado	26.129	5,95	5	18	63	23
3.	Bolo	6.693	1,52	14	71	177	73
4.	Madapangga	23.758	5,41	11	42	144	44
5.	Woha	10.557	2,41	15	63	173	80
6.	Belo	4.476	1,02	9	33	126	50
7.	Palibelo	7.158	1,63	12	35	151	61
8.	Wawo	13.229	3,01	9	30	121	48
9.	Langgudu	32.294	7,36	15	59	176	76
10.	Lambitu	6.540	1,49	6	18	47	17
11.	Sape	23.212	5,29	18	70	252	117
12.	Lambu	40.425	9,21	14	40	184	82
13.	Wera	46.532	10,60	14	82	214	103
14.	Ambalawi	18.065	4,12	6	38	119	54
15.	Donggo	12.383	2,82	9	46	125	49
16.	Soromandi	34.166	7,78	7	52	127	61
17.	Sanggar	47.789	10,89	6	22	58	26
18.	Tambora	62.782	14,30	7	24	56	25
Kab. Bima		438.940	100,00	191	794	2.492	1.057

Sumber : BPS Kabupaten Bima dan DPMDES Kabupaten Bima

Penggunaan lahan Kabupaten Bima dengan luas wilayah sebesar 438.940 ha berdasarkan penggunaan lahan terbagi atas kawasan budidaya dan kawasan lindung. Penggunaan lahan sebagai lahan sawah hanya sebesar 7,85%, sedangkan sisa sebesar 92,15% merupakan lahan bukan sawah, namun demikian lahan bukan sawah juga potensial untuk dikembangkan menjadi lahan sawah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bima didominasi oleh hutan dan tambak, selain itu besarnya Penduduk Bima yang bermata pencaharian sebagai petani juga berdampak pada luasnya penggunaan lahan sawah, tegal/kebun dan ladang/huma. Luas hutan dan lahan lainnya sebesar 393.18 Km² atau mencapai 17,40 persen dari keseluruhan total luas wilayah Kabupaten Bima.

Adapun rincian penggunaan lahan di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Tabel 1.2
Luas Wilayah Kabupaten Bima Menurut Jenis Kegunaannya

No.	Uraian	Luas/ Km ²
1.	Sawah	469,13
2.	Tegal/Kebun	646,78
3.	Ladang/Huma	262,28
4.	Padang Pengembalaan/Padang Rumput	120,32
5.	Hutan	105,52
6.	Perkebunan Negara/Swasta	99,29
7.	Sementara Tidak Diusahakan	128,21
8.	Lainnya	287,66
9.	Lainnya Bukan Pertanian	139,32

Sumber : Kabupaten Bima Dalam Angka 2021

3) Topografi Wilayah

Topografi wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit. Sebagian wilayahnya mempunyai topografi yang cukup bervariasi dari datar hingga bergunung dengan ketinggian antara 0-477,50 m di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan kelompok kemiringan lahan, wilayahnya dapat dikelompokkan atas kelompok lereng 0-2%, 3-15%, 16-40% dan >40%. Pengelompokkan kelas kemiringan pada setiap kecamatan sebagaimana disajikan dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 1.3
Tinggi Ibukota Kecamatan dari Permukaan Laut di Kabupaten Bima

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Ketinggian di Atas Permukaan Laut (m)
1.	Monta	Tangga	41
2.	Parado	Paradorato	252
3.	Madapangga	Dena	42
4.	Woha	Tente	17
5.	Belo	Cenggu	23
6.	Langgudu	Karumbu	33
7.	Wawo	Maria	391
8.	Sape	Naru	24
9.	Lambu	Sumi	18
10.	Wera	Tawali	57
11.	Ambalawi	Nipa	18
12.	Donggo	O'o	714
13.	Sanggar	Kore	19
14.	Tambora	Labuan Kananga	10
15.	Bolo	Rato	21
16.	Soromandi	Kananta	6
17.	Lambitu	Kuta	634
18.	Palibelo	Teke	31

Sumber : BPS Kabupaten Bima

Tabel 1.4
Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Dirinci per Kecamatan
di Kabupaten Bima

No.	Kecamatan	Kelompok Kemiringan (ha)				Jumlah
		0-2 %	3-15 %	16 - 40%	> 40 %	
1.	Monta	3.010	4.200	13.020	7.711	27.941
2.	Parado	1.800	2.500	10.200	3.200	17.700
3.	Madapangga	980	2.350	9.000	3.800	16.130
4.	Woha	4.593	784	2.364	2.715	10.456
5.	Belo	4.409	4.108	7.698	2.569	18.784
6.	Langgudu	960	600	5.000	4.200	10.760
7.	Wawo	68	8.080	14.480	22.851	45.479
8.	Sape	2.760	7.792	2.272	21.813	34.637
9.	Lambu	2.500	3.400	6.500	8.100	20.500
10.	Wera	1.832	5.700	16.696	23.592	47.820
11.	Ambalawi	150	1.400	10.050	12.100	23.700
12.	Donggo	1.024	12.100	10.172	13.268	36.564
13.	Sanggar	3.500	16.448	13.405	13.023	46.376
14.	Tambora	1.800	7.100	8.000	1.400	18.300
15.	Bolo	8.100	4.400	8.394	7.457	28.351
16.	Soromandi	1.200	3.900	5.050	15.052	25.202
17.	Lambitu	100	450	1.700	1.140	3.390
18.	Palibelo	2.300	400	3.250	900	6.850
Jumlah		41.086	85.712	147.251	164.891	438.940
%		9,36	19,53	33,55	37,57	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Bima

Wilayah Kabupaten Bima berdasarkan keadaan topografi wilayah, menyebar pada wilayah datar hingga bergunung. Hasil analisis menunjukkan bahwa sekitar 71,11% dari luas Kabupaten Bima atau sekitar 312.142 Ha mempunyai bentuk wilayah berbukit hingga bergunung (kemiringan 16->40%). Bentuk wilayah datar (kemiringan 0-2%) hanya sekitar 9,36%, sedang daerah bergelombang (kemiringan 3-15%) sebesar 85.712 Ha (19,53%) dari luas Kabupaten Bima.

4) Kependudukan

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) Tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali sejak Indonesia merdeka, yaitu Tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.

Jumlah Penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Bima Tahun 2020 menurut hasil sensus penduduk adalah

514.105, terdiri dari 258.701 penduduk laki-laki dan 255.404 penduduk perempuan dengan Rasio Jenis Kelaminnya sebesar 98,73, artinya Kabupaten Bima memiliki penduduk laki-laki yang lebih banyak dari penduduk perempuan. Berikut adalah jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bima Tahun 2020 :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bima Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	22,591	21,023	43,614
5-9	22,581	21,655	44,236
10-14	24,606	23,540	48,146
15-19	26,062	24,013	50,075
20-24	24,584	24,273	48,857
25-29	21,838	20,959	42,797
30-34	20,113	19,799	39,912
35-39	17,738	17,898	35,636
40-44	16,182	16,772	32,954
45-49	14,929	15,940	30,869
50-54	12,605	13,118	25,723
55-59	10,615	11,099	21,714
60-64	8,958	9,456	18,414
65-69	6,557	6,919	13,476
70-74	4,118	4,041	8,159
75+	4,624	4,899	9,523
Jumlah	258,701	255,404	514,105

Sumber : Kabupaten Bima Dalam Angka 2021

Berdasarkan jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bima Tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Dimana jumlah penduduk Tahun 2019 tercatat sebanyak 488.577 jiwa dan Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 514,105 jiwa. Rasio jenis kelamin yang disajikan memperlihatkan secara rinci komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan beserta rasio jenis kelamin yang dirinci menurut kelompok umur. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat pada kelompok umur 15-19 Tahun.

Rasio jenis kelamin pada kelompok umur ini sebesar 50,075, hal ini menunjukkan bahwa diantara 100 orang jumlah penduduk, terdapat penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 26,062 dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 24,013. Rasio jenis kelamin yang paling kecil terdapat pada kelompok umur 70-74 Tahun ke atas yaitu

sebesar 8,159, hal ini menunjukkan bahwa diantara 100 orang jumlah penduduk, terdapat penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 4,118 dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 4,041. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima Tahun 2020, diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, Distribusi
Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis
Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²	Rasio Jenis Kelamin
1.	Monta	39,12	1,53	7,61	172	99,98
2.	Parado	10,68	2,00	2,08	41	102,93
3.	Bolo	51,36	1,45	9,99	767	99,66
4.	Madapangga	31,45	1,35	6,12	132	99,50
5.	Woha	51,16	1,49	9,95	485	102,76
6.	Belo	27,57	0,98	5,36	616	98,80
7.	Palibelo	27,83	1,13	5,41	389	100,44
8.	Wawo	18,84	1,44	3,66	142	99,33
9.	Langgudu	31,47	1,75	6,12	97	100,55
10.	Lambitu	6,14	1,85	1,19	94	101,81
11.	Sape	61,01	1,36	11,87	263	102,06
12.	Lambu	42,06	2,00	8,18	104	102,50
13.	Wera	32,48	1,44	6,32	70	102,02
14.	Ambalawi	21,05	1,43	4,09	117	104,18
15.	Donggo	19,96	1,71	3,88	161	100,01
16.	Soromandi	19,25	2,14	3,74	56	103,20
17.	Sanggar	13,94	1,60	2,71	29	101,66
18.	Tambora	8,77	2,78	1,71	14	107,75
J u m l a h		514,11	1,53	100,00	117	101,29

Sumber : Kabupaten Bima Dalam Angka 2021

1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Gambaran Umum Daerah
- 1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III KHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.3 Neraca

5.4 Laporan Operasional

5.5 Laporan Arus Kas

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2022 mengacu pada indikator ekonomi makro Pemerintah Daerah Tahun berjalan atau Tahun sebelumnya, yaitu :

a. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Data kemiskinan pada Kabupaten Bima Tahun 2022 di uraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Data Kemiskinan Kabupaten Bima
Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
Penduduk Miskin	74.460	14,50	75.490	14,88

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Di Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen IPM antara lain :

- 1) Angka Harapan Hidup
- 2) Harapan Lama Sekolah
- 3) Rata-Rata Lama Sekolah
- 4) Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bima Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bima
Tahun 2022 dan Tahun 2021

Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,57	66,66
1)Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	66,87	66,50
2)Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,58	13,39
3)Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,91	8,17
4)Pengeluaran per Kapita	Ribu Rupiah	8.495	8.699

Sumber : BPS Provinsi NTB

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga di definisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode Tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu Tahun.

PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Konstan menurut
Pengeluaran Tahun 2021 dan Tahun 2020

Indikator	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2020
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rupiah	8.085.528,65	7.942.977,92

Sumber : BPS Kabupaten Bima

d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

LPE adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.

LPE Kabupaten Bima Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
LPE Kabupaten Bima
Tahun 2021 dan Tahun 2020

Indikator	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2020
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	1,79	-3,53

Sumber : BPS Kabupaten Bima

e. Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bima dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian, namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Tingkat inflasi hanya dihitung pada daerah perkotaan, sehingga tingkat inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima. Tingkat inflasi Tahunan Provinsi NTB Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Tingkat Inflasi Tahunan Provinsi NTB
Tahun 2022 dan Tahun 2021

Indikator	Satuan	Tahun 2022 (%)	Tahun 2021 (%)
Tingkat Inflasi Tahunan	Persen (%)	1,57	6,39

Sumber : BPS Provinsi NTB

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD Kabupaten Bima bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer bersumber

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Selanjutnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, bahwa kontribusi PAD TA. 2022 mengalami penurunan dan masih di dominasi oleh Pendapatan Transfer, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya untuk mengembangkan strategis intensifikasi penagihan dan melakukan ekstensifikasi/menggali potensi PAD yang ada.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk membayar kewajiban pajak dan retribusinya dengan menerapkan kebijakan sanksi (*punishment*) dan imbalan (*reward*) secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Melakukan pembenahan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama penatausahaan dan pengadministrasian serta menerapkan audit juru pungut secara berkala.
- 3) Mengoptimalkan operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- 4) Merancang sistem berbasis teknologi informasi dalam pemrosesan data dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 5) Melakukan revisi Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak relevan lagi.

b. Kebijakan Pendapatan Transfer :

- 1) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Kementerian teknis dan Pemerintah Provinsi terkait pembagian atas alokasi

dana Bagi Hasil Bukan Pajak, seperti: Bagi Hasil Pertambangan Umum (*royalty*), *landrent* dan bagi hasil perikanan.

- 2) Melakukan langkah-langkah rekonsiliasi data dan pemetaan potensi terkait dengan dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.
- 3) Meningkatkan upaya-upaya proaktif untuk mendapatkan porsi alokasi dana seperti; dana stimulus fiskal, dana penyesuaian, dana insentif daerah serta dana-dana yang bersifat bantuan keuangan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1) Pendapatan Hibah bersumber dari *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP). IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi, sehingga untuk dapat mencapai target program tersebut, Pemerintah Daerah melalui OPD terkait melakukan survei dan pendataan terhadap daerah irigasi yang perlu dilakukan rehabilitasi sebagai dasar pengusulan ke Pemerintah Pusat.

2) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian targetnya, antara lain :

- Melakukan intervensi dalam perbaikan Data Dapodik sekolah dengan melaksanakan :
 - Bimtek umum terhadap seluruh Kepala SDN dan SMPN.
 - Bimtek khusus yang diatur per jadwal Kecamatan bagi seluruh operator SDN dan SMPN.
- Mengkolaborasikan program Sekolah Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai sarana mendapatkan tambahan anggaran BOS Kinerja bagi Sekolah dengan langkah :

- Intensif melakukan sosialisasi kepada Kepala SDN dan SMPN untuk mengikuti tes Sekolah Penggerak.
- Memberikan bimbingan kepada Kepala Sekolah dalam mengikuti tes Sekolah Penggerak dengan tujuan agar terpilih sebagai Sekolah Penggerak.

Pagu anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bima TA. 2022 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Target Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022

Uraian	APBD-P TA.2022
Pendapatan Daerah	1.804.124.798.351,00
Pendapatan Asli Daerah	160.302.563.946,00
Pendapatan Transfer	1.623.852.773.835,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.969.460.570,00

Sumber : Perda Tentang APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja dalam APBD Kabupaten Bima TA. 2022 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer.

Kebijakan Belanja Daerah TA. 2022 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan untuk :

1. Mengoptimalkan PAD (PBBP2, BPHTB, Retribusi Kesehatan, Kekayaan Daerah, Pendapatan lain-lain).
2. Belanja Pegawai ditetapkan menurun secara proporsional.
3. Belanja diarahkan untuk mencapai target RPJMD khususnya yang memiliki pelayanan minimum.
4. Kebijakan dana desa sesuai ketentuan perundang-undangan ditambah dana insentif desa (DINDA) sebagai kebijakan khusus yang diarahkan bagi desa yang memiliki BUMDes berkinerja baik.
5. Kebijakan pembiayaan untuk penguatan PAD dan ekonomi melalui penyertaan modal dan dana bergulir.

Pagu anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bima TA. 2022 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Pagu Anggaran Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022

Uraian	APBD-P TA.2022
Belanja Daerah	1.858.624.691.773,00
Belanja Operasi	1.306.101.139.943,00
Belanja Modal	252.990.748.734,00
Belanja Tak Terduga	12.933.969.700,00
Belanja Transfer	286.598.833.396,00

Sumber : Perda Tentang APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Apabila realisasi APBD mengalami surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, pembentukan dana cadangan maupun penyertaan modal. Sebaliknya apabila realisasi APBD mengalami deficit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya untuk menutupi defisit tersebut.

Pagu anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bima TA. 2022 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Pagu Anggaran Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022

Uraian	APBD-P TA.2022
Penerimaan Pembiayaan	59.099.893.422,00
Pengeluaran Pembiayaan	4.600.000.000,00

Sumber : Perda Tentang APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022 cukup baik, meskipun relatif lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena cukup rendahnya capaian realisasi PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Capaian kinerja APBD TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Bima TA. 2022 terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima pada TA. 2022 bahwa pagu anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.804.124.798.351,00 dan terealisasi sebesar Rp1.775.856.490.997,70 atau 98,43% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Pendapatan Daerah tersebut dirincikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pagu anggaran PAD ditetapkan sebesar Rp160.302.563.946,00 dan terealisasi sebesar Rp140.010.228.296,70 atau 87,34% dari pagu anggaran yang ditetapkan. PAD tersebut bersumber dari :

- 1) Pajak Daerah, dimana pagu anggarannya ditetapkan sebesar Rp24.623.194.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.013.801.499,00 atau 65,04% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 2) Retribusi Daerah, dimana pagu anggarannya ditetapkan sebesar Rp26.980.435.500,00 dan terealisasi sebesar Rp18.663.813.599,00 atau 69,18% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dimana pagu anggarannya ditetapkan sebesar Rp6.310.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.552.260.418,00 atau 87,99% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana pagu anggarannya ditetapkan sebesar Rp102.388.934.446,00 dan terealisasi sebesar Rp99.780.352.780,70 atau 97,45% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

b. Pendapatan Transfer

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA. 2022 menetapkan pagu anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.623.852.773.835,00 dan terealisasi sebesar Rp1.617.563.205.623,00 atau 99,61% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari :

- 1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, dimana pagu anggarannya ditetapkan sebesar Rp1.363.301.623.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.354.146.673.298,00 atau 99,33% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dimana pagu anggarannya ditetapkan sebesar Rp 191.141.948.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp191.141.948.000,00 atau 100% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah, dimana pagu anggarannya ditetapkan sebesar Rp69.409.202.835,00 dan terealisasi sebesar Rp72.274.584.325,00 atau 104,13% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA. 2022 menetapkan pagu anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp19.969.460.570,00 dan terealisasi sebesar Rp18.283.057.078,00 atau 91,56% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

2.3.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dimana pada APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima pada TA. 2022 menetapkan pagu anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.858.624.691.773,00 dan terealisasi sebesar Rp1.800.085.116.696,56 atau 96,85% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Belanja Daerah tersebut dirincikan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA. 2022 menetapkan pagu anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.306.101.139.943,00 dan terealisasi sebesar Rp1.256.753.332.586,56 atau 96,22% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pagu anggaran Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp769.952.460.180,00 dan terealisasi sebesar Rp749.862.151.710,00 atau 97,39% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 2) Pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa ditetapkan sebesar Rp486.430.643.513,00 dan terealisasi sebesar

Rp458.571.697.276,56 atau 94,27% dari pagu yang ditetapkan.

- 3) Pada APBD Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk Belanja Bunga.
- 4) Pada APBD Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk Belanja Subsidi.
- 5) Pagu anggaran Belanja Hibah ditetapkan sebesar Rp33.373.092.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.064.985.100,00 atau 96,08% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 6) Pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial ditetapkan sebesar Rp16.344.944.250,00 dan terealisasi sebesar Rp16.254.498.500,00 atau 99,45% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 7) Pada APBD Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah.

b. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA. 2022 menetapkan pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp252.990.748.734,00 dan terealisasi sebesar Rp246.039.191.263,00 atau 97,25% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pagu anggaran Belanja Modal Tanah ditetapkan sebesar Rp3.915.682.975,00 dan terealisasi sebesar Rp3.226.152.975,00 atau 82,39% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 2) Pagu anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditetapkan sebesar Rp77.007.608.606,00 dan terealisasi sebesar Rp74.233.412.208,00 atau 96,40% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 3) Pagu anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan ditetapkan sebesar Rp66.979.778.047,00 dan terealisasi

sebesar Rp65.996.875.279,00 atau 98,53% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

- 4) Pagu anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ditetapkan sebesar Rp103.500.658.754,00 dan terealisasi sebesar Rp101.563.736.869,00 atau 98,13% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 5) Pagu anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya ditetapkan sebesar Rp1.587.020.352,00 dan terealisasi sebesar Rp1.019.013.932,00 atau 64,21% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 6) Pada APBD Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk Belanja Aset Lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA. 2022 menetapkan pagu anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp12.933.969.700,00 dan terealisasi sebesar Rp11.946.886.392,00 atau 92,37% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

d. Belanja Transfer

Pemerintah Kabupaten Bima pada TA. 2022 menetapkan pagu anggaran Belanja Transfer sebesar Rp286.598.833.396,00 dan terealisasi sebesar Rp285.345.706.455,00 atau 99,56% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Belanja Transfer tersebut diperuntukan pada Belanja Bagi Hasil ke Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pagu anggaran Belanja Bagi Hasil ditetapkan sebesar Rp5.010.362.950,00 dan terealisasi sebesar Rp3.752.265.309,00 atau 74,89% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
- 2) Pagu anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ditetapkan sebesar Rp281.588.470.446,00 dan terealisasi sebesar

Rp281.593.441.146,00 atau 100% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

- 3) Pada APBD Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

2.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Bima pada TA. 2022 menetapkan pagu anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp59.099.893.422,00 dan terealisasi sebesar Rp58.394.893.416,52 atau 98,81% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ditetapkan sebesar Rp58.349.893.422,52 dan terealisasi sebesar Rp58.349.893.422,52 atau 100% dari yang ditetapkan.

- 2) Pagu anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ditetapkan sebesar Rp750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp44.999.994,00 atau 6,00% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

- b. Pemerintah Kabupaten Bima pada TA. 2022 menetapkan pagu anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp4.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.200.000.000,00 atau 91,30% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. Secara ringkas, ikhtisar capaian kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing entitas akuntansi/Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-Masing Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022

NO.	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN			BELANJA		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Sekretariat Daerah	7.380.000.000,00	5.571.260.418,00	75,49	57.556.065.858,00	55.429.629.994,00	96,31
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	45.228.086.601,00	43.599.919.447,00	96,40
3.	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	12.946.303.000,00	12.765.571.515,00	98,60
4.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	565.089.984.778,00	546.433.245.681,56	103,67
5.	Dinas Kesehatan	11.345.595.500,00	9.343.784.192,00	82,36	200.168.564.766,00	186.433.148.348,00	93,14
6.	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	7.816.863.800,00	7.491.869.795,00	95,84
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	7.167.982.756,00	6.848.727.692,00	95,55
8.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.434.187.000,00	774.258.700,00	53,99	4.932.004.400,00	4.887.263.312,00	99,09
9.	Dinas Perhubungan	472.577.500,00	106.531.500,00	22,54	10.678.519.324,00	9.936.708.571,00	93,05
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	5.986.441.750,00	5.761.847.191,00	96,25
11.	Dinas Pariwisata	166.600.000,00	40.695.000,00	24,43	6.525.188.550,00	6.159.240.479,00	94,39
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108.700.000,00	55.320.000,00	50,89	138.708.866.126,00	135.430.163.645,00	97,64
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	39.513.738.829,00	38.332.177.896,00	97,01
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	5.243.296.000,00	5.051.500.586,00	96,34
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.654.160.500,00	1.055.657.500,00	63,82	9.049.322.720,00	8.816.584.389,00	97,43
16.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	378.313.000,00	198.272.000,00	52,41	77.859.526.346,00	76.045.269.899,00	97,67
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	309.792.000,00	180.175.000,00	58,16	21.068.829.400,00	20.803.882.662,00	98,74
18.	Dinas Lingkungan Hidup	225.000.000,00	101.465.000,00	45,10	8.404.938.050,00	8.353.000.643,00	99,38
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	8.278.935.373,00	8.009.778.633,00	96,75
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	18.922.812.600,00	17.278.368.017,00	91,31
21.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	8.674.850.200,00	8.401.976.935,00	96,85

NO.	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN			BELANJA		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.023.885.000,00	808.587.208,00	39,95	6.333.843.000,00	5.566.961.791,00	87,89
23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	760.000.000,00	760.760.000,00	100,10	21.798.624.959,00	21.467.167.261,00	98,48
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.994.962.400,00	3.831.598.087,00	95,91
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	13.685.640.000,00	13.325.618.539,00	97,37
26.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	11.042.180.890,00	10.581.931.040,00	95,83
27.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	6.990.889.726,00	6.585.364.160,00	94,20
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.690.744.439.851,00	1.666.318.043.778,14	98,56	335.519.149.351,00	331.498.733.074,00	98,80
29.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	24.623.194.000,00	16.013.801.499,00	65,04	6.639.510.400,00	5.987.031.200,00	90,17
30.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	4.186.329.480,00	3.861.084.225,00	92,23
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	5.800.312.309,00	5.627.827.943,00	97,03
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	6.507.201.400,00	6.015.103.449,00	92,44
33.	Rumah Sakit Umum Daerah	62.498.354.000,00	74.268.997.689,86	118,83	141.920.202.433,00	141.354.247.813,00	99,60
34.	Kecamatan Sape	0,00	0,00	0,00	1.937.675.120,00	1.607.220.620,00	82,95
35.	Kecamatan Bolo	0,00	0,00	0,00	2.568.485.200,00	2.430.147.931,00	94,61
36.	Kecamatan Woha	0,00	0,00	0,00	2.604.002.200,00	2.415.124.860,00	92,75
37.	Kecamatan Lambu	0,00	0,00	0,00	1.905.236.100,00	1.877.670.536,00	98,55
38.	Kecamatan Monta	0,00	0,00	0,00	1.993.584.760,00	1.847.065.629,00	92,65
39.	Kecamatan Wera	0,00	0,00	0,00	2.294.385.200,00	2.106.285.553,00	91,80
40.	Kecamatan Madapangga	0,00	0,00	0,00	2.503.103.520,00	2.438.569.544,00	97,42
41.	Kecamatan Langgudu	0,00	0,00	0,00	1.725.641.400,00	1.689.392.660,00	97,90
42.	Kecamatan Palibelo	0,00	0,00	0,00	1.754.234.000,00	1.649.333.907,00	94,02
43.	Kecamatan Belo	0,00	0,00	0,00	1.407.206.640,00	1.362.133.110,00	96,80
44.	Kecamatan Ambalawi	0,00	0,00	0,00	1.844.367.998,00	1.788.579.289,00	96,98
45.	Kecamatan Donggo	0,00	0,00	0,00	1.618.314.140,00	1.414.628.418,00	87,41
46.	Kecamatan Wawo	0,00	0,00	0,00	1.897.805.200,00	1.702.228.569,00	89,69
47.	Kecamatan Soromandi	0,00	0,00	0,00	1.586.489.520,00	1.527.909.982,00	96,31
48.	Kecamatan Sanggar	0,00	0,00	0,00	1.961.938.400,00	1.802.387.526,00	91,87
49.	Kecamatan Parado	0,00	0,00	0,00	1.401.941.200,00	1.280.090.185,00	91,31
50.	Kecamatan Tambora	0,00	0,00	0,00	1.836.496.800,00	1.704.004.675,00	92,79
51.	Kecamatan Lambitu	0,00	0,00	0,00	1.543.816.800,00	1.469.799.790,00	95,21
JUMLAH		1.804.124.798.351,00	1.775.856.490.997,70	98,43	1.858.624.691.773,00	1.800.085.116.696,56	96,85

a. Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022 bahwa pagu anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.804.124.798.351,00 dan terealisasi sebesar Rp1.775.856.490.997,70 atau sebesar 98,43% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	160.302.563.946,00	140.010.228.296,70	87,34
2.	Pendapatan Transfer	1.623.852.773.835,00	1.617.563.205.623,00	99,61
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.969.460.570,00	18.283.057.078,00	91,56
JUMLAH		1.804.124.798.351,00	1.775.856.490.997,70	98,43

b. Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022 bahwa pagu anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp1.858.624.691.773,00 dan terealisasi sebesar Rp1.800.085.116.696,56 atau sebesar 96,85% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer
Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	Belanja Operasi	1.306.101.139.943,00	1.256.753.332.586,56	96,22
2.	Belanja Modal	252.990.748.734,00	246.039.191.263,00	97,25
3.	Belanja Tidak Terduga	12.933.969.700,00	11.946.886.392,00	92,37
4.	Belanja Transfer	286.598.833.396,00	285.345.706.455,00	99,56
JUMLAH		1.858.624.691.773,00	1.800.085.116.696,56	96,85

c. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	Penerimaan Pembiayaan	59.099.893.422,00	58.394.893.416,52	98,81
2.	Pengeluaran Pembiayaan	4.600.000.000,00	4.200.000.000,00	91,30

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022 mencapai 97,35 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat sumber-sumber Pendapatan Daerah yang belum mampu mencapai target

sampai dengan akhir TA. 2022. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bima, antara lain :

- a. Kemampuan realisasi Pajak Daerah yang masih sangat lamban terutama Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terwujud secara optimal karena sistem pelaporan yang belum terintegrasi.
- c. Aparatur pengelola administrasi PAD pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya menjalankan sistem dan prosedur yang ditetapkan, sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan.
- d. Sarana dan prasarana penunjang dalam pemungutan PAD, seperti sarana mobilitas, gedung dan bangunan serta sarana lainnya belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut berdampak pada intensitas operasional pemungutan PAD relatif masih rendah dan terbatasnya jangkauan pelayanan dalam pemungutan PAD.
- e. Belum diterapkannya penegakan hukum (*law inforcement*) terhadap wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak patuh dalam membayar pajak/retribusi daerah. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak/retribusi tetap lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak/retribusi.
- f. Tingkat kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam membayar pajak/retribusi daerah relatif masih rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bima melakukan berbagai upaya dengan menerapkan beberapa solusi kebijakan, antara lain :

- a. Melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga diharapkan realisasi PAD dapat meningkat.
- b. Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala atas pengelolaan PAD yang bersifat internal maupun eksternal. Upaya tersebut diharapkan bisa meminimalisir penyimpangan atau kebocoran dalam pengelolaan PAD.

- c. Melakukan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis kepada Aparatur pengelola PAD pada Perangkat Daerah secara berkelanjutan serta mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan pengembangan teknologi informasi.
- d. Meningkatkan dukungan sarana mobilitas untuk kelancaran operasional penagihan pajak/retribusi daerah dan meningkatkan dukungan infrastruktur serta sarana dan prasarana Pasar, Rumah Sakit Umum Daerah dan lainnya dalam upaya meningkatkan realisasi PAD.
- e. Memberikan penghargaan kepada perusahaan, lembaga maupun perseorangan yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak dan memberikan penghargaan kepada Institusi atau petugas yang berprestasi dalam memungut pajak/retribusi daerah. Upaya ini diharapkan agar wajib pajak termotivasi dalam memenuhi kewajibannya. Demikian halnya juga dengan petugas pemungut pajak/retribusi daerah diharapkan termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya.
- f. Melakukan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak/wajib retribusi melalui pertemuan/rapat, spanduk, media cetak maupun melalui papan reklame dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi daerah untuk lebih patuh/taat dalam membayar kewajibannya.
- g. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap obyek dan subyek pajak baru, sehingga jumlah obyek dan subyek pajak diharapkan dapat meningkat/bertambah.
- h. Melakukan penilaian atau uji petik terhadap obyek pajak, sehingga diperoleh target yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- i. Mengembangkan teknologi informasi pelayanan pajak/retribusi daerah secara *online*, meliputi pendataan, pemantauan transaksi obyek pajak/retribusi dan pembayaran pajak/retribusi secara non tunai.

Lebih lanjut, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bima juga saat ini adalah masih besarnya alokasi Belanja Pegawai (belanja aparatur) yang harus dianggarkan setiap tahunnya yang mempengaruhi kecilnya persentase pengalokasian belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada TA. 2022 Pemerintah

Kabupaten Bima mengarahkan masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program prioritas dengan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran yang berorientasi pada hasil yang efektif.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan umum pelaporan keuangan pemerintah adalah menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Sementara secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bima TA. 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan buletin teknisnya, Peraturan Bupati Bima Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bima, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Periode Akuntansi yang digunakan dalam menyajikan informasi keuangan adalah berdasarkan Tahun Anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Bima secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima TA. 2022 disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan data-data keuangan lainnya.

SKPKD merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pada TA. 2022 dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Perangkat Daerah merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat

4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pariwisata
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16. Dinas Pertanian dan Perkebunan
17. Dinas Kelautan dan Perikanan
18. Dinas Lingkungan Hidup
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21. Dinas Ketahanan Pangan
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
25. Satuan Polisi Pamong Praja
26. Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
27. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
30. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
33. Rumah Sakit Umum Daerah
34. Kecamatan Sape

35. Kecamatan Bolo
36. Kecamatan Woha
37. Kecamatan Lambu
38. Kecamatan Monta
39. Kecamatan Wera
40. Kecamatan Madapangga
41. Kecamatan Langgudu
42. Kecamatan Palibelo
43. Kecamatan Belo
44. Kecamatan Ambalawi
45. Kecamatan Donggo
46. Kecamatan Wawo
47. Kecamatan Soromandi
48. Kecamatan Sanggar
49. Kecamatan Parado
50. Kecamatan Tambora
51. Kecamatan Lambitu

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022 yaitu *cash basis* dan *accrual basis*, dimana *cash basis* digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja-LRA, dan Pembiayaan-LRA. Sementara *accrual basis* digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban-LO, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Cash basis digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas yang memiliki arti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Sementara, *accrual basis* digunakan dalam penyusunan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang memiliki arti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya

transaksi/saat kejadian/saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pendapatan dalam Laporan Operasional diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah/entitas pelaporan.

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu asumsi dasar dalam penyusunan LKPD adalah keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), disamping kemandirian dan kesinambungan entitas. Hal ini berarti bahwa LKPD Kabupaten Bima harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran berhubungan dengan pengakuan suatu kejadian dan nilai dalam catatan akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan dalam LKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

4.3.1 Pengukuran Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pengukuran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu sebesar kas yang diterima di Kas Daerah atas pendapatan atau penerimaan pembiayaan tersebut. Sementara pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.2 Pengukuran Pos-pos Laporan Operasional

Pengukuran Pendapatan-LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self asesment system* dicatat sebesar nilai pajak terutang yang dicantumkan dalam rekapitulasi SKPDKB, SKPDKBT serta SKPDN.
- b. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam rekapitulasi SKP/SKR Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKP/SKR Daerah mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Kabupaten Bima.

- c. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO sebesar hak Pemerintah Kabupaten Bima.
- d. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual", bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.
- e. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- f. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- g. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- h. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- i. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- k. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pengukuran beban yaitu sebesar harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila tidak ada harga perolehan, maka beban diukur berdasarkan taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

4.3.3 Pengukuran Pos-pos Neraca

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar :
 - Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
 - Nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar, apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan. Apabila tidak ada nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - Nilai nominal, apabila Investasi Jangka Pendek dalam bentuk bukan surat berharga.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- d. Persediaan dicatat sebesar :
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar :
 - Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

- Biaya perolehan apabila investasi jangka panjang yang bersifat permanen.
 - Nilai Perolehan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan.
 - Nilai bersih yang dapat direalisasikan, apabila Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
 - Biaya pembangunan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah.
 - Harga perolehan, apabila investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah, atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.
- f. Investasi Non Permanen Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir.
- g. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- h. Aset lainnya dicatat sebesar :
- Nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan untuk piutang dari tagihan penjualan angsuran. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- Nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak untuk Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi.
- Harga perolehan untuk aset tak berwujud.
- Nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian untuk aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan dan nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan untuk aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam pengakuan, pengukuran maupun penyajian laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Bima maupun Perangkat Daerah dibawahnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian untuk Laporan Realisasi Anggaran terdapat sedikit perbedaan klasifikasi rekening yang digunakan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk itu diperlukan konversi/*mapping* dari rekening Permendagri tersebut ke rekening SAP.

Untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD dan Laporan Arus Kas, sesuai dengan SAP, Pemerintah Kabupaten Bima menggunakan *cash basis* yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah. Besarnya pendapatan dan belanja yang diakui adalah sebesar nilai pertanggungjawaban yang disahkan oleh SKPKD.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pokok

4.5.1 Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- c. Saldo Anggaran Lebih adalah kumpulan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- d. Pendapatan-LRA diakui pada saat :
 - Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan OPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA.
 - Diterima di OPD.
 - Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
 - Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.
 - Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di OPD pemungut dan penyeter.
 - Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga.

- Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga.
- Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kabupaten Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui sebagai Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang di sepakati dengan Pemerintah Kabupaten Bima.
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga.
- Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

- e. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.5.2 Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- d. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- e. Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau OPD Pengguna Anggaran dan klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- f. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.
- g. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- h. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
- i. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus

membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).

- j. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- k. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- l. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- m. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain :
 - Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.
- n. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.5.3 Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan.
- c. Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.
- d. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
- e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- f. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.
- g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- h. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari

kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

- i. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- j. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- k. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- l. Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

4.5.4 Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan terealisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

- d. Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- e. Pendapatan-LO pada OPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- f. PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bima yang disahkan dengan penetapan.
- g. PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan.
- h. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.5.5 Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- a. Beban diakui saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- c. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- d. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat

Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

- e. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

4.5.6 Aset/Aktiva

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.5.6.1 Aset Lancar

- a. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli

dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

- c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- d. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya).
- e. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi OPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK OPD.
- f. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
- g. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- h. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

- i. Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
- j. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat: diterbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- k. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- l. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- m. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- n. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- o. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- p. Persediaan dapat terdiri atas: persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar, dan persediaan bahan makanan pokok.
- q. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

4.5.6.1.1 Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi jangka panjang terdiri dari :
 - 1) Investasi nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa: pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir, dan investasi non permanen lainnya.

- 2) Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa: penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.
 - a. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria: manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
 - b. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
 - c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%; metode nilai bersih yang

direalisasikan dengan kriteria kepemilikan bersifat *nonpermanent*.

- d. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- e. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.
- f. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
- g. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
- h. Porsentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan pada tingkat kolektibilitas. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.
- i. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

4.5.6.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.
- c. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
- d. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- e. Peralatan dan mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.
- f. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara,

- monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.
- g. Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
 - h. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
 - i. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
 - j. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - k. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
 - l. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- m. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- n. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
 - a. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.5.6.3 Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.
- b. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

4.5.6.4 Aset Lainnya

- a. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

- b. Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.
- d. Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- e. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
- f. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
- g. Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- h. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- i. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu

Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

- j. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.
- k. Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
- l. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.
- m. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tak berwujud adalah 20 tahun sejak perolehan ATB.
- n. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.
- o. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

- p. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
- q. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.
- r. Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.
- s. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga
- t. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.5.6.5 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- c. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- d. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

- e. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- g. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- h. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.5.6.6 Ekuitas

- a. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bima pada tanggal laporan.
- b. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bima yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di OPD.
- c. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sementara itu, ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan OPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk

dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.

- d. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima TA. 2022 adalah konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi. Penjelasan terhadap pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.1 PENDAPATAN DAERAH	1.775.856.490.997,70	1.775.825.126.383,90

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.804.124.798.351 dan terealisasi sebesar Rp1.775.856.490.997,70 atau 98,43% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA. 2021 sebesar Rp1.775.825.126.383,90, maka realisasi Pendapatan Daerah TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp31.364.613,80 atau 0,002%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah TA. 2022 diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	160.302.563.946,00	140.010.228.296,70	87,34	141.708.257.765,90
2.	Pendapatan Transfer	1.623.852.773.835,00	1.617.563.205.623,00	99,61	1.552.6109.854.985,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.969.460.570,00	18.283.057.078,00	91,56	81.907.013.633,00
Jumlah		1.804.124.798.351,00	1.775.856.490.997,70	98,43	1.775.825.126.383,90

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	140.010.228.296,70	141.708.257.765,90

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran PAD ditetapkan sebesar Rp160.302.563.946,00 dan terealisasi sebesar Rp140.010.228.296,70 atau 87,34% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi PAD TA. 2021 sebesar Rp141.708.257.765,90, maka realisasi PAD TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.698.029.469,20 atau 1,20%. Anggaran dan realisasi PAD TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi PAD TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pajak Daerah	24.623.194.000,00	16.013.801.499,00	65,04	13.778.957.369,00
2.	Retribusi Daerah	26.980.435.500,00	18.663.813.599,00	69,18	18.134.336.488,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.310.000.000,00	5.552.260.418,00	87,99	5.049.293.415,67
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	102.388.934.446,00	99.780.352.780,70	97,45	104.745.670.493,23
Jumlah		160.302.563.946,00	140.010.228.296,70	87,34	141.708.257.765,90

Penjelasan terhadap rincian PAD tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.1.1 Pajak Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	24.623.194.000,00	13.778.957.369,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Pajak Daerah ditetapkan sebesar Rp24.623.194.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.013.801.499,00 atau 65,04% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA. 2021 sebesar Rp13.778.957.369,00, maka realisasi Pajak Daerah TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.234.844.130,00 atau 13,96%. Anggaran dan realisasi Pajak Daerah TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA. 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pajak Hotel	205.000.000,00	126.982.671,00	61,94	61.691.951,00
2.	Pajak Restoran	70.000.000,00	240.280.801,00	348,23	45.738.800,00
3.	Pajak Hiburan	5.000.000,00	4.505.000,00	90,10	1.200.000,00
4.	Pajak Reklame	78.000.000,00	183.410.250,00	235,14	90.053.250,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	12.000.000.000,00	11.360.622.007,00	94,67	9.017.309.972,00
6.	Pajak Parkir	80.000.000,00	46.716.400,00	58,40	0,00
7.	Pajak Air Tanah	39.000.000,00	52.469.000,00	134,54	24.000.000,00

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
8.	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	630.000,00	6,30	0,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.836.194.000,00	1.205.488.885,00	65,65	681.543.975,00
10.	PBB Pedesaan dan Perkotaan	8.600.000.000,00	2.414.643.035,00	28,08	3.490.752.921,00
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.700.000.000,00	355.024.000,00	20,88	319.173.500,00
Jumlah		24.623.194.000,00	16.013.801.499,00	65,04	13.778.957.369,00

Tinggi/rendahnya realisasi Pajak Daerah dari pagu anggaran yang ditetapkan, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel terealisasi sebesar 61,94% dari target yang ditetapkan karena dari 3 (tiga) hotel bintang satu yang berada di wilayah Kabupaten Bima, tersisa hanya 2 (dua) hotel yang beroperasi. Kemudian banyaknya losmen yang tidak beroperasi dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dapat dipungut pajaknya hampir tidak terdapat di wilayah Kabupaten Bima.
- b. Pajak Restoran terealisasi sebesar 348,23% dari target yang ditetapkan karena mulai Tahun 2022 untuk makan-minum yang dibelanjakan oleh Perangkat Daerah telah ditetapkan dan dipungut pajaknya, sehingga Pajak Restoran terealisasi melampaui target yang ditetapkan.
- c. Pajak Hiburan terealisasi sebesar 90,10% dari target yang ditetapkan karena pada Tahun 2022 banyaknya pagelaran seni dan pertunjukan insidental di wilayah Kabupaten Bima dan adanya penambahan Wajib Pajak baru Kolam Renang Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.
- d. Pajak Reklame terealisasi sebesar 235,14% dari target yang ditetapkan karena tingginya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dan adanya beberapa wajib Pajak baru yang berkontribusi cukup tinggi terhadap realisasi Pajak reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan PLN terealisasi sebesar 94,67% dari target yang ditetapkan karena jumlah KWH yang terpakai selama Tahun 2022 belum ada perubahan.
- f. Pajak Parkir terealisasi sebesar 58,40% dari target yang ditetapkan karena kurang maksimalnya pengelolaan Pajak Parkir oleh Pihak Ketiga di area parkir Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima.
- g. Pajak Air Tanah terealisasi sebesar 134,54% dari target yang ditetapkan karena adanya penambahan Wajib pajak baru dan dilakukannya perhitungan ulang debit

penggunaan air bawah tanah terhadap CV. Lam-lam, sehingga penetapan dan realisasi Pajak Air Tanah ikut naik.

- h. Pajak Sarang Burung Walet terealisasi sebesar 6,30% dari target yang ditetapkan karena Pajak Sarang Burung Walet yang dimaksud adalah Pajak Sarang Burung Walet Rumahan yang penilaiannya berdasarkan *Self Assesment*. Dimana Wajib Pajak menghitung sendiri, menetapkan sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun hal tersebut belum dilakukan oleh Wajib Pajak karena masih rendahnya kesadaran, sehingga ketika dilakukan survei lapangan, data hasil panen tidak dapat dipastikan jumlahnya.
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan lainnya terealisasi sebesar 65,65% dari target yang ditetapkan karena hanya bersumber dari penggunaan batu kali, sirtu, dan tanah urug/tanah atas kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pihak Ketiga selama Tahun 2022.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) terealisasi sebesar 28,08% dari target yang ditetapkan karena berdasarkan ketentuan baru bahwa tarif PBB-P2 mengalami penurunan dari tarif tunggal sebesar 0,3 menjadi 0,1 dan 0,2 disamping masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi sebesar 20,88% dari target yang ditetapkan karena pengurusan BPHTB oleh Wajib Pajak bersifat kondisional/situasional, meskipun pada Tahun 2021 sudah mulai diterapkan aplikasi *Host To Host* antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bima dengan Badan Pertanahan Nasional dalam pengurusan BPHTB. Selain hal tersebut, jumlah obyek pajak yang nilai transaksinya besar relatif sedikit dan lebih banyak wajib pajak yang melakukan pengurusan ulang atas BPHTB nihil yang tertunda.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	18.663.813.599,00	18.134.336.488,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Retribusi Daerah ditetapkan sebesar Rp26.980.435.500,00 dan terealisasi sebesar Rp18.663.813.599,00 atau 69,18% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah TA. 2021 sebesar

Rp18.134.336.488,00, maka realisasi Retribusi Daerah TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp529.477.111,00 atau 2,84%. Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I.	Retribusi Jasa Umum	14.635.630.500,00	11.249.887.892,00	76,87	9.618.024.370,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.345.595.500,00	9.343.784.192,00	82,36	7.881.872.242,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	101.465.000,00	67,64	96.317.500,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00	19.777.000,00	28,25	8.995.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.543.368.000,00	993.293.000,00	64,36	942.297.500,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	70.002.500,00	7.275.000,00	10,39	0,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	22.477.500,00	9.075.000,00	40,37	0,00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.434.187.000,00	774.258.700,00	53,99	688.542.128,00
II.	Retribusi Jasa Usaha	10.314.520.000,00	6.602.663.499,00	64,01	863.853.500,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.436.400.000,00	6.138.569.499,00	65,05	6.034.973.056,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	88.200.000,00	52.329.500,00	59,33	66.747.000,00
	Retribusi Los Pasar	0,00	0,00	0,00	280.115.000,00
	Retribusi Tempat Pelelangan	192.000,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Terminal	112.100.000,00	54.318.500,00	48,46	33.859.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	128.475.000,00	3.400.000,00	2,65	44.179.500,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	110.760.000,00	100,69	116.900.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	10.600.000,00	9.890.000,00	93,30	200.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	20.000.000,00	6.769.000,00	33,85	4.849.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	126.000.000,00	28.355.000,00	22,50	14.664.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	282.553.000,00	198.272.000,00	70,17	81.000.000,00
	III.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.030.285.000,00	811.262.208,00	39,96
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		2.000.000.000,00	778.322.208,00	38,92	1.822.940.562,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum		19.385.000,00	24.265.000,00	125,17	435.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan		10.900.000,00	8.675.000,00	79,59	15.450.000,00
	Jumlah	26.980.435.500,00	18.663.813.599,00	69,18	18.134.336.488,00

Tinggi/rendahnya realisasi Retribusi Daerah dari target yang ditetapkan, dijelaskan sebagai berikut :

A. Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar 76,87% dari target yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar 82,36% dari target yang ditetapkan karena kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas di masing-masing Kecamatan yang cukup tinggi, terutama dari Klaim JKN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sondosia.

- Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar 67,64% dari target yang ditetapkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi persampahan dan masih kurangnya sarana dan prasarana pengangkut sampah.
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar 28,25% dari target yang ditetapkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar jasa parkir.
 - Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar 64,36% dari target yang ditetapkan karena tarif retribusi masih menggunakan tarif Peraturan Daerah yang lama. Selanjutnya terhadap Peraturan baru, mulai disosialisasikan pada Bulan Agustus Tahun 2022.
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 10,39% dari target yang ditetapkan karena masih kurang memadainya sarana dan prasarana tempat pengujian kendaraan bermotor (KIR) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bima.
 - Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang terealisasi sebesar 40,37% dari target yang ditetapkan karena alat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bima belum dikalibrasi, sehingga tidak dapat difungsikan. Terhadap realisasi tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Pemerintah Lombok Tengah yang alat tera ulangnya sudah dikalibrasi.
 - Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar 53,99% dari target yang ditetapkan karena kurang disesuaikan potensi yang ada dengan target yang ditetapkan.
- B. Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar 64,01% dari target yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar 65,05% dari target yang ditetapkan karena Bangunan Gedung, Laboratprium dan Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten Bima yang disewakan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan terealisasi sebesar 59,33% dari target yang ditetapkan karena tarif retribusi masih menggunakan tarif

Peraturan Daerah yang lama. Selanjutnya terhadap Peraturan baru, mulai disosialisasikan pada Bulan Agustus Tahun 2022.

- Retribusi Tempat Pelelangan tidak terealisasi atau 0,00% dari target yang ditetapkan karena pelaksanaan pelelangan tidak menggunakan jasa tempat pelelangan Pemerintah Kabupaten Bima.
- Retribusi Terminal terealisasi sebesar 48,46% dari target yang ditetapkan karena sudah berkurangnya jumlah Bus penumpang yang beroperasi, sehingga Bus yang keluar/masuk terminal juga berkurang.
- Retribusi Tempat khusus Parkir terealisasi sebesar 2,65% dari target yang ditetapkan karena kurang maksimalnya pemungutan, dimana tempat parkir yang ditargetkan merupakan tempat wisata dan keramaian umum lainnya yang kurang dikunjungi oleh masyarakat.
- Retribusi Rumah Potong hewan terealisasi mencapai 100,69% dari target yang ditetapkan karena intensitas pemotongan hewan dikabupaten bima meningkat terutama saat hari raya Idul Qurban.
- Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terealisasi sebesar 93,30% dari target yang ditetapkan karena cukup tinggnyai wisatawan lokal atau masyarakat Kabupaten Bima.
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terealisasi sebesar 33,85% dari target yang ditetapkan karena kurangnya penggunaan jasa transportasi air/laut oleh masyarakat, sehingga penggunaan pelayanan kepelabuhan cukup rendah.
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar 22,50% dari target yang ditetapkan karena pemanfaatan dan penetapan Retribusi Parkir GOR Panda dimulai Tahun 2022 dan sosialisasi pemanfaatan GOR Panda tersebut masih kurang, sehingga masyarakat masih banyak yang belum tau pemanfaatanya.
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar 70,17% dari target yang ditetapkan karena dipengaruhi oleh capaian beberapa hasil penjualan benih padi, bibit tomat, kelapa dan Cabe di beberapa Balai Benih Utama, BPP dan KBD.

C. Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar 39,96% dari target yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terealisasi sebesar 39,96% dari target yang ditetapkan karena menurunnya jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan IMB.
- Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan Angkutan Umum terealisasi sebesar 125,17% dari target yang ditetapkan karena tingginya jumlah angkutan umum perdesaan – MPU 13 sampai dengan 17 tempat duduk yang beroperasi.
- Retribusi Izin Usaha Perikanan terealisasi sebesar 75,00% dari target yang ditetapkan karena izin terhadap kegiatan usaha budidaya ikan segar/ikan kering/ udang/rumput laut baru dilakukan oleh 40% pengusaha perikanan, sementara untuk budidaya kerang hampir tidak ada di wilayah Kabupaten Bima.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	5.552.260.418,00	5.049.293.415,67

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditetapkan sebesar Rp6.310.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.552.260.418,00 atau 87,99% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2021 sebesar Rp5.049.293.415,67, maka realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp502.967.002,33 atau 9,06%. Anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.5
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR NTB)	970.000.000,00	844.390.644,00	87,05	0,00
2.	PT. Bank NTB Syariah	5.000.000.000,00	4.669.895.352,00	93,40	5.013.550.493,00
3.	BPR Pesisir Akbar	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	PT. Jamkrida NTB Bersaing	40.000.000,00	37.974.422,00	94,94	35.742.922,67

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
5.	PT. Dana Sanggar Mandiri	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	PD. Wawo	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	PT. Dana Usaha Mandiri	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.310.000.000,00	5.552.260.418,00	87,99	5.049.293.415,67

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	99.780.352.780,70	104.745.670.493,23

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp102.388.934.446,00 dan terealisasi sebesar Rp99.780.352.780,70 atau 97,45% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA. 2021 sebesar Rp104.745.670.493,23, maka realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.965.317.712,53 atau 4,74%. Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I.	Hasil Penjualan Aset BMD yang Tidak Dipisahkan	1.095.000.000,00	175.279.000,00	16,01	0,00
1.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	95.000.000,00	175.279.000,00	184,50	0,00
-	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	95.000.000,00	175.279.000,00	184,50	0,00
II.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.030.000.000,00	2.450.000,00	0,24	0,00
1.	Hasil Sewa BMD	30.000.000,00	2.450.000,00	8,17	0,00
-	Hasil Sewa BMD	30.000.000,00	2.450.000,00	8,17	0,00
2.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
III.	Jasa Giro	7.020.141.646	1.868.102.966,14	26,61	2.930.961.957,48
1.	Jasa Giro	7.020.141.646	1.868.102.966,14	26,61	2.930.961.957,48
-	Jasa Giro Pada Kas Daerah	7.020.141.646	1.864.104.754,68	26,61	2.930.961.957,48
IV.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.000.000,00	1.449.993,00	1,21	17.166.678,00
1.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.000.000,00	1.449.993,00	1,21	17.166.678,00
-	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.000.000,00	1.449.993,00	1,21	17.166.678,00
V.	Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.580.764.113,00	2.819.859.009,14	78,75	496.576.956,48
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.580.764.113,00	2.819.859.009,14	78,75	496.576.956,48
-	Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.580.764.113,00	2.819.859.009,14	78,75	496.576.956,48

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
VI.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	694.189.618,00	-	2.598.959.746,00
1.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	694.189.618,00	-	2.598.959.746,00
-	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	694.189.618,00	-	2.598.959.746,00
VII.	Pendapatan Dari Pengembalian	2.919.235.887,00	658.776.388,86	22,57	0,00
1.	Pendapatan Dari Pengembalian	2.919.235.887,00	658.776.388,86	22,57	0,00
-	Denda Keterlambatan	2.919.235.887,00	658.776.388,86	22,57	0,00
VIII.	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	167.533.603,00	-	235.694.433,00
1.	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	167.533.603,00	-	
-	Kelebihan Tunjangan Gaji/Keluarga/Anak	0,00	21.755.003,00	-	
-	Kelebihan Perjalanan Dinas	0,00	145.778.600,00	-	
IX.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.615.000,00	6.000.000,00	130,01	0,00
1.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	115.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	115.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	4.500.000,00	6.000.000,00	133,33	0,00
-	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.500.000,00	6.000.000,00	133,33	0,00
X.	Pendapatan BLUD	62.498.354.000,00	74.268.997.689,86	118,83	74.751.099.786,27
1.	Pendapatan BLUD	62.498.354.000,00	74.268.997.689,86	118,83	74.751.099.786,27
-	Pendapatan BLUD	62.498.354.000,00	74.268.997.689,86	118,83	74.751.099.786,27
XI.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	24.120.823.800,00	18.858.923.000,00	78,19	22.222.298.950,00
1.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	24.120.823.800,00	18.858.923.000,00	78,19	22.222.298.950,00
-	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	24.120.823.800,00	18.858.923.000,00	78,19	22.222.298.950,00
XII.	Penjualan Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	1.242.911.986,00
XIII.	Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
XIV.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	0,00	0,00	166.000.000,00
Jumlah		102.388.934.446,00	99.780.352.780,70	97,45	104.745.670.493,23

Tinggi/rendahnya realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari pagu anggaran yang ditetapkan, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset BMD pada BPKAD Kabupaten Bima merupakan hasil penjualan Bangunan Gedung (Rumah Dinas).
- b. Lain-lain PAD yang Sah Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bima merupakan hasil sewa penggunaan fasilitas di tempat rekreasi.
- c. Lain-lain PAD yang Sah Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada BPKAD Kabupaten Bima terealisasi sebesar 1,21% dari target yang ditetapkan merupakan jasa angsuran Dana Bergulir.
- d. Lain-lain PAD yang Sah pada BPKAD Kabupaten bersumber dari penerimaan Jasa Giro Kas dan bunga deposito yang disesuaikan dengan jumlah dana yang

mengendap dan tingkat suku bunga Bank. Kemudian untuk denda atas keterlambatan pekerjaan yang dikenakan kepada pihak ke-III, pengembalian atas temuan/Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bima, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kelebihan atas pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, Potongan Gaji Pensiunan PT. Taspen dan penerimaan lain-lain, Kelebihan Perjalanan Dinas dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

- e. Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Bima/Pendapatan BLUD terealisasi sebesar 118,83% dari target yang ditetapkan karena disesuaikan dengan tingkat pendapatan dan daya beli/kebutuhan masyarakat atas pelayanan rawat jalan, penunjang pelayanan, instalasi farmasi, instalasi gawat darurat, rawat inap, tindakan keperawatan dan medik terapi serta pendapatan kerjasama BLUD (BPJS Kesehatan) yang ada di RSUD Kabupaten Bima.
- f. Lain-lain PAD yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (BPKAD Kabupaten Bima) terealisasi sebesar 78,19% dari target yang ditetapkan karena disesuaikan dengan kontribusi Puskesmas (FKTP) pada dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	1.617.563.205.623,00	1.552.209.854.985,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Pendapatan Transfer ditetapkan sebesar Rp1.623.852.773.835,00 dan terealisasi sebesar Rp1.617.563.205.623,00 atau 99,61% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA. 2021 sebesar Rp1.552.209.854.985,00, maka realisasi Pendapatan Transfer TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp65.353.350.638,00 atau 4,04%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.554.443.571.000,00	1.545.288.621.298,00	99,41	1.269.627.636.325,00
-	Dana Perimbangan	1.363.301.623.000,00	1.354.146.673.298,00	99,33	1.269.627.636.325,00
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	191.141.948.000,00	191.141.948.000,00	100,00	227.084.884.000,00

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.409.202.835,00	72.274.584.325,00	104,13	55.497.334.660,00
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68.909.202.835,00	71.774.584.325,00	104,16	55.497.334.660,00
-	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	1.623.852.773.835,00	1.617.563.205.623,00	99,61	1.552.209.854.985,00

Penjelasan terhadap rincian Pendapatan Transfer tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.545.288.621.298,00	1.269.627.636.325,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditetapkan sebesar Rp1.554.443.571.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.545.288.621.298,00 atau 99,41% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA. 2021 sebesar Rp1.269.627.636.325,00, maka realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp275.660.984.973,00 atau 17,84%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diuraikan sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan	1.354.146.673.298,00	1.269.627.636.325,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Dana Perimbangan ditetapkan sebesar Rp1.363.301.623.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.354.146.673.298,00 atau 99,33% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan TA. 2021 sebesar Rp1.269.627.636.325,00, maka realisasi Dana Perimbangan TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp84.519.036.973,00 atau 6,24%. Anggaran dan realisasi Dana Perimbangan TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	58.319.181.000,00	76.166.011.723,00	130,60	23.167.175.386,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	833.301.560.000,00	829.208.582.000,00	99,51	832.682.655.000,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	228.042.124.000,00	220.041.099.096,00	96,49	392.530.056.980,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	243.638.758.000,00	228.730.980.479,00	93,88	0,00
5.	Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00	21.247.748.959,00
Jumlah		1.363.301.623.000,00	1.354.146.673.298,00	99,33	1.269.627.636.325,00

5.1.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
Pusat – Lainnya	1.775.856.490.997,70	1.775.825.126.383,90

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA 2022, bahwa pagu anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya ditetapkan sebesar Rp191.141.948.000,00 dan terealisasi sebesar Rp191.141.948.000,00 atau 100,00 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA. 2021 sebesar Rp227.084.884.000,00, maka realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp35.942.936.000,00 atau 15,83%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA. 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA. 2022

No.	URAIAN	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Dana Insentif Daerah	5.986.471.000,00	5.986.471.000,00	100	37.470.839.000,00
2.	Dana Desa dari Pemerintah Pusat	185.155.477.000,00	185.155.477.000,00	100	189.614.045.000,00
Jumlah		191.141.948.000,00	191.141.948.000,00	100	227.084.884.000,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	72.274.584.325,00	55.497.334.660,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah ditetapkan sebesar Rp69.409.202.835,00 dan terealisasi sebesar Rp72.274.584.325,00 atau 104,13% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA. 2021 sebesar Rp55.497.334.660,00, maka realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp16.777.249.665,00 atau 23,21%. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	72.274.584.325,00	55.497.334.660,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak ditetapkan sebesar Rp68.909.202.835,00 dan terealisasi sebesar Rp71.774.584.325,00 atau 104,16% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA. 2021 sebesar Rp55.497.334.660,00, maka realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp16.277.249.665,00 atau 22,68%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68.909.202.835,00	71.774.584.325,00	104,16	55.497.334.660,00
	Jumlah	69.409.202.835,00	72.274.584.325,00	104,13	55.497.334.660,00

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan Khusus dari	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
Pemerintah Provinsi	500.000.000,00	0,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	18.294.937.078,00	81.904.631.633,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp19.969.460.570,00 dan terealisasi sebesar Rp18.283.057.078,00 atau 91,56%. Dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA. 2021 sebesar Rp81.904.631.633,00, maka realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp63.621.574.555,00 atau 77,68%. Hal tersebut disebabkan karena TA. 2021 untuk Dana BOS masih diakui sebagai Pendapatan Lainnya, sementara mulai TA. 2022 untuk Dana BOS diakui sebagai Pendapatan Transfer DAK Non Fisik, sehingga mengakibatkan adanya penurunan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang cukup signifikan. Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pendapatan Hibah	19.969.460.570,00	1.779.500.000,00	91,61	12.859.543.633,00
2.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	69.047.470.000,00
Jumlah		19.969.460.570,00	18.294.937.078,00	91,61	81.904.631.633,00

Penjelasan terhadap rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	18.283.057.078,00	12.859.543.633,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten TA. 2022, bahwa pagu anggaran Pendapatan Hibah ditetapkan sebesar Rp19.969.460.570,00 dan terealisasi sebesar Rp18.283.057.078,00 atau 91,56% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah TA. 2021 sebesar Rp12.859.543.633,00, maka realisasi Pendapatan Hibah TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5.423.513.445,00 atau 29,66%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.16
Pendapatan Hibah TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	19.210.500.570,00	17.719.557.078,00	92,24	0,00
1.	Hibah Air Minum Pedesaan	1.500.000.000,00	1.216.000.000,00	81,07	0,00
2.	IPDMIP	17.710.500.570,00	16.503.557.078,00	93,19	12.693.543.633,00
3.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	166.000.000,00
II.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	758.960.000,00	575.380.000,00	75,81	0,00
1.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	758.960.000,00	575.380.000,00	75,81	0,00
	Jumlah	19.969.460.570,00	18.283.057.078,00	91,56	12.859.543.633,00

5.1.2 BELANJA DAERAH	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	1.800.085.116.696,56	1.757.036.661.722,40

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja dan Transfer ditetapkan sebesar Rp1.858.624.691.773,00 dan terealisasi sebesar Rp1.800.085.116.696,56 atau 96,85% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA. 2021 sebesar Rp1.757.036.661.722,40, maka realisasi Belanja Daerah TA. 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp43.048.454.974,16 atau 2,39%. Anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Operasi	1.306.101.139.943,00	1.256.753.332.586,56	96,22	1.178.724.818.835,40
2.	Belanja Modal	252.990.748.734,00	246.039.191.263,00	97,25	261.575.868.883,00
3.	Belanja Tidak Terduga	12.933.969.700,00	11.946.886.392,00	92,37	27.864.429.306,00
4.	Belanja Transfer	286.598.833.396,00	285.345.706.455,00	99,56	288.871.544.698,00
	Jumlah	1.858.624.691.773,00	1.800.085.116.696,56	96,85	1.757.036.661.722,40

Penjelasan terhadap rincian Belanja dan Transfer tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

	2022	2021
5.1.2.1 BELANJA OPERASI	(Rp)	(Rp)
	1.256.753.332.586,56	1.178.724.818.835,40

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Operasi ditetapkan sebesar Rp1.306.101.139.943,00 dan terealisasi sebesar Rp1.256.753.332.586,56 atau 96,22% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA. 2021 sebesar Rp1.178.724.818.835,40, maka realisasi Belanja Operasi TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp78.028.513.751,16 atau 6,21%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Pegawai	769.952.460.180,00	749.862.151.710,00	97,39	746.772.807.523,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	486.430.643.513,00	458.571.697.276,56	94,27	393.472.602.462,40
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Hibah	33.373.092.000,00	32.064.985.100,00	96,08	31.715.077.500,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	16.344.944.250,00	16.254.498.500,00	99,45	6.764.331.350,00
7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.306.101.139.943,00	1.256.753.332.586,56	96,22	1.178.724.818.835,40

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bima dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bima merupakan Perangkat Daerah yang baru terbentuk per 1 Januari 2022, sehingga untuk realisasi Belanja Operasi TA. 2021 masih tercatat pada Perangkat Daerah Induk sebelumnya. Dimana realisasi Belanja Operasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bima TA. 2021 tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima, sementara realisasi Belanja Operasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bima TA. 2021 tercatat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima. Penjelasan atas rincian Belanja Operasi TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

	2022	2021
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	(Rp)	(Rp)
	749.862.151.710,00	746.772.807.523,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp769.952.460.180,00 dan terealisasi sebesar Rp749.862.312.710,00 atau 97,39% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA. 2021 sebesar

Rp746.772.807.523,00, maka realisasi Belanja Pegawai TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.089.505.187,00 atau 0,41%. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Pada Masing-Masing Perangkat Daerah TA. 2022

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Sekretariat Daerah	16.240.431.376,00	15.723.880.210,00	96,82	16.840.012.795,00
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25.949.961.601,00	24.600.277.047,00	94,80	24.430.021.975,00
3.	Inspektorat	7.342.283.000,00	7.250.550.379,00	98,75	7.006.318.956,00
4.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	405.975.875.429,00	395.536.931.247,00	97,43	406.495.351.357,00
5.	Dinas Kesehatan	59.417.552.528,00	59.010.253.637,00	99,31	56.104.330.733,00
6.	Dinas Sosial	3.712.743.800,00	3.618.419.581,00	97,46	3.648.843.906,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.569.536.800,00	4.477.456.215,00	97,98	4.191.907.854,00
8.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.148.529.400,00	3.120.594.251,00	99,11	2.884.644.949,00
9.	Dinas Perhubungan	5.731.009.600,00	5.590.633.972,00	97,55	5.512.831.916,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.373.583.200,00	3.250.933.974,00	96,36	3.097.735.573,00
11.	Dinas Pariwisata	3.963.379.200,00	3.906.329.059,00	98,56	3.744.067.047,00
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.331.636.200,00	12.144.086.997,00	98,48	11.656.820.465,00
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.568.021.800,00	4.254.727.530,00	93,14	5.052.684.239,00
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.634.296.000,00	2.462.812.936,00	93,49	2.435.009.641,00
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.167.037.600,00	4.068.912.264,00	97,65	4.161.207.818,00
16.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	28.347.185.480,00	28.014.553.010,00	98,83	28.056.242.072,00
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.057.854.400,00	6.947.325.846,00	98,43	6.762.724.779,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup	3.808.768.050,00	3.795.155.176,00	99,64	3.300.401.784,00
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.707.736.400,00	3.626.632.435,00	97,81	3.449.004.070,00
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.448.805.600,00	6.415.447.430,00	99,48	6.389.586.987,00
21.	Dinas Ketahanan Pangan	2.798.350.200,00	2.651.937.980,00	94,77	2.295.049.465,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.347.248.000,00	3.274.235.086,00	97,82	3.384.898.854,00
23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.807.710.644,00	11.722.420.286,00	99,28	11.280.519.367,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3.074.762.400,00	2.932.877.122,00	95,39	2.501.961.512,00
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	5.318.570.000,00	4.976.648.539,00	93,57	4.845.739.881,00
26.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.289.240.890,00	5.182.678.698,00	97,99	5.354.729.715,00
27.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	3.483.729.800,00	3.370.695.070,00	96,79	3.654.524.911,00
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.094.045.853,00	24.666.520.566,00	94,53	30.557.968.416,00
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.113.691.000,00	3.007.740.218,00	96,60	3.122.201.000,00
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.128.349.400,00	1.987.329.399,00	93,37	1.955.908.812,00
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	58.791.208.291,00	58.862.182.550,00	100,12	47.259.381.995,00
32.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.371.850.400,00	2.801.593.653,00	83,09	0,00
33.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.713.041.000,00	1.564.405.133,00	91,32	0,00
34.	Kecamatan	27.124.434.838,00	25.044.974.214,00	92,33	25.340.174.679,00
Jumlah		769.952.460.180,00	749.862.151.710,00	97,39	746.772.807.523,00

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA. 2022 tersebut di atas dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.20
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	523.262.910.961,00	515.646.527.956,00	98,54	
1	Belanja Gaji Pokok ASN	397.590.195.251,00	394.387.286.026,00	99,19	399.225.942.004,00
-	Belanja Gaji Pokok PNS	375.814.595.251,00	372.769.601.226,00	99,19	383.757.741.293,00
-	Belanja Gaji Pokok PPPK	21.775.600.000,00	21.617.684.800,00	99,27	15.468.200.711,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	38.305.830.775,00	37.172.752.194,00	97,04	37.720.188.592,00
-	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	36.395.235.720,00	35.333.606.734,00	97,08	36.422.494.738,00
-	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.910.595.055,00	1.839.145.460,00	96,26	1.297.693.854,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.716.689.960,00	9.215.925.000,00	94,85	8.838.785.000,00
-	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.716.689.960,00	9.215.925.000,00	94,85	8.838.785.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	26.327.219.800,00	26.049.746.000,00	98,95	25.835.336.500,00
-	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.327.219.800,00	26.049.746.000,00	98,95	25.835.336.500,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.935.478.000,00	6.207.613.000,00	89,51	6.495.625.000,00
-	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.451.478.000,00	4.843.193.000,00	88,84	5.518.120.000,00
-	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.484.000.000,00	1.364.420.000,00	91,94	977.505.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	23.515.741.198,00	22.656.597.000,00	96,35	23.003.423.396,00
-	Belanja Tunjangan Beras PNS	21.950.541.198,00	21.183.067.260,00	96,50	21.957.678.596,00
-	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.565.200.000,00	1.473.529.740,00	94,14	1.045.744.800,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	560.489.006,00	482.493.932,00	86,08	348.882.477,00
-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	560.489.006,00	482.493.932,00	86,08	348.882.477,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.477.518,00	5.555.428,00	65,53	5.564.352,00
-	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.553.518,00	5.198.630,00	68,82	5.526.646,00
-	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	924.000,00	356.798,00	38,61	37.706,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.977.338.573,00	16.182.225.503,00	95,32	18.642.224.779,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.117.419.805,00	15.323.304.283,00	95,07	18.060.352.723,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	859.918.768,00	858.921.220,00	99,88	581.872.056,00
10	Belanja Iuran Jaminan Keselamatan Kerja ASN	844.950.140,00	808.968.471,00	95,74	818.174.549,00
-	Belanja Iuran Jaminan Keselamatan Kerja PNS	800.000.000,00	764.463.441,00	95,56	787.808.466,00
-	Belanja Iuran Jaminan Keselamatan Kerja PPPK	44.950.140,00	44.505.030,00	99,01	30.366.083,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.480.500.740,00	2.477.365.402,00	99,87	2.391.098.245,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.343.850.320,00	2.343.850.320,00	100,00	2.300.000.000,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	136.650.420,00	133.515.082,00	97,71	91.098.245,00
II	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	56.595.121.000,00	54.250.682.484,00	95,86	164.771.621.835,00
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	52.843.121.000,00	50.748.952.484,00	96,04	46.559.278.205,00
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	52.730.621.000,00	50.717.813.484,00	96,18	46.559.278.205,00
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	112.500.000,00	31.300.000,00	27,82	0,00
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.752.000.000,00	3.501.730.000,00	93,33	118.212.343.630,00
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.752.000.000,00	3.501.730.000,00	93,33	118.212.343.630,00
III	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN	134.608.142.172,00	125.398.632.228,00	93,16	14.445.128.907,00
1	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	107.000.000,00	80.000.000,00	74,77	0,00
-	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan PBB-P2	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan BPHTB	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	122.762.289.044,00	114.448.737.720,00	93,23	0,00
-	Belanja TPG PNSD	122.762.289.044,00	114.448.737.720,00	93,23	0,00

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
3	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.273.181.200,00	2.149.595.700,00	94,56	4.526.250.200,00
-	Belanja TKD PNSD	2.273.181.200,00	2.149.595.700,00	94,56	4.526.250.200,00
4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.326.575.000,00	1.241.750.000,00	93,61	715.250.000,00
-	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.326.575.000,00	1.241.750.000,00	93,61	715.250.000,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	3.854.786.928,00	3.306.949.558,00	85,79	5.978.183.707,00
-	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	3.854.786.928,00	3.306.949.558,00	85,79	5.978.183.707,00
6	Belanja Honorarium	4.272.760.000,00	4.160.049.250,00	97,36	3.197.545.000,00
-	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.155.580.000,00	4.043.168.000,00	97,29	3.052.065.000,00
-	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	117.180.000,00	116.881.250,00	99,75	145.480.000,00
7	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00	27.900.000,00
-	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00	27.900.000,00
IV	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN DPRD	21.610.619.386,00	20.382.686.959,00	94,32	20.220.413.100,00
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.004.010.000,00
-	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.004.010.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	102.561.480,00	72,97	101.238.480,00
-	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	102.561.480,00	72,97	101.238.480,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.297.200,00	70.696.080,00	72,66	65.257.920,00
-	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.297.200,00	70.696.080,00	72,66	65.257.920,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	86.058.000,00
-	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	86.058.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.455.814.500,00
-	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.455.814.500,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	191.165.100,00	136.294.200,00	71,30	135.380.700,00
-	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	191.165.100,00	136.294.200,00	71,30	135.380.700,00
7	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.103.000.000,00	5.103.000.000,00	100,00	5.103.000.000,00
-	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.103.000.000,00	5.103.000.000,00	100,00	5.103.000.000,00
8	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.275.750.000,00	1.275.750.000,00	100,00	1.275.750.000,00
-	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.275.750.000,00	1.275.750.000,00	100,00	1.275.750.000,00
9	Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	280.704.690,00	152.996.011,00	54,50	115.903.500,00
-	Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	280.704.690,00	152.996.011,00	54,50	115.903.500,00
10	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.112.638.496,00	6.087.506.688,00	99,59	5.970.000.000,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	100.000.000,00	76.245.120,00	76,25	0,00
-	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.409.624,00	2.065.392,00	85,71	0,00
-	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.228.872,00	6.196.176,00	85,71	0,00
-	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.003.000.000,00	6.003.000.000,00	100,00	5.970.000.000,00
11	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.398.800.000,00	4.908.000.000,00	90,91	4.908.000.000,00
-	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.398.800.000,00	4.908.000.000,00	90,91	4.908.000.000,00
12	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	464.820.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	464.820.000,00	0,00	0,00	0,00
V	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN KDH/WKDH	255.721.770,00	183.425.604,00	71,73	
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	
-	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	3.612.000,00	47,25	
-	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	3.612.000,00	47,25	
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	
-	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	41.354.970,00	4.345.200,00	10,51	
-	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	41.354.970,00	4.345.200,00	10,51	
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	840.000,00	536.964,00	63,92	
-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	840.000,00	536.964,00	63,92	

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.800,00	1.440,00	51,43	
-	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.800,00	1.440,00	51,43	
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH	53.000.000,00	22.050.000,00	41,60	
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH	40.000.000,00	22.050.000,00	55,13	
8	Belanja Iuran Jaminan Keselamatan Kerja Bagi KDH/WKDH	8.000.000,00	0,00	0,00	
-	Belanja Iuran Jaminan Keselamatan Kerja KDH/WKDH	5.000.000,00	0,00	0,00	
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	255.721.770,00	183.425.604,00	71,73	
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	7.644.000,00	3.612.000,00	47,25	
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan PBB-P2	7.644.000,00	3.612.000,00	47,25	
-	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan BPHTB	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	
VI	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH	752.000.000,00	752.000.000,00	100,00	
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	
-	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	
-	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	
VII	BELANJA PEGAWAI BLUD	32.867.944.891,00	33.248.196.479,00	101,16	
1	Belanja Pegawai BLUD	32.867.944.891,00	33.248.196.479,00	101,16	
-	Belanja Pegawai BLUD	32.867.944.891,00	33.248.196.479,00	101,16	
Jumlah		769.952.460.180,00	749.862.151.710,00	97,39	746.772.807.523,00

Pagu anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Kecamatan yang tercatat merupakan akumulasi dari 18 (delapan belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Bima.

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	458.571.697.276,56	393.472.602.462,40

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa ditetapkan sebesar Rp486.430.643.513 dan terealisasi sebesar Rp458.571.697.276,56 atau 94,27% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2021 sebesar Rp393.472.602.462,40, maka realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp65.099.094.814,16 atau 13,38%. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing Perangkat Daerah TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pada Masing-Masing
Perangkat Daerah TA. 2022

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Sekretariat Daerah	31.292.531.268,00	30.205.169.040,00	96,53	24.749.980.899,00
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18.898.325.000,00	18.623.086.900,00	98,54	16.174.067.000,00
3.	Inspektorat	5.351.270.000,00	5.277.241.136,00	98,62	4.195.597.424,00
4.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	91.857.602.043,00	83.910.107.337,56	91,35	83.337.286.791,40
5.	Dinas Kesehatan	110.201.446.724,00	99.772.437.780,00	90,54	85.234.999.010,00
6.	Dinas Sosial	1.900.373.750,00	1.730.149.714,00	91,04	1.654.128.511,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.124.941.288,00	2.098.778.477,00	98,77	1.419.670.200,00
8.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.399.501.000,00	1.382.703.061,00	98,80	1.602.063.898,00
9.	Dinas Perhubungan	1.661.111.310,00	1.541.392.163,00	92,79	901.159.327,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.507.632.040,00	2.406.195.817,00	95,95	2.784.698.308,00
11.	Dinas Pariwisata	2.278.256.600,00	2.124.436.670,00	93,25	1.568.338.950,00
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.591.666.172,00	28.433.612.779,00	96,09	40.414.898.491,00
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.654.272.822,00	3.513.735.391,00	96,15	19.814.985.234,00
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.534.400.000,00	2.514.087.650,00	99,20	1.206.322.012,00
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.986.262.620,00	3.859.533.125,00	96,82	1.923.354.130,00
16.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	47.613.281.000,00	46.361.234.103,00	97,37	22.048.979.880,00
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.769.217.292,00	13.615.505.816,00	98,88	5.158.025.500,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup	2.723.270.000,00	2.698.333.467,00	99,08	2.273.781.353,00
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.250.160.650,00	3.069.398.198,00	94,44	1.272.622.528,00
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.299.627.000,00	8.748.202.587,00	84,94	7.144.758.012,00
21.	Dinas Ketahanan Pangan	5.805.962.500,00	5.680.153.955,00	97,83	1.588.464.693,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.895.467.000,00	2.202.076.705,00	76,05	1.602.348.550,00
23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.738.172.315,00	8.568.525.975,00	98,06	1.442.741.676,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	906.686.500,00	886.069.965,00	97,73	799.190.700,00
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	7.872.483.000,00	7.854.927.000,00	99,78	7.265.649.000,00
26.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.332.990.310,00	4.981.012.652,00	93,40	2.930.936.563,00
27.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	3.308.968.332,00	3.019.245.090,00	91,24	3.210.251.020,00
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.480.314.902,00	9.132.226.661,00	96,33	7.195.136.206,00
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.379.562.015,00	2.316.473.725,00	97,35	3.356.049.941,00
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.068.853.300,00	2.777.518.050,00	90,51	2.301.408.200,00
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	37.620.053.650,00	37.574.685.078,00	99,88	30.719.956.498,00
32.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.982.660.000,00	2.905.917.547,00	97,43	0,00
33.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.094.086.250,00	1.923.925.092,00	91,87	0,00
34.	Kecamatan	7.049.234.860,00	6.863.598.570,00	97,37	6.180.751.957,00
Jumlah		486.430.643.513,00	458.571.697.276,56	94,27	393.472.602.462,40

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022 tersebut di atas dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I	BELANJA BARANG	155.628.248.450,00	148.343.768.517,00	95,32	393.427.595.412,95
1	Belanja Barang Pakai Habis	155.625.518.250,00	148.343.240.517,00	95,32	91.830.229.736,55
-	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	288.358.000,00	286.866.100,00	99,48	992.752.500,00
-	Belanja Bahan-Bahan Kimia	356.938.500,00	200.070.481,00	56,05	240.440.000,00
-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.201.934.487,00	5.423.553.765,00	87,45	4.776.082.289,55

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
-	Belanja Bahan-Bahan Baku	218.190.000,00	218.115.510,00	99,97	45.341.800,00
-	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.172.227.500,00	1.130.385.140,00	96,43	1.070.741.500,00
-	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	365.726.950,00	290.661.000,00	79,47	172.344.843,00
-	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	210.998.250,00	209.406.000,00	99,25	1.630.727.000,00
-	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	398.496.000,00	353.644.000,00	88,74	660.708.674,00
-	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.057.239.550,00	1.822.694.484,00	88,60	2.058.578.703,00
-	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	10.996.000,00	10.959.000,00	99,66	37.526.650,00
-	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	16.284.577,00	9.414.577,00	57,81	69.320.000,00
-	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	67.010.000,00	66.288.781,00	98,92	66.951.500,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.847.153.466,00	6.384.592.044,00	93,24	5.398.724.383,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.835.000,00	3.380.000,00	88,14	5.199.950,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.873.541.290,00	8.335.272.404,00	93,93	7.036.870.436,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	676.541.000,00	548.148.200,00	81,02	545.445.659,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	100.367.500,00	100.367.500,00	100,00	0,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	586.956.582,00	510.473.459,00	86,97	449.485.876,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	836.095.200,00	791.745.400,00	94,70	2.023.834.130,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.146.400.310,00	10.979.457.181,00	98,50	413.278.809,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	68.450.000,00	67.507.500,00	98,62	153.035.000,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	46.733.000,00	46.583.000,00	99,68	9.200.000,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	110.000.000,00	109.400.000,00	99,45	99.000.000,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	583.800.500,00	394.797.300,00	67,63	585.075.940,00
-	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.164.673.334,00	7.074.507.643,00	98,74	5.219.934.216,00
-	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.226.158.534,00	4.913.310.247,00	78,91	3.058.823.830,00
-	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	74.299.707.620,00	73.941.193.860,00	99,52	20.739.775.975,00
-	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00	273.281.400,00
-	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.530.662.000,00
-	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.216.321.100,00	1.209.933.900,00	99,47	273.281.400,00
-	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	18.193.050.000,00	16.790.554.549,00	92,29	2.250.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.592.349.000,00	3.585.004.210,00	99,80	12.553.099.673,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.537.424.000,00	681.661.032,00	44,34	3.219.511.500,00
-	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.216.321.100,00	1.209.933.900,00	99,47	29.700.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	76.270.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	543.060.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	463.650.000,00	442.589.000,00	95,46	364.704.500,00
-	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	200.000.000,00	197.120.000,00	98,56	324.819.000,00
-	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	189.000.000,00	87.878.700,00	46,50	185.130.000,00
-	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	236.270.000,00	198.049.450,00	83,82	92.565.000,00
-	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	190.320.000,00	188.968.100,00	99,29	79.623.500,00
-	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	112.500.000,00	67.132.800,00	59,67	110.020.000,00
-	Belanja Pakaian Penyelamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	52.140.000,00
-	Belanja Pakaian Adat Daerah	260.000.000,00	180.512.950,00	69,43	105.625.000,00
-	Belanja Pakaian Batik Tradisional	335.600.000,00	334.212.450,00	99,59	235.234.000,00
-	Belanja Pakaian Olahraga	161.221.000,00	153.828.800,00	95,41	274.175.500,00
-	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00
-	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	21.159.000,00
-	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.730.200,00	528.000,00	19,34	1.359.000,00
-	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.730.200,00	528.000,00	19,34	1.359.000,00
II	BELANJA JASA	151.838.897.373,00	142.999.517.816,00	94,18	133.411.051.522,00

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Jasa Kantor	108.727.404.021,00	102.658.357.509,00	94,42	102.254.877.851,00
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.091.551.000,00	1.587.283.999,00	75,89	1.454.447.579,00
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.701.960.000,00	7.448.921.500,00	96,71	5.662.488.400,00
	- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	0,00
	- Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	778.600.000,00	778.600.000,00	100,00	563.100.000,00
	- Honorarium Rohaniwan	3.700.000,00	700.000,00	18,92	5.400.000,00
	- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	10.000.000,00
	- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	268.510.000,00	252.110.000,00	93,89	28.294.000,00
	- Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	337.200.000,00	329.200.000,00	97,63	317.600.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.329.560.000,00	3.329.560.000,00	100,00	2.442.390.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	33.515.024.717,00	30.960.917.396,00	92,38	41.665.431.572,00
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	89.556.000,00	83.964.000,00	93,76	38.900.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.407.150.000,00	1.382.350.000,00	98,24	1.283.276.500,00
	- Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	828.000.000,00	815.600.000,00	98,50	254.800.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	707.200.000,00	702.000.000,00	99,26	817.400.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	366.400.000,00	366.400.000,00	100,00	430.550.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	211.900.000,00	204.900.000,00	96,70	178.150.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.857.492.000,00	31.582.928.500,00	99,14	29.512.983.500,00
	- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.767.600.000,00	3.617.955.000,00	96,03	3.085.594.017,00
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.009.900.000,00	922.300.000,00	91,33	574.450.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	769.625.000,00	723.813.500,00	94,05	862.408.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.540.950.000,00	2.520.040.666,00	99,18	1.522.849.625,00
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	540.250.000,00	520.900.000,00	96,42	610.050.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Supir	328.300.000,00	311.100.000,00	94,76	207.950.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	39.600.000,00	39.600.000,00	100,00	35.900.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	19.174.723,00	19.174.723,00	100,00	5.000.000,00
	- Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.101.100.000,00	1.098.126.400,00	99,73	990.992.000,00
	- Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	93.000.000,00	55.097.900,00	59,25	64.483.400,00
	- Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	494.600.000,00	492.901.000,00	99,66	16.877.000,00
	- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	379.025.000,00	377.725.000,00	99,66	117.650.000,00
	- Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	- Belanja Jasa Kalibrasi	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	59.031.720,00
	- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	160.398.400,00	146.250.000,00	91,18	1.680.000,00
	- Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	149.620.000,00
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	415.050.000,00	389.090.000,00	93,75	485.550.000,00
	- Belanja Tagihan Telepon	1.024.470.000,00	398.053.795,00	38,85	228.374.309,00
	- Belanja Tagihan Air	37.400.000,00	14.957.116,00	39,99	20.346.676,00
	- Belanja Tagihan Listrik	6.133.591.680,00	5.573.584.166,00	90,87	4.379.256.554,00
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	474.240.000,00	397.825.000,00	83,89	383.274.499,00
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.482.292.200,00	1.247.749.022,00	84,18	1.360.849.895,00
	- Belanja Paket/Pengiriman	111.863.800,00	101.809.800,00	91,01	11.175.000,00
	- Belanja Penambahan Daya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	614.570.000,00	405.904.282,00	66,05	302.350.605,00
	- Belanja Pengolahan Air Limbah	379.600.000,00	273.850.000,00	72,14	0,00
	- Belanja Lembur	3.190.599.501,00	3.088.714.744,00	96,81	2.083.953.000,00
	- Belanja Medical Check Up	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.437.076.852,00	17.147.141.054,00	98,34	14.260.570.800,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.337.212.604,00	2.336.541.774,00	99,97	0,00
	- Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	0,00	0,00	0,00	2.931.759.600,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	14.471.048.200,00	14.272.827.800,00	98,63	10.322.620.000,00

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	- Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	190.775.200,00	180.062.400,00	94,38	1.006.191.200,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	126.733.608,00	120.326.340,00	94,94	0,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	191.307.240,00	117.382.740,00	61,36	0,00
	- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.260.020.500,00	3.138.215.500,00	96,26	
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	462.400.000,00	421.243.400,00	91,10	0,00
	- Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	52.500.000,00	43.500.000,00	82,86	0,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	722.162.000,00	708.239.500,00	98,07	0,00
	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	1.914.912.000,00
	- Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	54.950.000,00	53.188.000,00	96,79	3.000.000,00
	- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.168.964.500,00	1.125.844.000,00	96,31	48.450.000,00
	- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	352.060.000,00	350.410.000,00	99,53	10.000.000,00
	- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67	534.495.000,00
	- Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	364.965.000,00	354.965.000,00	97,26	4.303.000,00
	- Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	9.519.000,00	9.519.000,00	100,00	23.150.000,00
	- Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	48.906.600,00	97,81	851.600.000,00
	- Belanja Sewa Mebel	1.474.380.000,00	1.088.836.000,00	73,85	206.164.000,00
	- Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	150.000.000,00	103.500.000,00	69,00	224.000.000,00
	- Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	592.850.000,00	364.100.000,00	61,42	0,00
	- Belanja Sewa Peralatan Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00	938.470.000,00
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	200.000.000,00	120.000.000,00	60,00	0,00
	- Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	55.000.000,00	50.000.000,00	90,91	79.000.000,00
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	375.700.000,00	350.406.000,00	93,27	351.280.000,00
	- Belanja Sewa Bangunan Terbuka	80.280.000,00	80.280.000,00	100,00	19.500.000,00
	- Belanja Sewa Taman	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	120.000.000,00
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	49.720.000,00
	- Belanja Sewa Asrama	6.848.408.000,00	6.725.059.200,00	98,20	0,00
	- Belanja Sewa Hotel	300.000.000,00	293.000.000,00	97,67	245.010.000,00
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	386.097.000,00	373.066.450,00	96,63	50.060.000,00
5	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.700.000,00	28.270.000,00	98,50	5.330.800,00
	- Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	848.800.000,00	847.854.500,00	99,89	5.330.800,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	554.700.000,00	548.195.000,00	98,83	6.074.453.750,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	568.300.000,00	551.800.000,00	97,10	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	688.500.000,00	667.012.000,00	96,88	262.317.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	313.000.000,00	306.738.000,00	98,00	457.710.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	200.000.000,00	199.606.000,00	99,80	77.895.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	525.900.000,00	487.183.250,00	92,64	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	696.500.000,00	692.982.000,00	99,49	6.700.000,00

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.067.381.000,00	1.061.750.000,00	99,47	827.430.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	560.530.000,00	558.630.000,00	99,66	542.823.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	59.953.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	559.597.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.000.000,00	900.000,00	90,00	592.296.750,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	90.000.000,00	89.072.000,00	98,97	1.328.420.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	475.960.000,00	470.669.000,00	98,89	662.500.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	95.000.000,00	93.767.000,00	98,70	473.650.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	0,00	46.762.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.000.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	40.000.000,00	39.334.000,00	98,34	0,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	240.960.000,00	238.638.000,00	99,04	119.100.000,00
7		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000,00	88.930.000,00	98,81	393.718.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	634.000.000,00	633.300.000,00	99,89	28.765.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	634.000.000,00	633.300.000,00	99,89	52.965.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	36.180.000,00	4.620.000,00	12,77	0,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	14.200.000,00	2.500.000,00	17,61	35.000.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	19.600.000,00	2.120.000,00	10,82	79.046.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	98.406.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00	95.486.000,00
8		Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.380.000,00	0,00	0,00	728.091.621,00
	-	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	0,00	0,00	0,00	106.936.441,00
	-	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	12.943.368.000,00	11.131.219.553,00	86,00	577.560.000,00
	-	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	0,00	0,00	0,00	43.595.180,00
9		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	5.409.753.000,00	4.379.345.053,00	80,95	0,00
	-	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	4.598.500.000,00	4.146.599.500,00	90,17	0,00
	-	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	2.935.115.000,00	2.605.275.000,00	88,76	0,00
	-	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	151.838.897.373,00	142.999.517.816,00	94,18	0,00
10		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	108.727.404.021,00	102.658.357.509,00	94,42	6.790.626.700,00
	-	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.091.551.000,00	1.587.283.999,00	75,89	2.927.400.200,00
	-	Belanja Sosialisasi	7.701.960.000,00	7.448.921.500,00	96,71	1.756.748.500,00
	-	Belanja Bimbingan Teknis	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	2.024.778.000,00
	-	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	81.700.000,00
III		BELANJA PEMELIHARAAN	23.146.140.705,00	21.521.894.729,00	92,98	40.023.255.338,00
1		Belanja Pemeliharaan Tanah	2.620.500.000,00	2.609.230.000,00	99,57	211.264.834,00
	-	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	17.500.000,00	7.500.000,00	42,86	173.939.334,00
	-	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	70.000.000,00	69.980.000,00	99,97	0,00

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	-	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	37.325.500,00
	-	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	2.493.000.000,00	2.491.750.000,00	99,95	0,00
2		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.914.555.468,00	2.549.251.683,00	87,47	2.643.876.582,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	0,00	0,00	66.970.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.955.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	91.401.550,00	83.712.250,00	91,59	8.468.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	420.750.000,00	393.767.314,00	93,59	22.053.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.300.000,00	9.560.000,00	66,85	13.105.350,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	100.000.000,00	97.000.000,00	97,00	174.860.750,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	197.950.000,00	132.479.623,00	66,93	268.680.850,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	49.952.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	343.700.000,00	329.675.500,00	95,92	82.044.300,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.000.000,00	8.991.231,00	99,90	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	517.899.484,00	442.070.907,00	85,36	1.058.854.626,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	124.757.000,00	117.796.000,00	94,42	46.050.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	353.076.234,00	327.133.699,00	92,65	199.818.746,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	122.900.000,00	106.331.717,00	86,52	88.918.400,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	23.149.130,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	1.221.950,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	5.997.750,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	70.000.000,00	55.451.342,00	79,22	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	35.000.000,00	34.507.000,00	98,59	35.116.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	280.244.000,00	229.218.850,00	81,79	213.032.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	50.095.000,00	41.698.850,00	83,24	3.471.850,00
	-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	91.250.000,00	62.240.000,00	68,21	115.149.780,00
	-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	25.250.000,00	23.405.000,00	92,69	7.400.250,00
	-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	20.982.200,00	13.482.400,00	64,26	4.900.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	16.000.000,00	10.750.000,00	67,19	15.706.850,00

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	0,00
3		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.050.485.237,00	15.843.056.046,00	92,92	3.564.880.277,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.406.203.237,00	8.298.699.346,00	88,23	2.024.630.277,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	700.000.000,00	698.090.000,00	99,73	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	195.000.000,00	194.600.000,00	99,79	249.156.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	261.982.000,00	261.946.000,00	99,99	149.900.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	160.000.000,00	158.490.000,00	99,06	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	166.200.000,00	166.200.000,00	100,00	134.090.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	166.200.000,00	166.200.000,00	100,00	134.090.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	15.000.000,00	14.886.300,00	99,24	0,00
	-	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	0,00	0,00	0,00	571.804.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.846.600.000,00	5.846.600.000,00	100,00	40.000.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	114.500.000,00	55.234.400,00	48,24	159.278.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	100.000.000,00	98.750.000,00	98,75	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	60.000.000,00	49.560.000,00	82,60	74.490.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	25.000.000,00	0,00	0,00	
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.690.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00	61.842.000,00
4		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	560.600.000,00	520.357.000,00	92,82	33.587.503.645,00
	-	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	11.388.000.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	586.420.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	353.200.000,00	353.200.000,00	100,00	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	0,00	0,00	0,00	15.704.109.700,00
	-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.748.973.945,00
	-	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	150.000.000,00	149.757.000,00	99,84	160.000.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.730.000,00
	-	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	15.730.000,00
IV		BELANJA PERJALANAN DINAS	42.879.938.842,00	40.496.568.549,00	94,44	30.386.211.000,00
1		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.879.938.842,00	40.496.568.549,00	94,44	30.386.211.000,00
	-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	729.913.491,00	709.433.620,00	97,19	1.121.103.635,00
	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.312.104.398,00	17.167.886.674,00	93,75	13.812.018.192,00
	-	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.705.000,00	27.705.000,00	100,00	144.500.000,00
	-	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.810.215.953,00	22.591.543.255,00	94,88	15.308.589.173,00

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
V	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	8.559.133.750,00	8.240.089.513,00	96,27	5.918.487.150,00	
	1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.415.350.000,00	3.369.893.180,00	98,67	1.446.719.700,00
	-	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	753.750.000,00	738.321.500,00	97,95	382.028.700,00
	-	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	771.600.000,00	741.571.680,00	96,11	494.565.000,00
	-	Belanja Beasiswa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	-	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	110.126.000,00
	-	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	440.000.000,00
	2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.143.783.750,00	4.870.196.333,00	94,68	4.471.767.450,00
	-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.759.553.750,00	4.515.307.833,00	94,87	4.395.617.450,00
	-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	384.230.000,00	354.888.500,00	92,36	76.150.000,00
VI	BELANJA BARANG DAN JASA BOS	68.778.060.843,00	61.282.125.033,56	89,10	62.329.647.672,40	
	1	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.778.060.843,00	61.282.125.033,56	89,10	62.329.647.672,40
	-	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.778.060.843,00	61.282.125.033,56	89,10	62.329.647.672,40
VII	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	35.600.223.550,00	35.687.733.119,00	100,25	29.528.712.994,00	
	1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	35.600.223.550,00	35.687.733.119,00	100,25	29.528.712.994,00
	-	Belanja Barang dan Jasa BLUD	35.600.223.550,00	35.687.733.119,00	100,25	29.528.712.994,00
	-	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.810.215.953,00	22.591.543.255,00	94,88	15.308.589.173,00
Jumlah		486.430.643.513,00	458.571.697.276,56	94,27	393.472.602.462,40	

5.1.2.1.3 Belanja Hibah	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	32.064.985.100,00	31.715.077.500,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Hibah ditetapkan sebesar Rp33.373.092.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.064.985.100,00 atau 96,08% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA. 2021 sebesar Rp31.715.077.500,00, maka realisasi Belanja Hibah TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp349.907.600,00 atau 1,09%. Anggaran dan realisasi belanja hibah pada masing-masing Perangkat Daerah TA. 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.23
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Pada Masing-Masing Perangkat Daerah TA. 2022

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Sekretariat Daerah	4.230.000.000,00	3.770.000.000,00	89,13	2.755.000.000,00
a.	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	2.395.000.000,00	2.395.000.000,00	100,00	
-	Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (Fkub) Kab. Bima	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
-	Lembaga Seni Dan Qasidah Indonesia (Lasqi) Kab. Bima	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
-	Majelis Ulama Indonesia (Mui) Kab. Bima	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
-	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (Lptq) Kab. Bima	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
-	Dewan Dakwah Kab. Bima	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	Dewan Masjid Indonesia (Dmi) Kab. Bima	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
-	Lembaga Pendidikan Soaial Membangun Umat (Lpsmu) Kab. Bima	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Majelis Ta'lim Al -Hidayah Desa Cenggu Kec. Palibelo Kab. Bima	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Taman Pendidikan Al - Qur'an (Tpq) Al - Hanifiah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
-	Pondok Pesantren Al - Wafa	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
-	Majelis Ta'lim An - Nisa Kab. Bima	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (Bkprmi) Kab. Bima	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	SLB Aisyah Sape	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
-	Persaudaraan Muslimah Kabupaten Bima	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi) Kab. Bima	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Badan Amil Zakat Nasional Indonesia (Baznas) Kab. Bima	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
-	Yayasan Islam Bima	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
-	Muhammadiyah Kab. Bima	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
-	Masjid Nurul Tauhid	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
-	Masjid Ponpes Al Azzam	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
-	Masjid Kurma Al - Mabruur	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	Musholla Nurul Bahar	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	Masjid Besar Ar - Rahman	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	Musholla Al - Khairat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	Musholla Al - Barokah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
-	Masjid Nurul Qalbi	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al - Iishlah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
-	Masjid Baitul Makmur	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Baburrahman	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Besar Nurul Hidayah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Musholla Ar-Rayyan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Darunna'im	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Jami Baitul Ikhsan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Ikhlas	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
-	Masjid Jami Al-Ihsan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Musholla Al-Ikhlas	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Baitul Makmur	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Marhamah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Hasanah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Raodhatul Jannah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Hijrah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Baitul Furqan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Mushollah Baiturrahman	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Fatah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Abbar	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Musholla Al-Furqan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Mushollah An-Nur	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Mustaqim	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Musholla Nurul Yaqin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid As-Shalihin	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Masjid Babussalam	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Jami Al-Amin	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Nurul Amal Dsn. Sarae	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Raya Baiturrahim	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Ikhlas	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Raya Asyuhada	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Nurul Yaqin	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Musholla At-Taqwa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Musholla Al-Fatin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Muhtadin	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Mukhlisin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Musholla Al-Isra	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
-	Musholla Riyadhus Sholihin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Nurul Ikhlas	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Faqih	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Nurul Ikhlas	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid H. Muhammad Jafar	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Nurul Yaqin	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Masjid Tua Kamina	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Musholla Usmansyah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Muhajirin	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Masjid Nurul Iman	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Muslimun	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Sabilul Mahmudin	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
-	MASJID AL-FAKHR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Masjid Nurul Fatimah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	Masjid At-Taqwa Loka	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
-	Masjid Al-Muzakar	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
b.	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Sosial Kemasyarakatan Keg. KESSOS	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
-	Legiun Veteran Kab. Bima	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	PWRI Kab. Bima	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
c.	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Sosial Kemasyarakatan Keg. KESMAS	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	100,00	
-	Prog. Vokasi Universitas Mataram (PPD) Bima	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	100,00	
2.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	23.715.040.000,00	23.422.937.000,00	98,77	24.576.850.000,00
-	BOP PAUD & Kesetaraan	19.979.937.000,00	19.979.937.000,00	100,00	
-	Dewan Pendidikan Kab. Bima	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
-	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Bima	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
-	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
-	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
-	Forum Komunikasi Pemuda Peduli Pembangunan (FKP3)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Perkumpulan Masyarakat Pesisir Nusantara (PERMESTA)	10.000.000,00	8.000.000,00	80,00	
-	Forum Karang Taruna Kabupaten Bima	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
-	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bima	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
-	Ikatan mahasiswa Ntonggu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Kesatuan organisasi serbagunan gotong royong	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
-	Taman Baca Sarangge	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
-	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Ikatan Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (PPLH)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Pramuka Kabupaten Bima	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bima (KONI)	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	100,00	
-	Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
-	Persatuan Sepak Raga Seloeroeh Indonesia (PSSI)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	
-	Yayasan Nurul Khalifah Desa Naru Kec Sape	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	Yayasan Pendidikan dan Pesantren Al-Azzam	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	
-	Majelis Adat Kesultanan Bima	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
-	Barisan Pemuda Adat Nusantara	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Sanggar Seni dan Budaya Gong 96 STKIP Bima	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Dewan Perwakilan Mahasiswa STKIP Bima	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
-	Kopa Mbojo	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Mapala Londa STKIP Bima	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
-	Bunda PAUD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Lembaga Pendidikan Anak PAUD KB Cahaya Ibu Desa Woro Kec Madapangga,	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
3.	Dinas Kesehatan	1.855.000.000,00	1.528.996.100,00	82,43	0,00
-	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan.	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
-	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan.	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
-	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan.	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
-	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan.	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
-	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan.	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
-	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan.	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
-	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga	1.580.000.000,00	1.253.996.100,00	79,37	
4.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	259.000.000,00	259.000.000,00	100,00	83.000.000,00
-	Asosiasi wartawan profesional indonesia (AWPI) Bima	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI) Kab. Bima	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
-	Harian Amanat	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
-	Media BAROMETER	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
-	Media FAJAR NEWS	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
-	Media KABAR BIMA	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
-	Media OBOR BIMA	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
-	Media Online KUPAS	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
-	Media RADAR TAMBORA	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
-	Media SEKILAS INFO	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
-	Media Visioner	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Media Bebek Top	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Media Berita 11	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Media Reportase	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Media Sorot NTB	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Media Pena News	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Media Gema NTB	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Media Jangka Bima	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Media Warta Bima	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Media Londa Post	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
-	Sekilas Info	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Obor Bima	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Fajar Media	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Kabar Bima	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bebek Top	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Barometer	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Amanat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Kupas Bima	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Cakrawala	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Berita 11	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
5.	Dinas Pariwisata	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Hibah Mesin, Peralatan Dan Bahan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	83.170.000,00
-	Hibah Uang Kepada Koperasi Nelayan Bintang Nelayan Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Dinas Koperasi,UKM Kabupaten Bima TA. 2022	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	120.000.000,00
-	Dekranasda Kab Bima	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
8.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
a.	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi (kelompok tani)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	Kelompok Tani KAJUJI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Kelompok Tani PERINTIS	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Kelompok Tani SO BALUMBA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Kelompok Tani SO OI KALO	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Kelompok Tani LA RUME	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Kelompok Tani LA MINGGI II	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
-	Kelompok Tani LA DUWE	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Kelompok Tani SO PAJAKAI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Kelompok Tani LA LOMPO	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Kelompok Tani WILAKONGO	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	100,00	717.519.900,00
-	Tim Penggerak PKK Kab. Bima	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
-	Komando Distrik Militer (Kodim) 1608 Bima	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	
-	Apdesi Tingkat Kab. Bima	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	570.000.000,00	570.000.000,00	100,00	310.000.000,00
-	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi (uang)	570.000.000,00	570.000.000,00	100,00	
11.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.000.000,00	0,00	0,00	1.925.477.000,00
12.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.219.052.000,00	1.164.052.000,00	96,31	1.144.060.600,00
a.	Belanja Hibah Partai Politik	794.052.000,00	804.052.000,00	101,26	
-	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	123.063.000,00	123.063.000,00	100,00	
-	Partai Amanat Nasional (PAN)	99.969.000,00	99.969.000,00	100,00	
-	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	86.841.000,00	86.841.000,00	100,00	
-	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	85.527.000,00	85.527.000,00	100,00	
-	Partai Demokrat	70.176.000,00	70.176.000,00	100,00	
-	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	69.789.000,00	69.789.000,00	100,00	
-	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	64.782.000,00	64.782.000,00	100,00	
-	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	62.655.000,00	62.655.000,00	100,00	
-	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	53.469.000,00	53.469.000,00	118,70	
-	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	49.839.000,00	49.839.000,00	100,00	
-	Partai Bulan Bintang (PBB)	27.942.000,00	27.942.000,00	100,00	
b.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi	240.000.000,00	225.000.000,00	93,75	
-	Gerakan Nasional Pengawas Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	40.000.000,00	40.000.000,00	100	
-	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
-	Pesona Bima	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
-	Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Bima	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Pusat Pengkajian dan Pemantauan Perlindungan TKI (PP3TKI) Pulau Sumbawa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	LSM Gembok	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
-	LSM Lainnya	90.000.000,00	75.000.000,00	83,33	
c.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima (BNNK)	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
d.	Belanja Hibah Kepada Lembaga	110.000.000,00	70.000.000,00	63,64	
-	Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
-	Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (POSBKUMADIN)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
-	Lembaga Bantuan Hukum Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah	33.373.092.000,00	32.064.985.100,00	96,08	31.715.077.500,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	16.254.498.500,00	6.764.331.350,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial ditetapkan sebesar Rp16.344.944.250,00 dan terealisasi sebesar Rp16.254.498.500,00 atau 99,45% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2021 sebesar Rp6.764.331.350,00, maka realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp9.490.167.150,00 atau 58,38%. Anggaran dan

realisasi Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing Perangkat Daerah TA. 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.24
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pada Masing-Masing Perangkat Daerah TA. 2022

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Sekretariat Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	250.000.000,00
-	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (mahasiswa tidak mampu)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu (Premi Asuransi Nelayan)	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,00
3.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.568.700.450,00
4.	Dinas Pariwisata	55.000.000,00	25.000.000,00	45,45	0,00
-	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat (Festival LASAKOSA)	55.000.000,00	25.000.000,00	45,45	
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	515.000.000,00
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	21.290.000,00
7.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	53.653.600,00
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) Kab. Bima.	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
10.	Dinas Sosial	2.191.944.250,00	2.131.498.500,00	97,24	492.530.300,00
a.	Bantuan Sosial untuk Bidang Pemberdayaan Sosial	17.500.000,00	17.371.500,00	99,27	
-	Bantuan Sosial Barang Untuk Individu (Janda Veteran)	17.500.000,00	17.371.500,00	99,27	
b.	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Kewirausahaan (kuba)	640.000.000,00	585.000.000,00	91,41	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Tanja I	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE LONDE RIKO	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial Kube FASTPAY	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial MORI SAMA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MITRA USAHA NISA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE BAWANG MERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE KALATE TENGA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MEKAR SEJATI BARALAU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE TARUNA JAYA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE HARAPAN SEJAHTERA NISA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE KARAPU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SALMON	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SINAR BARU NARU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SAMADA ANGI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SINAR BAHAGIA NIPA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SAHABAT MAKMUR	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MENTARI HARAPAN TALABIU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE AMANAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MEKAR SARI TENDE	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE WEKI NDAI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SAKURA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MANDIRI BERSAMA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE HARAPAN BARU TALABIU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE JAYA AGUNG TENDE	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE ANGI NDAI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MERPATI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE TOTI MORI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE HARAPAN JAYA BARALAU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE JAYA DATANG NARU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MANDIRI JUANG TENDE	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE CAMAR	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MEKAR JAYA RABAKODO	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MITRA BAROKAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE HARAPAN INDAH TENTE	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE KASAMA WEKI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE KAMBOJA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE TOTI MORI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE JIA SEJAHTERA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE NARI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE KASAMA WEKI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE KAKAP	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SUMBER HARAPAN	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE TERI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE NILA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE TAWALI JAYA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE GABUS	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE WARKOP NDAI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BERSAMA NISA JAYA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE USAHA MANDIRI NARU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BERSAMA MAWAR	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE LELE	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SINAR MANDIRI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE GURITA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE TONGKOL	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE TOTI MORY	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BERSAMA MECI ANGI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE AN NUR	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SALSABILA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MANDIRI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE BARA KUDA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE USAHA BERSAMA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE CUMI CUMI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE OI CANDI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE CAKALANG	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BERSAMA KEMUNING	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BERSAMA PEMUDA MANDIRI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE KING CHIROX	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BERSAMA MANGGE KEPA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MORI SAMA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE JATI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE USAHA BERSAMA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BERSAMA MEKAR	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE BERSATU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SUMI BERKAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE KARUWU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BERSAMA LEWI TATO	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MORI SAMA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE PANGGU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
-	Bantuan Sosial Uang Untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BERSAMA SEMOGA BERKAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE TUNA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SUKA MAJU II	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE ANGGREK	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BERSAMA SYUKRON	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BERSAMA PERINTIS HARAPAN	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE KELUARGA BERSAMA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE KABUJU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE DUA PUTRI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SUMBER REZEKI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MUJAIR	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE NTUNDU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE BAKULAN BERKAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE PAMUGARAN	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE ANGGREK	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE SUKA MAJU I	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE BINA USAHA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BAKULAN BAROKAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial Kelompok Pemasar Ikan Jaya Bersama	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial Kelompok Sondasia Mengolah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial Kelompok Pengolahan Hasil Ikan TANJA II	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial Kelompok Pengolahan Bandeng MUKU JAYA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial Bawang Goreng Caru Mena	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE KAPI KEU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial Bebek Pancking Az Zahra	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KAROPO BAROKAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE MUJAIR	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial GALERI NISA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE BANDENG	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial MORI SAMA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial PERCETAKAN ANGI NDAI DIGITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial BERKAH SALIMAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK DUNIA BERSAMA TENTE	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial TENUN SUKA MAJU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial BAWANG GORENG MAKMUR	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK KARYA MANDIRI TALABIU	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KUBE DUA PUTRI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial KELOMPOK USAHA BERSAMA MORI SAMA	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
-	Bantuan Sosial Uang untuk Kegiatan Kewirausahaan Sosial Kelompok Pemasaran Hasil Ikan Laja	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
c.	Bantuan Sosial untuk Kube (uang)	560.000.000,00	560.000.000,00	100,00	
-	Kube Semesta Kicau	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Jatinanga Wera	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Bunga Mawar	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Melati	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Oi Mada Seli	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Oi Wontu	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Mori Sama	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Waspada	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Kasabua Nggahi Sp2	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Kacoarida	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Sondo Indah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Bina Baru	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Gembel Republik	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Wadu Nocu	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Sukses Mandiri	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Mandiri	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Sinar Jaya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Terpadu	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Pelita	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Meci Angi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Jenamawar	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Mawar Merah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Nggaro Lembo	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Kamasi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Barokah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
-	Kube Kalate	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Toti Mori	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
-	Kube Melati	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
d.	Bantuan Sosial untuk Lembaga (uang)	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	
-	Lksa Lpepm Bima - NTB	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
-	Yayasan Mechi Angi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
-	LKSA LPEPM Bima - NTB	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
-	Yayasan Mechi Angi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
e.	Bantuan Sosial untuk Bidang Rehabilitasi Sosial dan Fakir Miskin	778.444.250,00	789.127.000,00	101,37	
-	Bantuan Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial (Penyandang Disabilitas)	98.000.000,00	97.668.000,00	99,66	
-	Bantuan sosial Sembako untuk LKS Penyandang Disabilitas	44.748.000,00	44.635.300,00	99,75	
-	Bantuan Sosial Kepada Individu bagi Penyandang Disabilitas	135.168.750,00	134.998.000,00	99,87	
-	Bantuan Sosial Kepada individu bagi Lanjut Usia (sembako)	101.500.000,00	97.707.750,00	96,26	
-	Bantuan Sosial Kepada individu bagi Lanjut Usia (sembako)	72.477.000,00	72.335.900,00	99,81	
-	bantuan sosial kepada individu bagi anak terlantar diluar LKS (UEP Kambing)	25.500.000,00	25.440.000,00	99,76	
-	bantuan sosial kepada individu bagi anak terlantar diluar LKS (UEP Kambing)	198.000.000,00	197.795.000,00	99,90	
-	bantuan sosial kepada individu bagi anak terlantar didalam LKSA (Peralatan Sekolah)	19.500.000,00	19.437.200,00	99,68	
-	bantuan sosial kepada kelompok anak nakal (perbengkelan)	15.000.000,00	14.945.000,00	99,63	
-	Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Reabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	38.836.250,00	38.777.850,00	99,85	
-	Bantuan Sosial untuk Eks Kusta	29.714.250,00	29.637.000,00	99,74	
-	Bantuan uang untuk Orang Terlantar	0,00	13.250.000,00	0,00	
-	Bantuan uang untuk Orang Terlantar	0,00	1.500.000,00	0,00	
-	Bantuan uang untuk Orang Terlantar	0,00	1.000.000,00	0,00	
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.685.000.000,00	13.685.000.000,00	100,00	3.175.200.000,00
-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	13.685.000.000,00	13.685.000.000,00		
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	397.957.000,00
	Jumlah	16.344.944.250,00	16.254.498.500,00	99,45	6.764.331.350,00

5.1.2.2 BELANJA MODAL	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	246.039.191.263,00	261.575.868.883,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp252.990.748.734,00 dan terealisasi sebesar Rp246.039.191.263,00 atau 97,25% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA. 2022 sebesar Rp261.575.868.883,00, maka realisasi Belanja Modal TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp15.536.677.620,00 atau 5,94%. Anggaran dan realisasi

Belanja Modal TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Modal Tanah	3.915.682.975,00	3.226.152.975,00	82,39	9.029.972.745,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.007.608.606,00	74.233.412.208,00	96,40	76.612.973.881,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.979.778.047,00	65.996.875.279,00	98,53	119.582.091.453,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.500.658.754,00	101.563.736.869,00	98,13	56.014.878.804,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.587.020.352,00	1.019.013.932,00	64,21	335.952.000,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		252.990.748.734,00	246.039.191.263,00	97,25	261.575.868.883,00

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bima dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bima merupakan Perangkat Daerah yang baru terbentuk per 1 Januari 2022, sehingga untuk realisasi Belanja Modal TA. 2021 masih tercatat pada Perangkat Daerah Induk sebelumnya. Dimana realisasi Belanja Modal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bima TA. 2021 tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima, sementara realisasi Belanja Modal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bima TA. 2021 tercatat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima. Penjelasan atas rincian Belanja Modal TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

		2022	2021
5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	(Rp)	(Rp)
		3.226.152.975,00	9.029.972.745,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Modal Tanah ditetapkan sebesar Rp3.915.682.975,00 dan terealisasi sebesar Rp3.226.152.975,00 atau 82,39% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2022 sebesar Rp9.029.972.745,00, maka realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.803.819.770,00 atau 64,27%. Belanja Modal Tanah tersebut merupakan Belanja Modal Tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima TA. 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.26
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima					
I	BELANJA MODAL TANAH	3.915.682.975,00	3.226.152.975,00	82,39	
1	Belanja Modal Tanah Persil	2.129.782.975,00	1.868.282.975,00	87,72	
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	650.000.000,00	538.500.000,00	82,85	
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.479.782.975,00	1.329.782.975,00	89,86	
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	36.750.000,00	36.750.000,00	100,00	
	- Belanja Modal Tanah Basah	36.750.000,00	36.750.000,00	100,00	
3	Belanja Modal Lapangan	1.749.150.000,00	1.321.120.000,00	75,53	
	- Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	1.270.900.000,00	892.400.000,00	70,22	
	- Belanja Modal Tanah untuk Jalan	478.250.000,00	428.720.000,00	89,64	
2). Sekretariat Daerah Kabupaten Bima					
	Jumlah	3.915.682.975,00	3.226.152.975,00	82,39	9.029.972.745,00

	2022	2021
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	(Rp)	(Rp)
	74.233.412.208,00	76.612.973.881,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditetapkan sebesar Rp77.007.608.606,00 dan terealisasi sebesar Rp74.233.412.208,00 atau 96,40% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2021 sebesar Rp76.612.973.881,00, maka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.379.561.673,00 atau 3,21%. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing Perangkat Daerah TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pada Masing-Masing Perangkat Daerah TA. 2022

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Sekretariat Daerah	4.603.103.214,00	4.544.950.744,00	98,74	2.329.707.100,00
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	375.800.000,00	372.559.500,00	99,14	230.303.500,00
3.	Inspektorat	102.750.000,00	88.500.000,00	86,13	36.303.000,00
4.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	14.398.098.274,00	15.150.840.975,00	105,23	15.024.012.973,00
5.	Dinas Kesehatan	23.342.727.634,00	20.852.352.931,00	89,33	17.197.015.913,00
6.	Dinas Sosial	11.802.000,00	11.802.000,00	100,00	33.607.250,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	123.504.668,00	123.493.000,00	99,99	116.250.000,00
8.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	114.974.000,00	114.966.000,00	99,99	117.609.000,00

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
9.	Dinas Perhubungan	1.652.398.414,00	1.569.538.414,00	94,99	5.190.212.537,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	105.226.510,00	104.717.400,00	99,52	666.960.000,00
11.	Dinas Pariwisata	128.552.750,00	103.474.750,00	80,49	46.930.000,00
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.014.105.000,00	1.006.715.000,00	99,27	36.673.000,00
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	313.991.232,00	312.322.000,00	99,47	140.773.920,00
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	51.600.000,00	51.600.000,00	100,00	2.500.000,00
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	66.622.500,00	64.309.000,00	96,53	79.236.000,00
16.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.538.209.366,00	1.310.880.786,00	85,22	226.809.000,00
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	208.757.708,00	208.051.000,00	99,66	16.000.000,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup	1.372.900.000,00	1.365.640.000,00	99,47	2.475.000,00
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	163.378.003,00	156.212.000,00	95,61	45.823.000,00
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	749.380.000,00	693.091.000,00	92,49	1.028.444.500,00
21.	Dinas Ketahanan Pangan	70.537.500,00	69.885.000,00	99,07	0,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	91.128.000,00	90.650.000,00	99,48	81.154.000,00
23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	222.742.000,00	221.821.000,00	99,59	0,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	13.513.500,00	12.651.000,00	93,62	9.000.000,00
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	494.587.000,00	494.043.000,00	99,89	27.214.000,00
26.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	419.949.690,00	418.239.690,00	99,59	113.385.000,00
27.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	192.691.594,00	190.562.000,00	98,89	324.191.750,00
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	303.985.500,00	300.620.000,00	98,89	473.819.735,00
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.059.294,00	89.814.000,00	97,56	179.845.000,00
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60.946.700,00	56.439.000,00	92,60	
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	23.864.829.825,00	23.356.763.018,00	97,87	32.511.005.203,00
32.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	161.000.000,00	157.654.000,00	97,92	0,00
33.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	370.702.230,00	364.254.000,00	98,26	0,00
34.	Kecamatan	211.054.500,00	204.000.000,00	96,66	325.713.500,00
Jumlah		77.007.608.606,00	74.233.412.208,00	96,40	76.612.973.881,00

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut di atas dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.28
Rincian Anggaran dan Realisasi Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I		371.720.000,00	351.935.000,00	94,68	70.730.000,00
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	342.000.000,00	322.900.000,00	94,42	70.730.000,00
-	Belanja Modal Tractor	174.000.000,00	170.400.000,00	97,93	0,00
-	Belanja Modal Mesin Proses	168.000.000,00	152.500.000,00	90,77	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	29.720.000,00	29.720.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Modal Pompa	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	320.000,00	320.000,00	100,00	70.730.000,00
II		6.133.185.253,00	5.844.463.994,00	95,29	9.872.687.437,00
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.133.185.253,00	4.854.963.994,00	94,58	5.884.401.900,00
-	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	333.220.000,00	333.200.000,00	99,99	0,00
-	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.542.000.000,00	2.526.424.994,00	99,39	0,00
-	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	815.000.000,00	739.200.000,00	90,70	834.864.000,00
-	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	859.435.253,00	798.639.000,00	92,93	185.949.700,00
-	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	583.530.000,00	457.500.000,00	78,40	4.863.588.200,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.000.000.000,00	989.500.000,00	98,95	3.988.285.537,00

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	-	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	1.000.000.000,00	989.500.000,00	98,95	3.988.285.537,00
III		BELANJA MODAL ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	376.325.000,00	375.600.000,00	99,81	10.000.000,00
1		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	10.000.000,00
	-	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	10.000.000,00
2		Belanja Modal Alat Ukur	370.525.000,00	369.800.000,00	99,80	0,00
	-	Belanja Modal Alat Ukur Universal	370.525.000,00	369.800.000,00	99,80	0,00
IV		BELANJA MODAL ALAT PERTANIAN	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
1		Belanja Modal Alat Pengolahan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
	-	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
V		BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	7.269.789.884,00	6.636.975.625,00	91,30	4.218.356.404,00
1		Belanja Modal Alat Kantor	1.212.322.972,00	1.018.559.900,00	84,02	1.722.475.000,00
	-	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	24.953.000,00	99,81	24.513.000,00
	-	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.187.322.972,00	993.606.900,00	83,68	1.697.962.000,00
2		Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.022.226.912,00	5.583.328.725,00	92,71	2.462.601.404,00
	-	Belanja Modal Mebel	5.130.581.250,00	4.811.540.250,00	93,78	1.896.105.690,00
	-	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
	-	Belanja Modal Alat Pembersih	30.000.000,00	25.000.000,00	83,33	9.200.000,00
	-	Belanja Modal Alat Pendingin	644.110.912,00	564.524.500,00	87,64	407.013.964,00
	-	Belanja Modal Alat Dapur	31.618.750,00	10.780.175,00	34,09	21.518.750,00
	-	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	121.416.000,00	107.154.800,00	88,25	79.263.000,00
	-	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	63.800.000,00	63.629.000,00	99,73	49.500.000,00
3		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	35.240.000,00	35.087.000,00	99,57	33.280.000,00
	-	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	13.500.000,00
	-	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.000.000,00	4.877.000,00	97,54	10.000.000,00
	-	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.440.000,00	10.440.000,00	100,00	9.780.000,00
	-	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	14.800.000,00	14.770.000,00	99,80	0,00
VI		BELANJA MODAL ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR	262.056.000,00	257.883.000,00	98,41	480.320.500,00
1		Belanja Modal Alat Studio	210.731.000,00	206.561.000,00	98,02	480.320.500,00
	-	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	59.431.000,00	59.289.000,00	99,76	96.740.500,00
	-	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	0,00
	-	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	143.600.000,00	139.572.000,00	97,19	383.580.000,00
2		Belanja Modal Alat Komunikasi	51.325.000,00	51.322.000,00	99,99	0,00
	-	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	51.325.000,00	51.322.000,00	99,99	0,00
VII		BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	35.732.276.110,00	33.969.475.178,00	95,07	42.262.248.267,00
1		Belanja Modal Alat Kedokteran	200.750.000,00	10.000.000,00	4,98	28.731.023.235,00
	-	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	100.250.000,00	0,00	0,00	62.690.000,00
	-	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	100.500.000,00	10.000.000,00	9,95	20.000.000,00
	-	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.648.333.235,00
2		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	35.531.526.110,00	33.959.475.178,00	95,58	13.531.225.032,00
	-	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	35.531.526.110,00	33.959.475.178,00	95,58	13.531.225.032,00
VIII		BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM	10.595.162.000,00	10.515.144.099,00	99,24	8.153.515.000,00
1		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	68.237.000,00	67.496.000,00	98,91	0,00
	-	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	68.237.000,00	67.496.000,00	98,91	0,00
2		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	8.419.250.000,00	8.400.413.099,00	99,78	8.129.065.000,00
	-	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	233.550.000,00	231.750.000,00	99,23	84.600.000,00
	-	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	150.000.000,00	149.620.000,00	99,75	0,00
	-	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	795.700.000,00	779.700.000,00	97,99	149.615.000,00

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	-	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	7.240.000.000,00	7.239.343.099,00	99,99	7.894.850.000,00
3		Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
4		Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	731.675.000,00	678.950.000,00	92,79	19.950.000,00
	-	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja	731.675.000,00	678.950.000,00	92,79	19.950.000,00
5		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.365.000.000,00	1.357.740.000,00	99,47	0,00
	-	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.365.000.000,00	1.357.740.000,00	99,47	0,00
6		Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	11.000.000,00	10.545.000,00	95,86	0,00
	-	Belanja Modal Photo and Film Equipment	11.000.000,00	10.545.000,00	95,86	0,00
IX		BELANJA MODAL KOMPUTER	6.539.164.415,00	6.189.657.219,00	94,66	11.085.613.273,00
1		Belanja Modal Komputer Unit	6.217.026.024,00	5.904.267.924,00	94,97	3.444.633.271,00
	-	Belanja Modal Komputer Jaringan	911.520.040,00	905.866.750,00	99,38	974.528.000,00
	-	Belanja Modal Personal Computer	4.445.485.984,00	4.187.583.524,00	94,20	2.243.864.051,00
	-	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	860.020.000,00	810.817.650,00	94,28	226.241.220,00
2		Belanja Modal Peralatan Komputer	322.138.391,00	285.389.295,00	88,59	7.640.980.002,00
	-	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	184.539.391,00	165.409.295,00	89,63	101.802.150,00
	-	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	4.835.495.741,00
	-	Belanja Modal Peralatan Jaringan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	239.250.000,00
	-	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	87.099.000,00	69.480.000,00	79,77	2.464.432.111,00
X	1	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	99.605.000,00
		Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	99.605.000,00
		Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	99.605.000,00
XI		BELANJA MODAL ALAT KESELAMATAN KERJA	66.000.000,00	63.649.500,00	96,44	0,00
1		Belanja Modal Alat Deteksi	50.000.000,00	47.699.500,00	95,40	0,00
	-	Belanja Modal Radiasi	50.000.000,00	47.699.500,00	95,40	0,00
2		Belanja Modal Alat Pelindung	16.000.000,00	15.950.000,00	99,69	0,00
	-	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	16.000.000,00	15.950.000,00	99,69	0,00
XII		BELANJA MODAL RAMBU-RAMBU	347.400.000,00	324.415.000,00	93,38	359.898.000,00
1		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	347.400.000,00	324.415.000,00	93,38	359.898.000,00
	-	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	47.400.000,00	24.975.000,00	52,69	46.970.000,00
	-	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	300.000.000,00	299.440.000,00	99,81	312.928.000,00
XII		BELANJA MODAL PERALATAN OLAHRAGA	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	0,00
1		Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	0,00
	-	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	0,00
XIII		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BOS	3.072.429.944,00	3.837.150.626,00	124,89	0,00
1		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.072.429.944,00	3.837.150.626,00	124,89	0,00
	-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.072.429.944,00	3.837.150.626,00	124,89	0,00
XIV		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD	6.213.000.000,00	5.837.962.967,00	93,96	0,00
1		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.213.000.000,00	5.837.962.967,00	93,96	0,00
	-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.213.000.000,00	5.837.962.967,00	93,96	0,00
Jumlah			77.007.608.606,00	74.233.412.208,00	96,40	76.612.973.881,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	65.996.875.279,00	119.582.091.453,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan ditetapkan sebesar Rp66.979.778.047,00 dan terealisasi sebesar Rp65.996.875.279,00 atau 98,53% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2021 sebesar Rp119.582.091.453,00, maka realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp53.585.216.174,00 atau 44,81%. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.29
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Pada Masing-Masing Perangkat Daerah TA. 2022

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Sekretariat Daerah	600.000.000,00	596.881.000,00	99,48	1.314.279.000,00
2.	Inspektorat	150.000.000,00	149.280.000,00	99,52	
3.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	28.127.659.500,00	27.936.644.190,00	99,32	27.429.501.453,00
4.	Dinas Kesehatan	3.911.837.880,00	3.854.957.900,00	98,55	8.839.620.000,00
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00	0,00	148.532.000,00
6.	Dinas Perhubungan	1.634.000.000,00	1.235.144.022,00	75,59	0,00
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.858.300.000,00	6.834.956.000,00	99,66	0,00
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	614.470.000,00	606.720.000,00	98,74	48.368.371.000,00
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	679.400.000,00	673.830.000,00	99,18	890.470.000,00
10.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	200.000.000,00	199.400.000,00	99,70	299.673.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00	493.872.000,00	98,77	
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	775.000.000,00	771.627.000,00	99,56	437.020.000,00
13.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	955.000.000,00	954.400.000,00	99,94	0,00
14.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100.000.000,00	98.781.000,00	98,78	0,00
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000,00	29.765.000,00	99,22	0,00
16.	Rumah Sakit Umum Daerah	21.644.110.667,00	21.560.617.167,00	99,61	23.418.229.000,00
17.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	28.446.000,00
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	8.357.950.000,00
19.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Jumlah		66.979.778.047,00	65.996.875.279,00	98,53	119.582.091.453,00

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di atas dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.30
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
I		BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG	51.251.840.167,00	50.288.058.212,00	98,12	119.582.091.453,00
	1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.901.840.167,00	50.088.264.212,00	98,40	116.877.809.453,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.762.500.000,00	2.360.551.022,00	85,45	116.877.809.453,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gudang	300.000.000,00	298.040.000,00	99,35	1.404.966.000,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	7.507.750.500,00	7.405.177.501,00	98,63	8.425.950.000,00
	-	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	9.572.110.667,00	9.504.620.000,00	99,29	0,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.350.000.000,00	1.279.256.000,00	94,76	31.857.849.000,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	999.400.000,00	998.800.000,00	99,94	43.118.607.000,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	22.754.909.000,00	22.623.440.689,00	99,42	697.883.000,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	379.400.000,00	377.130.000,00	99,40	27.429.501.453,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	662.500.000,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50	0,00
	-	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.875.000.000,00	1.866.573.000,00	99,55	0,00
	-	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	855.000.000,00	854.600.000,00	99,95	826.350.000,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	12.970.000,00	12.970.000,00	100,00	0
	-	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	80.000.000,00	79.850.000,00	99,81	34.970.000,00
	-	Belanja Modal Bangunan Parkir	520.000.000,00	517.584.000,00	99,54	0,00
	-	Belanja Modal Taman	1.692.800.000,00	1.670.672.000,00	98,69	28.446.000,00
	2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	350.000.000,00	199.794.000,00	57,08	0,00
	-	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200.000.000,00	199.794.000,00	99,90	0,00
II		BELANJA MODAL MONUMEN	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
	1	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
	-	Belanja Modal Tugu	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
III		BELANJA MODAL TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3.554.437.880,00	3.551.699.900,00	99,92	2.704.282.000,00
	1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.554.437.880,00	3.551.699.900,00	99,92	2.704.282.000,00
	-	Belanja Modal Pagar	3.554.437.880,00	3.551.699.900,00	99,92	2.704.282.000,00
IV		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD	12.172.000.000,00	12.155.617.167,00	99,87	0,00
	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.172.000.000,00	12.155.617.167,00	99,87	0,00
	-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.172.000.000,00	12.155.617.167,00	99,87	0,00
		Jumlah	66.979.778.047,00	65.996.875.279,00	98,53	119.582.091.453,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	101.563.736.869,00	56.014.878.804,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ditetapkan sebesar Rp103.500.658.754,00 dan terealisasi sebesar Rp101.563.736.869,00 atau 98,13% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2021 sebesar Rp56.014.878.804,00, maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp45.548.858.065,00 atau 44,85%. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.31
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pada Masing-Masing Perangkat Daerah TA. 2022

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	148.874.000,00	99,25	0,00
2.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	189.900.000,00
3.	Dinas Kesehatan	1.400.000.000,00	1.396.650.000,00	99,76	190.000.000,00
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.000.000,00	149.000.000,00	99,33	148.463.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88.913.158.754,00	87.010.792.869,00	97,86	39.257.502.000,00
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.737.500.000,00	12.708.720.000,00	99,77	14.074.157.904,00
7.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	97.850.000,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000,00	149.700.000,00	99,80	197.600.000,00
9.	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	99,25	1.859.405.900,00
Jumlah		103.500.658.754,00	101.563.736.869,00	98,13	56.014.878.804,00

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut di atas dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.32
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA. 2022

t	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I	BELANJA MODAL JALAN DAN JEMBATAN	74.075.203.404,00	72.639.977.869,00	98,06	45.744.002.000,00
1	Belanja Modal Jalan	71.819.194.935,00	70.465.224.000,00	98,11	42.883.402.000,00
	- Belanja Modal Jalan Kabupaten	46.738.071.935,00	45.519.366.000,00	97,39	16.425.500.000,00
	- Belanja Modal Jalan Desa	25.081.123.000,00	24.945.858.000,00	99,46	26.268.002.000,00
	- Belanja Modal Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	189.900.000,00
2	Belanja Modal Jembatan	2.256.008.469,00	2.174.753.869,00	96,40	2.860.600.000,00
	- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.106.008.469,00	2.025.879.869,00	96,20	0,00
	- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	2.860.600.000,00
	- Belanja Modal Jembatan Lainnya	150.000.000,00	148.874.000,00	99,25	0,00
II	BELANJA MODAL BANGUNAN AIR	21.181.855.350,00	20.967.184.000,00	98,99	1.680.050.000,00
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	17.882.795.350,00	17.669.324.000,00	98,81	1.178.750.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	868.275.000,00	868.275.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	17.014.520.350,00	16.801.049.000,00	98,75	0,00
	- Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	0,00	0,00	0,00	97.850.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.080.900.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.299.060.000,00	3.297.860.000,00	99,96	446.600.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	2.799.060.000,00	2.798.560.000,00	99,98	0,00
	- Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90	0,00
	- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	300.000.000,00	299.500.000,00	99,83	446.600.000,00

t	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	-	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0.00	0.00	0.00	150.000.000,00
	-	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	0.00	0.00	0.00	150.000.000,00
III		BELANJA MODAL INSTALASI	1.400.000.000,00	1.396.650.000,00	99,76	1.899.405.900,00
	1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.400.000.000,00	1.396.650.000,00	99,76	40.000.000,00
	-	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.400.000.000,00	1.396.650.000,00	99,76	40.000.000,00
	-	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0.00	0.00	0.00	1.859.405.900,00
	-	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0.00	0.00	0.00	1.859.405.900,00
IV		BELANJA MODAL JARINGAN	6.843.600.000,00	6.559.925.000,00	95,85	6.691.420.904,00
	1	Belanja Modal Jaringan Air Minum	6.803.600.000,00	6.519.925.000,00	95,83	6.541.420.904,00
	-	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	6.803.600.000,00	6.519.925.000,00	95,83	6.541.420.904,00
	2	Belanja Modal Jaringan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0.00
	-	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0.00
	-	Belanja Modal Jaringan Telepon	0.00	0.00	0.00	150.000.000,00
	-	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	0.00	0.00	0.00	150.000.000,00
		Jumlah	103.500.658.754,00	101.563.736.869,00	98,13	56.014.878.804,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	1.019.013.932,00	335.952.000,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ditetapkan sebesar Rp1.587.020.352,00 dan terealisasi sebesar Rp1.019.013.932,00 atau 64,21% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2021 sebesar Rp335.952.000,00, maka realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp683.061.932,00 atau 67,03%. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.33
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Pada Masing-Masing Perangkat Daerah TA. 2022

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Sekretariat Daerah	140.000.000,00	139.875.000,00	99,91	0,00
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.000.000,00	3.996.000,00	99,90	0,00
3.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.015.709.532,00	475.784.932,00	46,84	148.250.000,00
4.	D4nas Kesehatan	40.000.000,00	17.500.000,00	43,75	0,00
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00			7.000.000,00
6.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.800.000,00	24.800.000,00	100,00	0,00
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
9.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	110.850.500,00	109.202.000,00	98,51	47.582.000,00

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.660.320,00	27.536.000,00	99,55	0,00
11	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	5.500.000,00	4.862.000,00	88,40	5.300.000,00
12.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.000.000,00	7.992.000,00	99,90	127.820.000,00
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65.000.000,00	64.100.000,00	98,62	0,00
14.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	124.000.000,00	121.866.000,00	98,28	0,00
15.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah		1.587.020.352,00	1.019.013.932,00	64,21	335.952.000,00

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut di atas dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.34
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I	BELANJA MODAL BAHAN PERPUSTAKAAN	456.310.820,00	430.309.000,00	94,30	335.952.000,00
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	456.310.820,00	430.309.000,00	94,30	59.882.000,00
-	Belanja Modal Audio Visual	456.310.820,00	430.309.000,00	94,30	59.882.000,00
II	BELANJA MODAL BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	42.500.000,00	42.457.500,00	99,90	148.250.000,00
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	42.500.000,00	42.457.500,00	99,90	148.250.000,00
-	Belanja Modal Alat Musik	42.500.000,00	42.457.500,00	99,90	0,00
-	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00		148.250.000,00
III	BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD	120.000.000,00	117.920.000,00	98,27	127.820.000,00
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	120.000.000,00	117.920.000,00	98,27	127.820.000,00
-	Belanja Modal Software	120.000.000,00	117.920.000,00	98,27	127.820.000,00
IV	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA BOS	968.209.532,00	428.327.432,00	44,24	0,00
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	968.209.532,00	428.327.432,00	44,24	0,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	968.209.532,00	428.327.432,00	44,24	0,00
Jumlah		1.587.020.352,00	1.019.013.932,00	64,21	335.952.000,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, tidak ada alokasi anggaran untuk Belanja Modal Aset Lainnya.

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	11.534.643.536,00	27.864.429.306,00

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Tidak Terduga ditetapkan sebesar Rp12.933.969.700,00 dan terealisasi sebesar Rp11.534.643.536,00 atau 89,18% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga TA. 2021 sebesar Rp27.864.429.306,00, maka realisasi Belanja Tidak Terduga TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp16.329.785.770,00 atau 58,60%. Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.35
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.933.969.700,00	11.534.643.536,00	89,18	27.864.429.306,00
1	Belanja Tidak Terduga	12.933.969.700,00	11.534.643.536,00	89,18	27.864.429.306,00
-	Belanja Tidak Terduga	12.933.969.700,00	11.534.643.536,00	89,18	27.864.429.306,00
	Jumlah	12.933.969.700,00	11.534.643.536,00	89,18	27.864.429.306,00

Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga tersebut di atas dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.36
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA. 2022

No.	TA. 2022		TA. 2021	
	Uraian	Realisasi (Rp)	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dalam rangka pemberian ganti rugi tanaman jagung tanah relokasi korban banjir di Desa Tambe Kec. Bolo pada Dinas Perkim Tahun Anggaran 2022	67.944.250,00	Belanja Tidak Terduga (BTT) Reguler	3.581.086.250,00
2.	Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Normalisasi dan Penguatan Tebing Desa Waworada Kecamatan Langgudu Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun Anggaran 2022	26.000.000,00	Belanja Tidak Terduga (BTT) Hasil <i>Refocussing</i> Untuk Penanganan Covid-19	24.283.343.056,00
3.	Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat pekerjaan pembangunan jembatan darurat Tangga Baru di Desa Tangga Baru Kec. Monta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022	73.900.000,00	-	-
4.	Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Vaksinasi Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bima T.A 2022	1.150.000.000,00	-	-
5.	Belanja Tidak Terduga untuk percepatan vaksinasi Covid 19 pada Dinas Kesehatan Kab. Bima Tahun - Anggaran 2022	3.853.730.000,00	-	-

No.	TA. 2022		TA. 2021	
	Uraian	Realisasi (Rp)	Uraian	Realisasi (Rp)
6.	Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Darurat Penanganan Bencana Sosial Kebakaran di Desa Renda pada Dinas Sosial Kab. Bima Tahun Anggaran 2022	90.000.000,00	-	-
7.	Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Darurat Penanganan Bencana Sosial Kebakaran di Desa Renda Kec. Belo pada BPBD Kab. Bima Tahun Anggaran 2022	100.000.000,00	-	-
8.	Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat rehabilitasi jalan akibat bencana banjir desa Campa Kec.Madapangga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun Anggaran 2022	100.000.000,00	-	-
9.	Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Bencana Kebakaran yang berada di 6 Kecamatan dengan jumlah 9 desa di Wilayah Kabupaten Bima pada bagian Kesra An. Sahrudin Tahun Anggaran 2022	720.000.000,00	-	-
10.	Belanja Tidak Terduga untuk Biaya Transport Penjemputan 6 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Dinas DP3AP2KB Kab. Bima Tahun Anggaran 2022	27.000.000,00	-	-
11.	Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Vaksinasi Covid 19 pada Dinas Kesehatan Kab. Bima Tahun Anggaran 2022	4.037.740.000,00	-	-
12.	Belanja Tidak Terduga untuk Pembayaran Insentif Nakes Pelayanan Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022	656.714.286,00	-	-
13.	Belanja Tidak Terduga untuk percepatan vaksinasi Covid 19 (Pemusnahan Limbah Covid-19) pada Dinas Kesehatan Kab. Bima Tahun Anggaran 2022	51.175.000,00	-	-
14.	Belanja Tidak Terduga untuk Insentif vaksinasi Covid 19 pada Dinas Kesehatan Kab. Bima Tahun Anggaran 2022	250.000.000,00	-	-
15.	Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Pembokoran Rumah Penerima Manfaat Relokasi RUSUS di Desa Tambe yang berada di Bantaran Sungai pada Dinas Perkim Kab. Bima Tahun Anggaran 2022	180.440.000,00	-	-
16.	Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Bencana Alam pasca banjir bandang di desa Mangge Kec. Lambu pada BPBD Kab. Bima Tahun Anggaran 2022	150.000.000,00	-	-
Jumlah		11.534.643.536,00	-	27.864.429.306,00

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	285.345.706.455,00	288.871.544.698,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Transfer ditetapkan sebesar Rp286.598.833.396,00 dan terealisasi sebesar Rp285.345.706.455,00 atau 99,56% dari pagu anggaran yang

ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer TA. 2021 sebesar Rp288.871.544.698,00, maka realisasi Belanja Transfer TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.272.711.302,00 atau 0,79%. Anggaran dan realisasi Belanja TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.37
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA. 2022

No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Bagi Hasil	5.010.362.950,00	3.752.265.309,00	74,89	3.318.427.272,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	281.588.470.446,00	281.593.441.146,00	100,00	285.553.117.426,00
Jumlah		286.598.833.396,00	285.345.706.455,00	99,56	288.871.544.698,00

Penjelasan atas Belanja Transfer TA. 2022 diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
		3.752.265.309,00	3.318.427.272,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Bagi Hasil ditetapkan sebesar Rp5.010.362.950,00 dan terealisasi sebesar Rp3.752.265.309,00 atau 74,89% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil TA. 2021 sebesar Rp3.318.427.272,00, maka realisasi Belanja Bagi Hasil TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp433.838.037,00 atau 11,56%. Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil TA. 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.38
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA	5.010.362.950,00	3.752.265.309,00	74,89	3.318.427.272,00
	1	5.010.362.950,00	3.752.265.309,00	74,89	3.318.427.272,00
	-	5.010.362.950,00	3.752.265.309,00	74,89	3.318.427.272,00
Jumlah		5.010.362.950,00	3.752.265.309,00	74,89	3.318.427.272,00

5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
		281.593.441.146,00	285.553.117.426,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan sebesar Rp281.588.470.446,00 dan terealisasi sebesar Rp281.593.441.146,00 atau 100,00% dari pagu anggaran

yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA. 2021 sebesar Rp285.553.117.426,00, maka realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.959.676.280,00 atau 1,39%. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA. 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.39
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I	BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA	281.588.470.446,00	281.593.441.146,00	100,00	285.553.117.426,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	280.588.470.446,00	280.593.441.146,00	100,00	285.553.117.426,00
-	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	280.588.470.446,00	280.593.441.146,00	100,00	285.553.117.426,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
-	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		281.588.470.446,00	281.593.441.146,00	100,00	285.553.117.426,00

Pagu anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan yang tercatat merupakan akumulasi Belanja Bantuan Keuangan pada 191 (seratus sembilan puluh satu) Desa yang ada di wilayah Kabupaten Bima.

5.1.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus dari selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan	58.394.893.416,52	39.561.428.761,02

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp59.099.893.422,00 dan terealisasi sebesar Rp58.394.893.416,52 atau 98,81% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi TA. 2021 Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp39.561.428.761,02, maka realisasi Penerimaan Pembiayaan TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp19.538.464.660,98 atau 33,06%. Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.40
Rincian Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Realisasi 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	58.349.893.422,00	58.349.893.422,52	100,00	39.104.262.080,02
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	750.000.000,00	44.999.994,00	6,00	457.166.681,00
Jumlah		59.099.893.422,00	58.394.893.416,52	98,81	39.561.428.761,02

Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan tersebut di atas dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.41
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58.349.893.422,00	58.349.893.422,52	100,00	39.104.262.080,02
1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	58.349.893.422,00	58.349.893.422,52	100,00	39.104.262.080,02
-	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	58.349.893.422,00	58.349.893.422,52	100,00	39.104.262.080,02
II	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	750.000.000,00	44.999.994,00	6,00	457.166.681,00
1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	750.000.000,00	44.999.994,00	6,00	457.166.681,00
-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	750.000.000,00	44.999.994,00	6,00	457.166.681,00
Jumlah		59.099.893.422,00			39.561.428.761,02

Penjelasan terhadap rincian Penerimaan Pembiayaan TA. 2022 adalah sebagai berikut :

5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	58.349.893.422,52	39.104.262.080,02

Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penggunaan SiLPA tahun lalu dengan realisasi SiLPA TA. 2022 sebesar Rp58.349.893.422,52 dan SiLPA TA. 2021 sebesar Rp39.104.262.080,02, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.42
Rincian SiLPA

No.	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah/BUD	22.195.448.394,25	18.504.369.847,62
2.	Kas di Bendahara BLUD (RSUD)	29.854.814.441,38	10.276.960.909,11
3.	Kas di Bendahara JKN	5.956.356.411,00	9.958.150.502,00
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa UUDP	0,00	0,00
5.	Kas di Bendahara BOS	343.274.175,89	364.780.821,29
Jumlah		58.349.893.422,52	39.104.262.080,02

5.1.3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
		44.999.994,00	457.166.681,00

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah TA. 2022 sebesar Rp44.999.994,00 dan TA. 2021 sebesar Rp457.166.681,00 merupakan pengembalian pokok dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima.

5.1.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
		4.200.000.000,00	0,00

Berdasarkan APBD-P Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, bahwa pagu anggaran Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp4.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.200.000.000,00 atau 91,30% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Sementara pada TA. 2021 tidak ada alokasi anggaran untuk Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengeluaran Pembiayaan tersebut dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.43
Rincian Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	TA. 2022			Realisasi TA. 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I	PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	4.600.000.000,00	4.200.000.000,00	91,30	0,00
1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.600.000.000,00	4.200.000.000,00	91,30	0,00
	- Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.600.000.000,00	4.200.000.000,00	91,30	0,00
Jumlah		4.600.000.000,00	4.200.000.000,00	91,30	0,00

Rincian atas penyertaan modal daerah kepada BUMD TA. 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.44
Rincian Penyertaan Modal Daerah Kepada BUMD TA. 2022

No.	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1.	PDAM Bima	500.000.000,00	0,00
2.	Perumda Bima Karya Sejahtera	100.000.000,00	0,00
3.	PT. BPR Pesisir Akbar	1.300.000.000,00	0,00
4.	PD. BPR NTB	500.000.000,00	0,00
5.	PT. Bank NTB Syariah	1.500.000.000,00	0,00
6.	PT. Jamkrida NTB Bersaing	300.000.000,00	0,00
Jumlah		4.200.000.000,00	0,00

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Komponen LPSAL terdiri dari :

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	58.349.893.422,52	39.104.262.080,02

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya. Dimana Saldo Anggaran Lebih Awal TA. 2022 sebesar Rp58.349.893.422,52, dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Awal TA. 2021 sebesar Rp39.104.262.080,02 mengalami peningkatan sebesar Rp19.245.631.342,50 atau 32,98%.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	58.349.893.422,52	39.104.262.080,02

Penggunaan SAL merupakan SiLPA TA. 2021 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Dimana Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA. 2022 Sebesar Rp58.349.893.422,52. Dibandingkan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA. 2021 sebesar Rp39.104.262.080,02 mengalami peningkatan sebesar Rp19.245.631.342,50 atau 32,98%.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	29.966.267.717,66	58.349.893.422,52

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2022 sebesar Rp29.966.267.717,66. Dibandingkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 sebesar Rp58.349.893.422,52 mengalami penurunan sebesar Rp22.693.553.231,22 atau 38,89%.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak ada koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA. 2022 dan TA. 2021.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	29.966.267.717,66	58.349.893.422,52

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA. 2022 sebesar Rp29.966.267.717,66 mengalami penurunan sebesar Rp22.693.553.231,22 atau 38,89% dibandingkan saldo anggaran lebih akhir TA. 2021 senilai Rp58.349.893.422,52. Rincian LPSAL diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5.45
Rincian LPSAL

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	58.349.893.422,52	39.104.262.080,02
2.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	58.349.893.422,52	39.104.262.080,02
	Sub Total (1-2)	0,00	0,00
3.	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	29.966.267.717,66	58.349.893.422,52
	Sub Total (3+4)	29.966.267.717,66	58.349.893.422,52
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
5.	Lain -lain	0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7+8)	29.966.267.717,66	58.349.893.422,52

5.3 NERACA

	2022	2021
5.3.1 ASET	(Rp)	(Rp)
	2.942.610.968.171,40	2.914.151.376.782,92

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Properti Investasi dan Aset Lainnya. Rincian nilai aset Pemerintah Kabupaten Bima sebagai berikut :

Tabel 5.46
Rincian Aset

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Aset Lancar	73.397.994.042,99	119.346.381.064,14
2.	Investasi Jangka Panjang	87.301.153.966,35	87.892.269.204,31
3.	Properti Investasi	35.758.179.629,50	0,00
4.	Aset Tetap	2.657.870.681.057,02	2.655.683.321.610,38
5.	Aset Lainnya	88.282.959.475,55	51.229.404.904,09
	Jumlah	2.942.610.968.171,40	2.914.151.376.782,92

Rincian tabel di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai Aset Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022 sebesar Rp28.459.591.388,48 atau 0,97% dari nilai Aset TA. 2021 sebesar Rp2.914.151.376.782,92. Penjelasan rincian Aset tersebut diuraikan sebagai berikut :

	2022	2021
5.3.1.1 ASET LANCAR	(Rp)	(Rp)
	73.397.994.042,99	119.346.381.064,14

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.397.994.042,99 mengalami penurunan sebesar Rp45.948.387.021,15 atau 38,50% dari Aset Lancar TA. 2021 sebesar Rp119.346.381.064,14. Aset lancar terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Belanja Dibayar Dimuka, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Persediaan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.47
Rincian Aset Lancar

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Kas dan Setara Kas	29.983.271.002,66	58.282.454.791,73
2.	Piutang	63.831.994.860,78	60.945.106.722,12
3.	Penyisihan Piutang	(40.968.364.991,85)	(38.938.727.794,62)
4.	Belanja Dibayar Dimuka	725.960.720,40	539.760.812,91
5.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	103.331.456,00
6.	Persediaan	19.825.132.451,00	38.414.455.076,00
Jumlah		73.397.994.042,99	119.346.381.064,14

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	29.983.271.002,66	22.195.448.394,25

Nilai Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.983.271.002,66 mengalami penurunan sebesar Rp28.299.183.789,07 atau 48,56% dari saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.282.454.791,73. Kas dan Setara Kas dirincikan sebagai berikut :

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah/BUD	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	10.431.307.035,93	22.195.448.394,25

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.431.307.035,93 mengalami penurunan sebesar Rp11.764.141.358,32 atau 53,00% dari saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.195.448.394,25. Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 tersebut merupakan saldo kas pada Rekening BUD berdasarkan hasil rekonsiliasi Bank. Rincian Kas di Kas Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.48
Rincian Kas di Kas Daerah/BUD

No.	Nomor Rekening Bank	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Bank NTB : 005.21.00001.00.0	508.859.693,03	5.578.709.809,39
2.	Bank NTB : 005.21.00070.00.0	7.076.779.482,09	8.577.280.058,96
3.	Bank NTB : 005.21.00153.02.6	3.678.776,57	920.176.672,65
4.	Bank NTB : 005.21.00011.01.8	16.921.566,24	3.768.820.664,25
5.	Bank BNI : 53761815	2.168.581.045,00	2.700.610.776,00
6.	Bank BNI : 567899998	656.486.473,00	649.850.413,00
Jumlah		10.431.307.035,93	22.195.448.394,25

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	216.768.905,83	0,00

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp216.768.905,83, sementara per 31 Desember 2021 tidak ada saldo Kas di Bendahara Penerimaan. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 merupakan saldo kas dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dan Puskesmas sebesar Rp214.776.644,00 serta Jasa Giro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima sebesar Rp1.992.261,83.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	Rp24.437.556,59	0,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.437.556,59, sementara per 31 Desember 2021 tidak ada saldo kas di Bendahara Pengeluaran. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 terdiri dari :

- a. Sisa UUDP pada Kantor Camat Soromandi sebesar Rp15.000.000.
- b. Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Parado atas Belanja Pegawai sebesar Rp5.000.
- c. Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Belanja Pegawai sebesar Rp156.000.
- d. Sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dan Puskesmas sebesar Rp9.276.556,59.

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara JKN	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	2.036.520.023,00	5.956.356.411,00

Saldo kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.036.520.023,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.919.836.388,00 atau 65,81% dari saldo kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.956.356.411,00. Rincian Saldo kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.49
Rincian Kas di Bendahara JKN (kapitasi)
Per 31 Desember 2022

No.	Puskesmas	Saldo Kas Bendahara JKN TA. 2022 (Rp)	Saldo Kas JKN TA. 2021 (Rp)
1.	Puskesmas Ambalawi	372.631,00	73.343.769,00
2.	Puskesmas Belo	12.660,00	94.881,00
3.	Puskesmas Bolo	53.452.728,00	350.530.861,00
4.	Puskesmas Donggo	5.121.167,00	1.849.607,00
5.	Puskesmas Lambitu	773.092,00	2.198.494,00
6.	Puskesmas Lambu	207.906.574,00	807.409.940,00
7.	Puskesmas Langgudu	1.073.095,00	70.071.364,00
8.	Puskesmas Madapangga	2.124.309,00	664.399,00
9.	Puskesmas Monta	193.554,00	299.454.692,00
10.	Puskesmas Ngali	182.920,00	178.698,00
11.	Puskesmas Pai	141.612,00	17.854.025,00
12.	Puskesmas Palibelo	1.038.322,00	729.631.290,00
13.	Puskesmas Parado	238.429,00	1.831.432,00
14.	Puskesmas Sanggar	5.087,00	49.637,00
15.	Puskesmas Sape	3.487.576,00	760.103.600,00
16.	Puskesmas Soromandi	288.476,00	66.413.144,00
17.	Puskesmas Tambora	4.582.372,00	57.721.832,00
18.	Puskesmas Wawo	106.407.048,00	620.664.605,00
19.	Puskesmas Wera	761.705,00	344.068.743,00
20.	Puskesmas Woha	1.648.337.234,00	1.716.719.326,00
21.	Puskesmas Langgudu Timur	19.432,00	35.502.072,00
Jumlah		2.036.520.023,00	5.956.356.411,00

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BLUD	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	17.201.965.549,24	29.857.907.281,38

Kas di BLUD merupakan pendapatan yang diterima oleh BLUD dan tidak disetorkan ke kas daerah karena dikelola secara langsung sesuai dengan mekanisme pengelolaan BLUD. Kas di BLUD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bima yaitu pada RSUD Bima. Saldo kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.201.965.594,24 mengalami penurunan sebesar Rp12.655.941.687,14 atau 42,39% dari saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.857.907.281,38. Saldo kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2022 terdiri dari kas murni sebesar Rp17.194.302.399,24 dan Utang Pajak BLUD sebesar Rp7.663.195,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.50
Rincian Kas di Bendahara BLUD Per 31 Desember 2022

No.	Nomor Rekening Bank	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Bank BNI – 03269663359	6.027.602.772,00	19.307.784.816,00
2.	Bank BNI – 0333182866	74.631,00	49.426,00
3.	Bank BRI – 007901000717309	3.413.530.862,00	4.655.824.288,00
4.	Bank NTB Syariah - 005.21.00031.01-2	1.508.439.101,37	1.595.671.284,51
5.	Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD	7.266.897,00	4.510.481,00

No.	Nomor Rekening Bank	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
6.	Bank LS SKPD	0,00	0,00
7.	Bank Mandiri Syariah – 2020203334	6.245.051.330,87	4.294.066.985,87
Jumlah		17.201.965.549,24	29.857.907.281,38

5.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara BOS	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	59.023.585,08	272.742.705,09

Di wilayah Kabupaten Bima terdapat 408 (empat ratus delapan) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 113 (seratus tiga belas) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Adapun saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.023.585,08 mengalami penurunan sebesar Rp213.719.120,01 atau 78,36% dari saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp272.742.705,09. Saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 terdiri dari kas murni BOS sebesar Rp57.897.811,85 dan Jasa Giro sebesar Rp1.125.773,23, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.51
Rincian Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Kas di Bendahara BOS SD	45.386.957,70	214.362.526,35
	Kas Murni	44.550.344,27	
	Jasa Giro	836.613,43	
2.	Kas di Bendahara BOS SMP	13.636.627,38	58.380.178,74
	Kas Murni	13.347.467,58	
	Jasa Giro	289.159,80	
JUMLAH		59.023.585,08	272.742.705,09

5.3.1.1.1.7 Kas di Bendahara BOP PAUD	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	3.908.211,98	0,00

Saldo kas di Bendahara BOP PAUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.908.211,98, sementara per 31 Desember 2021 tidak ada saldo Kas di Bendahara BOP PAUD. Saldo kas di Bendahara BOP PAUD per 31 Desember 2022 terdiri dari kas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebesar Rp232.186,27 dan TK Negeri sebesar Rp3.676.025,71

5.3.1.1.1.8 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	9.340.090,00	0,00

Saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.340.090,00, sementara per 31 Desember 2021 tidak ada saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 tersebut untuk mencatat kurang saji penerimaan PFK pada aktivitas Transistoris atas saldo pajak pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bima.

5.3.1.1.2 Piutang	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	63.831.994.860,78	61.048.438.178,12

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Klasifikasi perhitungan penyisihan Piutang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.52
Klasifikasi Perhitungan Penyisihan Piutang

No.	Klasifikasi	Kriteria umur dari periode jatuh tempo	Persentase penyisihan
1.	Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Kurang Lancar	1 sampai 2 tahun	10%
3.	Diragukan	2 sampai 3 tahun	50%
4.	Macet	Diatas 3 tahun, dan/atau wajib pajak tidak ditemukan, dan/atau wajib pajak meninggal dunia, dan/atau wajib pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>)	100 %

Saldo Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.831.994.860,78 mengalami peningkatan sebesar Rp2.783.556.682,66 atau 4,56% dari saldo kas Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp61.048.438.178,12. Rincian Piutang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.53
Rincian Piutang

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Piutang Pajak	44.354.463.990,32	41.431.852.906,12
2.	Piutang Retribusi	8.889.504.967,00	8.677.815.567,00
3.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	5.115.605.459,46	5.206.285.249,00
4.	Piutang Transfer	5.472.420.444,00	5.629.153.000,00
5.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
6.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	103.331.456,00
Jumlah		63.831.994.860,78	61.048.438.178,12

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	44.354.463.990,32	41.431.852.906,12

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.354.463.990,32 mengalami peningkatan sebesar Rp2.922.611.084,20 atau 7,05% dari saldo kas Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.431.852.906,12. Nilai piutang pajak, penyisihan piutang pajak dan piutang pajak netto per 31 Desember 2022, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5.54
Nilai Piutang Pajak, Penyisihan Piutang Pajak dan Piutang Pajak Netto

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Piutang Pajak	44.354.463.990,32	41.431.852.906,12
2.	Penyisihan Piutang Pajak	(28.411.780.950,35)	(27.581.777.642,12)
3.	Piutang Pajak Netto	15.942.683.039,97	13.850.075.264,00

Rincian piutang pajak, penyisihan piutang dan NRV piutang pajak daerah per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.55
Rincian Piutang Pajak, Penyisihan Piutang dan NRV Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	Piutang Pajak (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Netto (Rp)
1.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	42.978.504.574,70	28.243.646.690,04	14.734.857.884,66
2.	Piutang Pajak Hotel	10.825.379,62	1.661.569,85	9.163.809,77
3.	Piutang Pajak Reklame	86.593.000,00	42.577.300,00	44.015.700,00
4.	Pajak Hiburan	600.000,00	510.000,00	90.000,00
5.	Pajak Restoran	20.220.200,00	7.158.700,00	13.061.500,00
6.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.026.540.793,00	5.132.703,97	1.021.408.089,03
7.	Pajak BPHTB	212.851.250,00	106.425.625,00	106.425.625,00
8.	Pajak Parkir	2.995.000,00	14.975,00	2.980.025,00
9.	Pajak Air Tanah	7.380.000,00	2.514.000,00	4.866.000,00
10.	Pajak Mineral Bukan Logam	7.953.793,00	2.139.386,50	5.814.406,50
	Jumlah	44.354.463.990,32	28.411.780.950,35	15.942.683.039,97

1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.978.504.574,70 mengalami peningkatan sebesar Rp1.924.869.911,58 atau 4,48% dari saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.053.634.663,12, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.56
Rincian Piutang Pajak, Penyisihan Piutang
dan NRV Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2022

No.	Tahun	Piutang PBB-P2 (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang PBB-P2 Neto (Rp)
1.	2022	2.086.001.283,58	10.430.006,42	2.075.571.277,16
2.	2021	5.713.137.425,00	571.313.742,50	5.141.823.682,50
3.	2020	5.399.569.425,00	539.956.942,50	4.859.612.482,50
4.	2019	5.315.700.885,00	2.657.850.442,50	2.657.850.442,50
5.	2018	5.233.106.671,00	5.233.106.671,00	-
6.	2017	5.821.058.380,00	5.821.058.380,00	-
7.	2016	4.437.333.253,00	4.437.333.253,00	-
8.	2015	4.391.307.372,12	4.391.307.372,12	-
9.	2014	4.581.289.880,00	4.581.289.880,00	-
Jumlah		42.978.504.574,70	28.243.646.690,04	14.734.857.884,66

2. Piutang Pajak Hotel

Terdapat koreksi kurang catat terhadap Piutang Pajak Hotel TA. 2021 sebesar Rp7.828.591,00, yang sebelumnya tercatat sebesar Rp0,00, sehingga selisih kurang catat tersebut di akumulasi pada TA. 2022. Dimana saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.653.970,00, sementara per 31 Desember 2021 tidak ada saldo Piutang Pajak Hotel. Rincian saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.57
Rincian Piutang Pajak Hotel, Penyisihan Piutang
dan Piutang Pajak Hotel Netto Per 31 Desember 2022

No.	Tahun	Piutang Pajak Hotel (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Hotel Netto (Rp)
1.	2022	15.513.970,00	77.569,85	15.436.400,15
2.	2021	0,00	0,00	0,00
3.	2020	1.090.000,00	109.000,00	981.000,00
4.	2019	1.150.000,00	575.000,00	575.000,00
5.	2018	225.000,00	225.000,00	0,00
6.	2016	675.000,00	675.000,00	0,00
Jumlah		18.653.970,00	1.661.569,85	16.992.400,15

3. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 sebesar Rp86.593.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.955.000,00 atau 3,30% dari saldo Piutang Pajak Reklame sebesar Rp89.548.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.58
Rincian Piutang Pajak Reklame, Penyisihan Piutang
dan Piutang Pajak Reklame Netto Per 31 Desember 2022

No.	Tahun	Piutang Pajak Reklame (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Reklame Netto (Rp)
1	2022	0,00	0,00	0,00
2.	2021	12.232.500,00	1.223.250,00	11.009.250,00
3	2020	3.203.000,00	320.300,00	2.882.700,00
4	2019	60.247.500,00	30.123.750,00	30.123.750,00
5	2018	10.205.000,00	10.205.000,00	0,00

No.	Tahun	Piutang Pajak Reklame (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Reklame Neto (Rp)
6	2017	705.000,00	705.000,00	0,00
Jumlah		86.593.000,00	42.577.300,00	44.015.700,00

4. Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022 sebesar Rp600.000,00 merupakan Piutang Pajak Reklame dari Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2020 yang belum dilakukan penyetoran oleh Wajib Piutang sampe dengan per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.59
Rincian Piutang Pajak Reklame, Penyisihan Piutang dan Piutang Pajak Reklame Neto Per 31 Desember 2022

No.	Tahun	Piutang Pajak Hiburan (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Hiburan Neto (Rp)
1.	2022	0,00	0,00	0,00
2.	2021	0,00	0,00	0,00
3.	2020	100.000,00	10.000,00	90.000,00
4.	2018	200.000,00	200.000,00	0,00
5.	2017	300.000,00	300.000,00	0,00
Jumlah		600.000,00	510.000,00	90.000,00

5. Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember sebesar Rp20.220.200,00 merupakan Piutang Pajak Restoran dari Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang belum dilakukan penyetoran oleh Wajib Piutang sampe dengan per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.60
Rincian Piutang Pajak Restoran, Penyisihan Piutang dan Piutang Pajak Restoran Neto Per 31 Desember 2022

No.	Tahun	Piutang Pajak Restoran (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Restoran Neto (Rp)
1.	2022	0,00	0,00	0,00
2.	2021	0,00	0,00	0,00
3.	2020	10.010.000,00	1.001.000,00	9.009.000,00
4.	2019	8.105.000,00	4.052.500,00	4.052.500,00
5.	2018	1.495.200,00	1.495.200,00	0,00
6.	2017	610.000,00	610.000,00	0,00
Jumlah		20.220.200,00	7.158.700,00	13.061.500,00

6. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Pada TA. 2022, Piutang Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar Rp12.387.162.800,00 dan telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak sebesar Rp11.360.622.007,00, sehingga sisa Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.026.540.793,00. Sementara per 31 Desember 2021 tidak ada saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan.

7. Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Saldo Piutang Pajak BPHTB per 31 Desember 2022 sebesar Rp212.851.250,00 merupakan Piutang Pajak BPHTB Tahun 2019 yang belum dilakukan penyetoran oleh Wajib Piutang sampe dengan per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.61
Rincian Piutang Pajak BPHTB, Penyisihan Piutang dan Piutang Pajak BPHTB Neto

No.	Tahun	Piutang BPHTB (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang BPHTB Neto (Rp)
1.	2022	0,00	0,00	0,00
2.	2021	0,00	0,00	0,00
3.	2020	0,00	0,00	0,00
4.	2019	212.851.250,00	106.425.625,00	106.425.625,00
Jumlah		212.851.250,00	106.425.625,00	106.425.625,00

8. Piutang Pajak Parkir

Pada TA. 2022, Piutang Pajak Parkir ditetapkan sebesar Rp49.711.400,00 dan telah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak sebesar Rp46.716.400,00, sehingga sisa Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.995.000,00. Sementara per 31 Desember 2021 tidak ada saldo Piutang Pajak Parkir.

9. Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.380.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.392.000,00 atau 37,31% dari saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.772.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.62
Rincian Piutang Pajak Air Tanah, Penyisihan Piutang dan Piutang Pajak Air Tanah Netto Per 31 Desember 2022

No.	Tahun	Piutang Air Tanah (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Air Tanah Neto (Rp)
1.	2022	0,00	0,00	0,00
2.	2021	0,00	0,00	0,00
3.	2020	2.940.000,00	294.000,00	2.646.000,00
4.	2019	4.440.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
Jumlah		7.380.000,00	2.514.000,00	4.866.000,00

10. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.953.793,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.133.000,00 atau 80,16% dari saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.086.793,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.63
Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam, Penyisihan Piutang dan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Neto Per 31 Desember 2022

No.	Tahun	Piutang Mineral (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Neto (Rp)
1.	2022	3.658.000,00	18.290,00	3.639.710,00
2.	2021	0,00	0,00	0,00
3.	2020	67.000,00	6.700,00	60.300,00
4.	2019	4.228.793,00	2.114.396,50	2.114.396,50
Jumlah		7.953.793,00	2.139.386,50	5.814.406,50

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	8.889.504.967,00	8.677.815.567,00

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.889.504.967,00 mengalami peningkatan sebesar Rp211.689.400,00 atau 2,38% dari saldo kas Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.677.815.567,00. Nilai piutang pajak, penyisihan piutang pajak dan piutang pajak netto per 31 Desember 2022, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5.64
Nilai Piutang Pajak, Penyisihan Piutang Pajak dan Piutang Pajak Netto Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pasar Grosir	1.399.715.050,00	1.169.768.550,00
2.	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	332.172.000,00	332.172.000,00
3.	Piutang Sewa Tahunan Tanah	6.408.869.197,00	6.408.869.197,00
4.	Piutang Sewa Menara/Tower	748.748.720,00	767.005.820,00
Jumlah Piutang Retribusi		8.889.504.967,00	8.677.815.567,00
5.	Penyisihan Piutang	(8.641.703.894,50)	(8.439.247.711,50)
Jumlah Piutang Retribusi Neto		247.801.072,50	238.567.855,50

Rincian piutang retribusi, penyisihan piutang dan NRV Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.65
Rincian Piutang Retribusi, Penyisihan Piutang dan NRV Piutang Retribusi Daerah Netto

No.	Uraian	Piutang Retribusi (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Retribusi Neto (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pasar Grosir	1.399.715.050,00	1.151.913.977,50	247.801.072,50
2.	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	332.172.000,00	332.172.000,00	0,00
3.	Piutang Sewa Tahunan Tanah	6.408.869.197,00	6.408.869.197,00	0,00
4.	Piutang Sewa Menara/Tower	748.748.720,00	748.748.720,00	0,00
Jumlah		8.889.504.967,00	8.641.703.894,50	247.801.072,50

1. Piutang Retribusi Pasar Grosir

Saldo Piutang Pajak Retribusi Pasar Grosir per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.399.715.050,00 mengalami peningkatan sebesar Rp229.946.500,00 atau 16,43% dari saldo Piutang Retribusi Pasar Grosir per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.169.768.550,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.66
Rincian Piutang Retribusi Pasar Grosir, Penyisihan Piutang dan Piutang Retribusi Pasar Grosir Netto Per 31 Desember 2022

No.	Tahun	Piutang Retribusi Pasar (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Retribusi Pasar Grosir Netto (Rp)
1.	2022	383.008.000,00	135.206.927,50	247.801.073,00
2.	2021	196.524.500,00	196.524.500,00	0,00
3.	2020	104.360.000,00	104.360.000,00	0,00
4.	2019	201.563.100,00	201.563.100,00	0,00
5.	2018	221.880.000,00	221.880.000,00	0,00
6.	2017	58.351.000,00	58.351.000,00	0,00
7.	2016	82.242.750,00	82.242.750,00	0,00
8.	2015	47.490.175,00	47.490.175,00	0,00
9.	2014	104.295.525,00	104.295.525,00	0,00
Jumlah		1.399.715.050,00	1.151.913.978,00	247.801.073,00

2. Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas

Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas bersumber dari retribusi yang dipungut dari sewa pakai atas rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Bima yang berada di Kecamatan Sape dan Kecamatan Woha serta yang berada di wilayah Kota Bima. Saldo Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas per 31 Desember 2022 sebesar Rp332.172.000,00 merupakan sisa Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas TA. 2020 yang belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.67
Rincian Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas, Penyisihan Piutang dan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas Netto Per 31 Desember 2022

No.	Tahun	Piutang Retribusi sewa rumah dinas (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Retribusi sewa rumah dinas Netto (Rp)
1.	2022	0,00	0,00	0,00
2.	2021	0,00	0,00	0,00
3.	2020	23.608.000,00	17.768.000,00	5.840.000,00
4.	2019	25.939.000,00	25.939.000,00	0,00
5.	2018	23.534.000,00	23.534.000,00	0,00
6.	2017	20.781.000,00	20.781.000,00	0,00
7.	2016	19.378.000,00	19.378.000,00	0,00
8.	≤ 2015	218.932.000,00	218.932.000,00	0,00
Jumlah		332.172.000,00	326.332.000,00	5.840.000,00

3. Piutang Sewa Tahunan Tanah

Saldo Piutang Sewa Tahunan Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.408.869.197,00 merupakan sisa sewa tahunan tanah eks jaminan aparat desa untuk musim tanam Tahun 2016-2017 dan musim tanam Tahun 2017-2018 yang belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.68
Rincian Piutang Sewa Tahunan Tanah, Penyisihan Piutang dan Piutang Sewa Tahunan Tanah Netto Per 31 Desember 2022

No.	Tahun Sewa	Piutang Retribusi Sewa Tanah (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1.	Musim Tanam Tahun 2017-2018 (SK panitia Nomor 029/483/03.8/2017; 14 Des 2017)	23.782.100,00	23.782.100,00	0,00
2.	Musim Tanam Tahun 2017-2018 (SK panitia Nomor 128/001/03.8/2017; 5 Januari 2017)	6.385.087.097,00	6.385.087.097,00	0,00
Jumlah		6.408.869.197,00	6.408.869.197,00	0,00

4. Piutang Sewa Pengendalian Menara/Tower

Saldo Piutang Sewa Pengendalian Menara/Tower per 31 Desember 2022 sebesar Rp748.748.720,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.257.100,00 atau 2,38% dari saldo

Piutang Sewa Pengendalian Menara/Towe per 31 Desember 2021 sebesar Rp767.005.820,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.69
Rincian Piutang Sewa Pengendalian Menara/Tower, Penyisihan Piutang dan Piutang Sewa Pengendalian Menara/Tower Netto Per 31 Desember 2022

No.	Tahun sewa	Piutang Retribusi sewa tower (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Retribusi sewa tower Netto (Rp)
1.	2022	0,00	0,00	0,00
2.	2021	43.454.400	30.855.600,00	0,00
3.	2020	705.294.320	8.140.800,00	0,00
Jumlah		748.748.720,00	748.748.720,00	0,00

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	1.775.856.490.997,70	1.775.825.126.383,90

Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.115.605.459,46 mengalami penurunan sebesar Rp90.679.789,54 atau 1,74% dari saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.206.285.249,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD yaitu atas kerja sama pengelolaan Sarang Burung Walet. Saldo Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.776.854.000,00. Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD tersebut merupakan sisa Piutang Tahun 2013 dan 2014 yang belum dilakukan pembayaran oleh Pengelola Sarang Burung Walet, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.70
Rincian Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD,
Penyisihan Piutang dan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Netto
Per 31 Desember 2022

No.	Tahun Pengelolaan	Piutang Sarang Burung Walet (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Retribusi Neto (Rp)
1.	2022	0,00	0,00	0,00
2.	2021	1.108.890.000,00	110.889.000,00	998.001.000,00
3.	2020	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.	2014	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00
5.	2014	1.141.964.000,00	1.141.964.000,00	0,00
6.	2013	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
Jumlah		3.776.854.000,00	2.778.853.000,00	998.001.000,00

2. Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang Pendapatan dari Pengembalian merupakan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yaitu atas pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2004-2009 yang belum dapat dilakukan penagihan/belum disetor oleh yang bersangkutan ke Kas Daerah dengan jumlah sebesar Rp132.364.105,00 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp132.364.105,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.71
Rincian Piutang TKI/BPO

No.	Nama-Nama Anggota DPRD Periode 2004 - 2009	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Saldo per 31 Des 2019 (Rp)	Keterangan
1.	M.Nor H.M.S.	20.496.735,00	20.496.735,00	
2.	H. Syamsuddin	13.664.490,00	13.664.490,00	
3.	Muhammad, SH	13.664.490,00	13.664.490,00	
4.	Khairil Wasita	13.664.490,00	13.664.490,00	
5.	H.M. Syukur Kule	15.941.905,00	15.941.905,00	
6.	Adnan	19.800.000,00	19.800.000,00	Meninggal dunia
7.	Lukman, S.Sos (Ex.Bendahara Setwan)	35.131.995,00	35.131.995,00	

No.	Nama-Nama Anggota DPRD Periode 2004 - 2009	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Saldo per 31 Des 2019 (Rp)	Keterangan
	Jumlah Piutang TKI/BPO	132.364.105,00	132.364.105,00	
8.	Penyisihan Piutang	(132.364.105,00)	(132.364.105,00)	
	Jumlah Piutang TKI/BPO Neto	0,00	0,00	

3. Piutang Pelayanan pada BLUD

Piutang pelayanan pada BLUD merupakan piutang atas pelayanan pada BPJS sampai dengan per 31 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.132.408.400,00 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp5.662.042,00, sehingga per 31 Desember 2022 tersisa piutang bersih sebesar Rp1.126.746.358,00.

4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp72.539.230,00. Nilai tersebut merupakan reklasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran untuk mengakui nilai jatuh tempo 1 tahun. Sementara per 31 Desember 2021 tidak ada realisasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

5. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Per 31 Desember 2022 tidak ada realisasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sementara realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp103.331.456,00.

5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer

Nilai Piutang Transfer per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.472.420.444,00 mengalami penurunan sebesar Rp156.732.556,00 atau 2,78% dari saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.629.153.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Piutang Transfer Pusat

Nilai Piutang Transfer Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp80.250.000,00. Nilai piutang tersebut untuk mencatat pemotongan DAU berdasarkan KMK 34/KM.7/2021. Sementara per 31 Desember 2021 tidak ada saldo Piutang Transfer Pusat.

2. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atas bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak

Air Bawah Tanah dan Pajak Rokok Tahun 2021 yang belum dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2022. Nilai Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.392.170.444,00 mengalami penurunan sebesar Rp236.982.556,00 atau 2,78% dari saldo Piutang Bagi Hasil per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.629.153.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.72
Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	PKB	5.392.170.444,00	1.650.227.715,00
2.	BBNKB	0,00	1.020.832.599,00
3.	PBBKB	0,00	2.951.282.645,00
4.	Pajak Air Bawah Tanah	0,00	6.810.041,00
5.	Pajak Rokok	0,00	0,00
Jumlah		5.392.170.444,00	5.629.153.000,00

5.3.1.1.2.5 Piutang Lainnya

Nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp725.960.720,40 mengalami peningkatan sebesar Rp186.199.907,49 atau 25,65% dari saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp539.760.812,91. Piutang Lainnya per 31 Desember tersebut bersumber dari Belanja Dibayar Dimuka atas belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima yang dibayarkan sesuai nilai kontrak karena pihak ketiga menyerahkan garansi bank, sedangkan berdasarkan laporan penyelesaian fisik per 31 Desember 2022 nilai pekerjaan belum mencapai 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73
Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022

Tahun 2022			Tahun 2021		
No.	Uraian	Nilai (Rp)	No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima	90.000.000,00	1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima	428.088.812,91
-	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Desa Poja Kec. Sape - KSM. USAHA BERSAMA	15.000.000,00	-	Pemb. Masjid Agung (PT. Brahmakerta Adiwira KSO. PT.Budi Mas)	428.088.812,91
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan (5-10 KK) Minimal 50 kk Desa Kalampa Kec. Woha -	15.000.000,00			

Tahun 2022			Tahun 2021		
No.	Uraian	Nilai (Rp)	No.	Uraian	Nilai (Rp)
	KSM. KALAMPA SAMA				
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan (5-10 KK) Minimal 50 kk Desa Dadibou Kec. Woha - KSM. PEMUDA PEMERHATI LINGKUNGAN	15.000.000,00			
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 kk Desa Soki Kec. Belo - KSM. OI KALATE	15.000.000,00			
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 kk Desa Diha Kec. Belo - KSM. LA RAJI	15.000.000,00			
-	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 kk Desa Kawuwu Kec. Langgudu - KSM. KASAMA WEKI	15.000.000,00			
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	635.960.720,40	2.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima	111.672.000,00
-	Pembangunan dan Rehab Ruang Operasi RSUD Sondosia	449.813.520,00	-	Pemb. Gedung Perpustakaan	111.672.000,00
-	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah	186.147.200,40			
Jumlah		725.960.720,40	Jumlah		539.760.812,91

5.3.1.1.3 Persediaan

Nilai persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.825.132.451,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.589.322.625,00 atau 48,39% dari saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.414.455.076,00, dengan sebagai berikut :

Tabel 5.74
Rincian Nilai Persediaan
Pada Masing-Masing Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022		Per 31 Desember 2021 (Rp)
		Jenis Persediaan	Total Persediaan (Rp)	
1.	Sekretariat Daerah	- Persediaan Habis Pakai	52.145.000,00	3.050.000,00
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	- Persediaan Habis Pakai	410.250,00	274.000,00
3.	Inspektorat	- Persediaan Habis Pakai	315.000,00	264.400,00
4.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	- Persediaan Habis Pakai - Persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat	4.105.305.500,00	4.020.800,00
5.	Dinas Kesehatan	- Persediaan Habis Pakai - Persediaan Obat-obatan	9.494.855.142,00	7.509.808.280,00
6.	Dinas Sosial	- Persediaan Habis Pakai	325.000,00	250.000,00

No.	Perangkat Daerah	TA. 2022		Per 31 Desember 2021 (Rp)
		Jenis Persediaan	Total Persediaan (Rp)	
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- Persediaan Habis Pakai	1.246.550,00	2.297.675,00
8.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	0,00
9.	Dinas Perhubungan	- Persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat	228.200.000,00	60.230.000,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Persediaan barang cetakan	497.236.375,00	972.407.500,00
11.	Dinas Pariwisata	- Persediaan Habis Pakai	365.500,00	68.000,00
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Persediaan Habis Pakai - Persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat	1.486.500.000,00	20.955.962.000,00
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00	0,00
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Persediaan Habis Pakai	390.000,00	999.500,00
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Persediaan Habis Pakai	321.000,00	697.000,00
16.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	- Persediaan Habis Pakai	143.750,00	0,00
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	- Persediaan barang cetakan	4.190.000,00	2.190.000,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup	- Persediaan Habis Pakai	102.500,00	358.000,00
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		0,00	0,00
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0,00	795.000,00
21.	Dinas Ketahanan Pangan	- Persediaan Habis Pakai	867.000,00	1.078.000,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		0,00	0,00
23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Persediaan Habis Pakai	15.785.666,00	0,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	- Persediaan Habis Pakai	180.000,00	200.000,00
25.	Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	675.000,00
26.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		0,00	0,00
27.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	- Persediaan Habis Pakai	1.494.500,00	4.496.896,00
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Persediaan Habis Pakai	2.450.875,00	0,00
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat	48.298.000,00	4.275.870.237,00
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		0,00	675.000,00
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	- Persediaan Habis Pakai - Persediaan Obat-obatan	3.921.999.565,00	4.617.787.788,00
32.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		0,00	0,00
33.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	0,00
34.	Kecamatan		0,00	0,00
Jumlah			19.825.132.451,00	38.414.455.076,00

Nilai persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.825.132.451,00 merupakan nilai persediaan berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2022 dan tidak termasuk persediaan yang telah rusak/kadaluarsa.

5.3.2 INVESTASI JANGKA PANJANG	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	87.301.153.966,35	87.892.269.204,31

Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Non Permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember

2022 adalah Dana Bergulir sebesar Rp 9.542.607.479,00 dan Investasi Permanen adalah Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp87.217.678.960,45, sehingga jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.301.153.966,35 mengalami penurunan sebesar Rp591.115.237,96 atau 0,68% dari jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp 87.892.269.204,31.

5.3.2.1.2 Investasi Non Permanen– Dana Bergulir	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	83.475.005,90	120.375.000,50

Investasi Non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal investasi dengan penyisihan investasi. Kebijakan perhitungan penyisihan dilakukan berdasarkan *aging schedule* sebagai berikut :

Tabel 5.75

Klasifikasi Dalam Perhitungan Penyisihan Investasi Dana Bergulir

No.	Klasifikasi	Kriteria umur dari periode jatuh tempo	Persentase penyisihan
1.	Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Kurang Lancar	1 sampai 3 tahun	10%
3.	Diragukan	3 sampai 5 tahun	50%
4	Macet	Diatas 5 tahun	100%

Nilai bersih Dana Bergulir yang bisa tertagih per 31 Desember 2022 sebesar Rp83.475.005,90 dan per per 31 Desember 2021 sebesar Rp120.375.000,50, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.76
Dana Bergulir

No.	URAIAN	Jumlah Nilai Bersih Dana Bergulir Per 31 Des 2022 (Rp)	Jumlah Nilai Bersih Dana Bergulir Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Saldo Dana Bergulir	9.542.607.479,00	9.587.607.473,00
2.	Penyisihan Dana Bergulir	(9.459.132.473,10)	(9.467.232.472,50)
3.	Jumlah Bersih Dana Bergulir	83.475.005,90	120.375.000,50

Rincian dana bergulir per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.77
Rincian Dana Bergulir Per 31 Desember 2022

No.	Nama Dinas	Pokok 2021	Angsuran 2022	Sisa Pokok Per 31 Desember 2022	Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2022	NRV
I.	Dinas Koperasi dan PKM	2.698.826.135,00	44.999.994,00	2.653.826.141,00	2.570.351.135,10	83.475.005,90
a	Program pengembangan Koperasi Tahun 2017	106.500.007,00	0,00	106.500.007,00	53.250.003,50	53.250.003,50
b	Penjaminan Dana PER pada BRI Cabang Bima 2002	365.069.099,00	0,00	365.069.099,00	365.069.099,00	0,00
c	Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2000	830.000.000,00	0,00	830.000.000,00	830.000.000,00	0,00

No.	Nama Dinas	Pokok 2021	Angsuran 2022	Sisa Pokok Per 31 Desember 2022	Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2022	NRV
d	Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2008	75.984.189,00	0,00	75.984.189,00	75.984.189,00	0,00
e	Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2009	217.933.606,00	4.000.000,00	213.933.606,00	213.933.606,00	0,00
f	Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2012	20.250.006,00	0,00	20.250.006,00	20.250.006,00	0,00
g	Penguatan modal bagi Koperasi Tahun 2013	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00
h	Program Fasilitas Pembiayaan bagi KUKM 2010	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
i	Program Fasilitas Pembiayaan bagi KUKM 2011	112.382.751,00	0,00	112.382.751,00	112.382.751,00	0,00
j	Program Fasilitas Pembiayaan bagi KUKM 2012	361.520.667,00	0,00	361.520.667,00	361.520.667,00	0,00
k	Program Fasilitas Pembiayaan bagi KUKM 2013	385.852.480,00	0,00	385.852.480,00	385.852.480,00	0,00
l	Program Pengembangan Usaha Koperasi 2018	5.833.335,00	0,00	5.833.335,00	583.333,50	5.250.001,50
m	Program Pengembangan Usaha Koperasi 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	Program Pengembangan Usaha Koperasi 2020	68.749.995,00	40.999.994,00	27.750.001,00	2.775.000,10	24.975.000,90
II.	Dinas Peternakan	6.408.906.338,00	0,00	6.408.906.338,00	6.408.906.338,00	0,00
a	Ternak sapi Tahun 2003	331.897.000,00	0,00	331.897.000,00	331.897.000,00	0,00
b	Ternak sapi Tahun 2004	423.139.386,00	0,00	423.139.386,00	423.139.386,00	0,00
c	Ternak sapi Tahun 2006	622.627.310,00	0,00	622.627.310,00	622.627.310,00	0,00
d	Ternak sapi Tahun 2007	645.335.000,00	0,00	645.335.000,00	645.335.000,00	0,00
e	Ternak sapi Tahun 2008	748.302.500,00	0,00	748.302.500,00	748.302.500,00	0,00
f	Ternak sapi Tahun 2009	115.376.250,00	0,00	115.376.250,00	115.376.250,00	0,00
g	Ternak sapi Tahun 2010	271.660.000,00	0,00	271.660.000,00	271.660.000,00	0,00
h	Ternak sapi Tahun 2011	179.336.000,00	0,00	179.336.000,00	179.336.000,00	0,00
i	Ternak kambing Tahun 2003	122.146.795,00	0,00	122.146.795,00	122.146.795,00	0,00
j	Ternak kambing Tahun 2004	68.570.530,00	0,00	68.570.530,00	68.570.530,00	0,00
k	Ternak kambing Tahun 2006	476.830.875,00	0,00	476.830.875,00	476.830.875,00	0,00
l	Ternak kambing Tahun 2007	632.550.000,00	0,00	632.550.000,00	632.550.000,00	0,00
m	Ternak kambing Tahun 2008	625.700.000,00	0,00	625.700.000,00	625.700.000,00	0,00
n	Ternak kambing Tahun 2010	52.211.250,00	0,00	52.211.250,00	52.211.250,00	0,00
o	Ternak kambing Tahun 2011	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
p	Ternak kerbau Tahun 2004	308.583.920,00	0,00	308.583.920,00	308.583.920,00	0,00
q	Ternak kerbau Tahun 2006	239.902.512,00	0,00	239.902.512,00	239.902.512,00	0,00
r	Ternak kerbau Tahun 2007	83.377.000,00	0,00	83.377.000,00	83.377.000,00	0,00
s	Ternak kambing pe tahun 2006	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
t	Ternak kambing pe tahun 2007	56.375.000,00	0,00	56.375.000,00	56.375.000,00	0,00
u	Ternak kambing pe tahun 2008	90.650.010,00	0,00	90.650.010,00	90.650.010,00	0,00
v	Ternak kuda sumba tahun 2006	46.800.000,00	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
w	Ternak kuda sumba tahun 2007	65.115.000,00	0,00	65.115.000,00	65.115.000,00	0,00
x	Ternak kuda sumba tahun 2008	80.900.000,00	0,00	80.900.000,00	80.900.000,00	0,00
y	Ternak entok tahun 2007	21.520.000,00	0,00	21.520.000,00	21.520.000,00	0,00
z	Ternak entok tahun 2009	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00
III	Dinas Ketahanan Pangan	479.875.000,00	0,00	479.875.000,00	479.875.000,00	0,00

No.	Nama Dinas	Pokok 2021	Angsuran 2022	Sisa Pokok Per 31 Desember 2022	Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2022	NRV
a	Penguatan Modal Tahun 2008	157.875.000,00	0,00	157.875.000,00	157.875.000,00	0,00
b	Penguatan Modal Tahun 2009	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
c	Penguatan Modal Tahun 2010	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
d	Penguatan Modal Tahun 2011	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
e	Penguatan Modal Tahun 2012	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
f	Penguatan Modal Tahun 2013	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00
TOTAL		9.587.607.473,00	44.999.994,00	9.542.607.479,00	9.459.132.473,10	83.475.005,90

5.3.1.3.1 Investasi Permanen - Penyertaan

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Modal Pemerintah Daerah	87.217.678.960,44	87.771.894.203,80

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.217.678.960,44. Jumlah tersebut merupakan akumulasi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bima pada 8 (delapan) BUMD. Dimana 5 (lima) BUMD menggunakan metode ekuitas senilai Rp39.808.363.738,44 dan 2 (dua) BUMD menggunakan metode biaya senilai Rp47.409.315.222,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.78
Perhitungan Nilai Investasi Permanen - Metode Ekuitas Tahun 2022

No	BUMD	Prosesntasi Kepemilikan Saham	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Naik/ (turun)	Akta Pendirian/Dasar Pendirian
1	PT. DSM (LKP. Sanggar)	48,51%	3.038.000.744,96	2.882.914.360,25	155.086.384,71	Akta Notaris No. 8 tanggal 30 Agustus 2016
2	PT. DUM	88,36%	1.012.108.736,49	1.000.219.045,16	11.889.691,32	Akta Notaris No. 9 tanggal 20 Agustus 2016
3	PT. Bank Pesisir Akbar	94,72%	4.203.467.635,36	1.514.874.542,94	2.688.593.092,42	Akta Notaris No. 92 tanggal 19 Oktober 2005
4	Perumda BKS	100,00%	4.854.980.700,00	5.326.416.902,00	(471.436.202,00)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bima Karya Sejahtera
5	PDAM	100,00%	26.699.805.921,64	26.006.543.958,42	693.261.963,22	Peraturan Daerah No. 6 tanggal 13 Mei Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II Bima
J u m l a h			39.808.363.738,44	36.730.968.808,77	3.077.394.929,67	

Tabel 5.79
Perhitungan Nilai Investasi Permanen - Metode Biaya Tahun 2022

No	BUMD	Prosesntasi Kepemilikan Saham	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Naik/ (turun)	Akta Notaris Pendirian/Dasar Pendirian
1	PT. Bank NTB	4,93%	39.418.260.000,00	37.918.260.000,00	1.500.000.000,00	-
2	PT. Jamkrida	5,49%	1.800.000.000,00	1.500.000.000,00	300.000.000,00	Akta Notaris No. 24 tanggal 15 Oktober 2012
3	PD. BPR NTB	4,34%	6.191.055.222,00	11.622.665.395,03	(5.431.610.173,03)	Akta Notaris No. 168 tanggal 10 Maret 2022
Jumlah			47.409.315.222,00	51.040.925.395,03	(3.631.610.173,03)	

5.3.3 PROPERTI INVESTASI	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	35.758.179.629,50	1.775.825.126.383,90

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau dtserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.758.179.629,50, sementara nilai Properti Investasi per 31 Desember 2021 belum ada karena Properti Investasi mulai diakui pada Tahun 2022. Properti investasi tersebut berupa Tanah Sewa Lelang Tahunan sejumlah 1.884 bidang tanah dengan luas 8.552.186 m².

5.3.4 ASET TETAP	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	4.248.687.495.468,22	4.109.431.108.074,96

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bima terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.248.687.495.468,22 mengalami peningkatan sebesar Rp139.256.387.393,26 atau 3,28% dari nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.109.431.108.074,96, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80
Jumlah Aset Tetap

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Jumlah Aset Tetap	4.248.687.495.468,22	4.109.431.108.074,96
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.590.816.814.411,21)	(1.453.747.786.464,58)
Jumlah Nilai Buku Aset Tetap		2.657.870.681.057,02	2.655.683.321.610,37

Nilai Aset Tetap yang diuraikan berikut merupakan mutasi tambah dan kurang hasil rekonsiliasi Bidang Aset BPKAD Kabupaten Bima TA. 2022 yaitu antara lain :

Tabel 5.81
Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Aset Tetap 2021 (Rp)	Mutasi Tambah TA 20212 (Rp)	Mutasi Kurang TA 2022 (Rp)	Total Aset Tetap TA 2022 (Rp)
1.	Tanah	526.662.409.215,17	9.214.037.975,00	72.859.932.629,50	463.016.514.560,67
2.	Peralatan dan Mesin	563.838.079.828,11	92.285.007.431,47	19.188.317.561,06	636.934.769.698,53
3.	Gedung dan Bangunan	1.372.072.186.909,88	177.377.611.279,00	70.857.199.924,46	1.478.592.598.264,42
4.	Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan	1.489.695.673.078,47	116.022.155.920,27	33.530.904.590,00	1.572.186.924.408,74
5.	Aset Tetap Lainnya	69.912.320.456,24	2.316.388.248,00	543.229.000,00	71.685.479.704,24
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	87.250.438.587,09	28.101.354.315,00	89.080.584.070,45	26.271.208.831,63
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.453.747.786.464,58)	(168.935.626.134,70)	(31.866.598.188,07)	(1.590.816.814.411,21)
Jumlah		2.655.683.321.610,38	256.380.929.034,04	254.193.569.587,40	2.657.870.681.057,02

Rincian nilai Aset Tetap masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

5.3.4.1 Aset Tetap Tanah	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	<u>463.016.514.560,67</u>	<u>526.662.409.215,17</u>

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp463.016.514.560,67 mengalami penurunan sebesar Rp63.645.894.654,50 atau 12,08% dari nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp526.662.409.215,17. Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Tanah pada Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.82
Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Tanah Pada Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
Mutasi Tambah			
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.226.152.975	Belanja Modal APBD
2	Dinas Lingkungan Hidup	57.600.000	Hibah Dari Pemerintah Desa untuk Pembangunan Bangunan Gedung Onlimo di Desa Tente
		5.625.665.000	Mutasi dari BPKAD ke Bappenda dan Setda ke DLH
3	Sekretariat Daerah	304.620.000	Hasil Inventaris Tanah Pertanian berlokasi di Kota Bima Bersama PemKot dan diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Juni 2022 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 032/035/07.3/2022
Jumlah		9.214.037.975,00	
Mutasi Kurang			
1	Sekretariat DPRD	3.639.414.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
		5.625.665.000	Mutasi dari BPKAD ke Bappenda dan Setda ke DLH
2	Sekretariat Daerah	35.758.179.630	Aset Properti
3	Sekretariat Daerah	1.535.000.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	223.300.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	304.500.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
6	Dinas Perhubungan	600.000.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	599.000.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.259.078.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.064.450.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	276.500.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	923.640.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	605.040.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
13	Badan Pendapatan Daerah	706.480.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
14	Inspektorat	805.000.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.519.200.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
16	Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindung Masyarakat	1.827.500.000	Aset Tanah yang direklasifikasi karena telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023
17	Dinas Pertanian dan Perkebunan	974.000.000	Aset Tanah yang telah diserahkan pada Komando Resot Militer 162/Wira Bhakti pada Bulan November 2022 berdasarkan dokumen BAST Nomor 903/173/07.3/2022
18	Sekretariat Daerah	7.166.370.000	Aset Tanah yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Juni 2022 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 032/035/07.3/2022
19	Dinas Kesehatan	2.764.800.000	Aset Tanah yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Juni 2022 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 032/035/07.3/2023
20	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.654.516.000	Aset Tanah yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Juni 2022 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 032/035/07.3/2024
21	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	1.028.300.000	Aset Tanah yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Juni 2022 berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 032/035/07.3/2024
Jumlah		72.859.932.629,50	

Dari sejumlah Aset Tanah tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a. 1 (satu) bidang tanah dalam sengketa, yaitu tanah yang dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Bima karena adanya gugatan dari Pihak Ketiga atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bima yang telah bersertifikat berupa tanah Fasilitas umum (Tanah Taman Panda) dengan nomor perkara 5/PDT.G/2023/PN.Rbi.
- b. 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) bidang tanah yang sudah bersertifikat dengan luas 7.315.361,82 m² senilai Rp232.494.507.385,67 yang terdiri dari tanah bangunan pendidikan, dan tanah bangunan kantor, tanah pertanian dan perkebunan.
- c. 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) bidang tanah yang sudah bersertifikat dengan luas 3.099.877,45 m² senilai Rp230.522.007.175,00 yang terdiri dari tanah bangunan pendidikan, dan tanah bangunan kantor, tanah pertanian dan perkebunan serta tanah ruas jalan dan tanah bangunan air.
- d. 354 (tiga ratus lima puluh empat) bidang tanah yang masih bersertifikat atas nama pihak lain dengan luas 182.757,00 m² senilai Rp39.694.231.839,00 yang terdiri dari tanah bangunan pendidikan, dan tanah bangunan kantor, tanah pertanian dan perkebunan serta tanah ruas jalan dan tanah bangunan air.
- e. 42 (empat puluh dua) bidang tanah dalam proses pengurusan sertifikat di BPN Bima dengan luas 212.393,21 m² senilai Rp15.517.381.119,00 yang terdiri dari tanah bangunan pendidikan, dan tanah bangunan kantor, tanah pertanian dan perkebunan serta tanah ruas jalan dan tanah bangunan air.

5.3.4.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

2022 (Rp)	2021 (Rp)
636.934.769.698,53	563.838.079.828,11

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp636.934.769.698,53 mengalami penurunan sebesar Rp73.096.689.870,42 atau 11,48% dari nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp563.838.079.828,11. Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.83
Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pada Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
Mutasi Tambah			
1	Sekretariat Daerah	12.050.000,00	Mutasi Antara OPD
2	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.384.235.000,00	Mutasi Antara OPD
3	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.055.111.273,32	Mutasi Antara OPD
4	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	15.660.000,00	Mutasi Antara OPD
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15.475.000,00	Mutasi Antara OPD
6	Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	4.528.032.042,15	Mutasi Antara OPD
7	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.150.000,00	Belanja BOS TK Negeri yang menghasilkan Aset Tetap (Lemari Arsip dan Printer)
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	301.395.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Pemeliharaan Bangunan (Peralatan Rumah Potong Hewan dan Mebel)
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10.000.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (Pengadaan TV LED)
10	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	4.862.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (SP2D LS Belanja Pengadaan Wireless Sound Speaker)
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.992.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (Pengadaan TV LED)
12	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.946.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (Belanja Modal Audio Visual (Pengadaan Wireless))
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.000.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (Belanja Modal Audio Visual (Wareless))
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan	109.202.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (Belanja Modal Audio Visual (Pengadaan Wireless))
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.100.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (pengadaan wireless VB)
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.500.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (Pengadaan Mic Wireless 1 (satu))
17	Dinas Kesehatan	17.500.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (Pengadaan CCTV, Digital LED dan Proyektor)
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	37.770.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (Interior Ruang Partisi dan Pengadaan 1 (satu) Unit Infocus, 1 (satu) Unit Layar Infocus/Screen 96 Inci, 1 (satu) Unit Layar Monitor 23 Inci & 1 (satu) Unit TV 32 Inci)

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
19	Sekretariat Daerah	338.875.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (Audio Visual (Kamera) dan Pengadaan POT Bunga)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.536.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (Pengadaan LCD Proyektor/Infokus)
21	Sekretariat DPRD	3.996.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Yang dianggarkan pada Belanja Aset Tetap lainnya (Belanja Modal Audio Visual/Speaker Wireless)
22	Sekretariat DPRD	372.559.500,00	Belanja Modal APBD
23	Sekretariat Daerah	4.544.950.744,00	Belanja Modal APBD
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.650.000,00	Belanja Modal APBD
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	156.212.000,00	Belanja Modal APBD
26	Kecamatan Ambalawi	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
27	Kecamatan Belo	13.000.000,00	Belanja Modal APBD
28	Kecamatan Bolo	12.000.000,00	Belanja Modal APBD
29	Kecamatan Donggo	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
30	Kecamatan Lambitu	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
31	Kecamatan Lambu	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
32	Kecamatan Langgudu	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
33	Kecamatan Madapangga	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
34	Kecamatan Monta	20.000.000,00	Belanja Modal APBD
35	Kecamatan Palibelo	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
36	Kecamatan Parado	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
37	Kecamatan Sanggar	13.000.000,00	Belanja Modal APBD
38	Kecamatan Sape	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
39	Kecamatan soromandi	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
40	Kecamatan Tambora	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
41	Kecamatan Wawo	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
42	Kecamatan Wera	16.000.000,00	Belanja Modal APBD
43	Kecamatan Woha	10.000.000,00	Belanja Modal APBD
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.000.000,00	aset tetap HDD eksternal sebanyak 3 unit pada belanja jasa konsultan
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.006.715.000,00	Belanja Modal APBD
46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	312.322.000,00	Belanja Modal APBD
47	Dinas Perhubungan	1.569.538.414,00	Belanja Modal APBD
48	Dinas Kesehatan	20.852.352.931,00	Belanja Modal APBD
49	Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	23.356.763.018,00	Belanja Modal APBD
50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	693.091.000,00	Belanja Modal APBD
51	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	15.150.840.975,00	Belanja Modal APBD
52	Dinas Sosial	11.802.000,00	Belanja Modal APBD
53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.814.000,00	Belanja Modal APBD

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
54	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	364.254.000,00	Belanja Modal APBD
55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	104.717.400,00	Belanja Modal APBD
56	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.310.880.786,00	Belanja Modal APBD
57	Dinas Kelautan dan Perikanan	208.051.000,00	Belanja Modal APBD
58	Dinas Ketahanan Pangan	69.885.000,00	Belanja Modal APBD
59	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	221.821.000,00	Belanja Modal APBD
60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	51.600.000,00	Belanja Modal APBD
61	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	64.309.000,00	Belanja Modal APBD
62	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	123.493.000,00	Belanja Modal APBD
63	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300.620.000,00	Belanja Modal APBD
64	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	157.654.000,00	Belanja Modal APBD
65	Inspektorat	88.500.000,00	Belanja Modal APBD
66	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	418.239.690,00	Belanja Modal APBD
67	Dinas Lingkungan Hidup	1.365.640.000,00	Belanja Modal APBD
68	Dinas Pariwisata	103.474.750,00	Belanja Modal APBD
69	Satuan Polisi Pamong Praja	494.043.000,00	Belanja Modal APBD
70	Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindung Masyarakat	56.439.000,00	Belanja Modal APBD
71	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	190.562.000,00	Belanja Modal APBD
72	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	114.966.000,00	Belanja Modal APBD
73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.651.000,00	Belanja Modal APBD
74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	178.232.700,00	Hibah dari pusat (Mobil) no. dok 984/BNPB/9/2018
75	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.910.975.208,00	Hibah dari pusat (Mobil Pemadam Kebakaran) no. dok 984/BNPB/9/2018
Jumlah		92.285.007.431,47	
No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
Mutasi Kurang			
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.384.235.000,00	Mutasi Antar OPD
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.050.000,00	Mutasi Antar OPD
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.055.111.273,32	Mutasi Antar OPD
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.660.000,00	Mutasi Antar OPD
5	Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindung Masyarakat	15.475.000,00	Mutasi Antar OPD
6	Dinas Perhubungan	1.320.000.000,00	Usulan Penghapusan no. dok 032/048/07.3/2022
7	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	11.509.535,00	Usulan Penghapusan no. dok LP/B/52/XI/2022/SPKT/Polsek Rasanae Barat/Polres Bima Kota/Polda NTB
8	Dinas Sosial	292.793.000,00	Usulan Penghapusan no. dok 800/31/06.3/2022
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	177.876.284,74	Usulan Penghapusan no. dok 061/2122.a/06.7/2022
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	215.000.000,00	Usulan Penghapusan no. dok 032/048/07.3/2022
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.352.000,00	Usulan Penghapusan no. dok 032/471.1/06.12/XII/2022
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	455.195.699,00	Usulan Penghapusan no. dok 800/345/06.4/2022

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
13	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.297.374.316,00	Belanja Dana BOS Buku yang dianggarkan pada Belanja Peralatan dan Mesin
14	Dinas Lingkungan Hidup	99.000.000,00	Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan Yang dianggarkan dibelanja pada Belanja Peralatan dan Mesin (Bangunan Pelindung Onlino)
15	Sekretariat DPRD	9.400.000,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
16	Sekretariat Daerah	143.701.000,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.800.000,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
18	Kecamatan Belo	1.000.000,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
19	Kecamatan Wera	2.010.000,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
20	Dinas Kesehatan	201.249.847,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
21	Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	29.857.396,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.699.611,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
23	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.345.507.099,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.285.000,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.984.000,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
26	Dinas Pariwisata	7.992.000,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
27	Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindung Masyarakat	2.117.500,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
28	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	700.000,00	Belanja Modal dibawah nilai Kapitalisasi
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.000.000,00	Pengadaan 4 unit table untuk ketua kelompok tani
30	Dinas Perhubungan	1.217.700.000,00	Pengadaan Mobil dan Kapal Laut yang diserahkan ke Pemerintah Desa
31	Dinas Kesehatan	678.950.000,00	Pengadaan APD dan alat kesehatan habis pakai
32	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.079.571.500,00	Pengadaan meubel sekolah swasta
33	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.160.500,00	Pengadaan obat ternak (vaksin rabies)
Jumlah		19.188.317.561,06	

5.3.4.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

2022	2021
(Rp)	(Rp)
1.478.592.598.264,42	1.372.072.186.909,88

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.478.592.598.264,42 mengalami peningkatan sebesar Rp106.520.411.354,54 atau 7,76% dari nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 Rp1.372.072.186.909,88. Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.84
Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pada
Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
Mutasi Tambah			
1	Kecamatan Sape	77.100.000,00	Mutasi Antara OPD
2	Kecamatan Tambora	99.800.000,00	Mutasi Antara OPD
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.279.256.000,00	Mutasi Antara OPD
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.151.293.000,00	Mutasi Antara OPD
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	199.800.000,00	Mutasi Antara OPD
6	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.436.300.000,00	Mutasi Antara OPD
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.758.800.000,00	Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan Yang dianggarkan dibelanja Jalan Jaringan dan Irigasi (Pembuatan Rumah Penjaga dan Saung)
8	Dinas Lingkungan Hidup	99.000.000,00	Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan Yang dianggarkan dibelanja pada Belanja Peralatan dan Mesin (Pembangunan bangunan Onlino)
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176.900.000,00	Belanja Pemeliharaan yang Melebihi nilai Kapitalisasi
10	Dinas Kesehatan	6.524.690.000,00	Belanja Pemeliharaan yang Melebihi nilai Kapitalisasi
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.057.450.000,00	Belanja Pemeliharaan yang Melebihi nilai Kapitalisasi
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.640.748.000,00	Belanja Pemeliharaan yang Melebihi nilai Kapitalisasi
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	79.904.000,00	Belanja Pemeliharaan yang Melebihi nilai Kapitalisasi
14	Inspektorat	164.345.000,00	Belanja Pemeliharaan yang Melebihi nilai Kapitalisasi
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	78.513.511.187,09	Reklasifikasi KDP Bangunan
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.246.278.000,00	Reklasifikasi KDP Bangunan
17	Sekretariat Daerah	596.881.000,00	Belanja Modal APBD
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.834.956.000,00	Belanja Modal APBD
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	606.720.000,00	Belanja Modal APBD
20	Dinas Perhubungan	1.235.144.022,00	Belanja Modal APBD
21	Dinas Kesehatan	3.854.957.900,00	Belanja Modal APBD
22	Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	21.560.617.167,00	Belanja Modal APBD
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	771.627.000,00	Belanja Modal APBD
24	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	27.936.644.190,00	Belanja Modal APBD
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	199.400.000,00	Belanja Modal APBD
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.090.200.000,00	Belanja Modal APBD
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	673.830.000,00	Belanja Modal APBD
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	98.781.000,00	Belanja Modal APBD
29	Inspektorat	149.280.000,00	Belanja Modal APBD
30	Dinas Lingkungan Hidup	493.872.000,00	Belanja Modal APBD
31	Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindung Masyarakat	29.765.000,00	Belanja Modal APBD
32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	428.088.812,91	Kelebihan Pembayaran Atas KDP Tahun Sebelumnya
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	111.672.000,00	Kelebihan Pembayaran Atas KDP Tahun Sebelumnya
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	Pembangunan Rumah Singgah Kec. Tambora
Jumlah		177.377.611.279,00	

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
Mutasi Kurang			
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.655.956.000,00	Mutasi Antar OPD
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.151.293.000,00	Mutasi Antar OPD
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.436.300.000,00	Mutasi Antar OPD
4	Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	434.088.682,82	Belanja Peralatan pada pembangunan di RSUD
5	Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	3.555.516.148,64	Belanja Peralatan pada pembangunan di RSUD
6	Sekretariat DPRD	6.097.872.030,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.012.356.000,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	653.126.500,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
9	Dinas Perhubungan	602.000.000,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.484.735.500,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.158.650.000,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023)berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.366.987.449,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	275.590.000,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	496.951.680,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	864.498.000,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
16	Badan Pendapatan Daerah	130.000.000,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
17	Inspektorat	1.300.905.000,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.732.335.000,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
19	Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindung Masyarakat	923.079.500,00	(Mereklasifikasi Aset Bangunan dan Gedung yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Bima pada Januari 2023) berdasarkan dokumen BAST PemKab dengan Pemkot Nomor BAST Nomor: 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023)
20	Sekretariat Daerah	199.000.000,00	SP2D LS Belanja Modal Taman Berupa Pengadaan Pot Bunga Pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam TA. 2022 Pada CV. Vony Perdana
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.970.000,00	Mutasi ke KIB B
22	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.808.338.200,00	Pembangunan MCK
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	749.000.000,00	Belanja Tanah Urug
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	245.750.000,00	Belanja Tanah Urug
25	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.025.734.000,00	Pembangunan Sekolah Swasta
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	854.600.000,00	Pembangunan Bank Pakan
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98.240.000,00	Belanja Tanah Urug
28	Dinas Lingkungan Hidup	493.872.000,00	Belanja Persediaan yang dianggarkan pada Belanja modal Bangunan dan gedung
29	Dinas Perhubungan	1.036.144.022,00	Reklasifikasi KDP Bangunan
30	Dinas Kesehatan	8.785.438.000,00	Reklasifikasi KDP Bangunan
31	Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	9.405.000.000,00	Reklasifikasi KDP Bangunan
32	Sekretariat Daerah	854.990.000,00	Penyerahan Ke Pemerintah Kota Bima
33	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.430.728.400,00	Penyerahan Ke Pemerintah Kota Bima

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	334.279.000,00	Penyerahan Ke Pemerintah Kota Bima
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.600.000,00	Penyerahan Ke Pemerintah Kota Bima
36	Dinas Kesehatan	6.035.135.812,00	Penyerahan Ke Pemerintah Kota Bima
37	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	659.510.000,00	Penyerahan Ke Pemerintah Kota Bima
38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	360.630.000,00	Penghapusan
Jumlah		70.857.199.924,46	

5.3.4.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	1.572.186.924.408,74	1.489.695.673.078,47

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.572.186.924.408,74 mengalami peningkatan sebesar Rp82.491.251.330,27 atau 5,25% dari nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.489.695.673.078,47. Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan pada Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.85
Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan Pada Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
Mutasi Tambah			
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	189.560.000,00	Belanja Jalan Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan pada Belanja yang diserahkan pada masyarakat (Pek. Peningkatan Jalan Langgudu Selatan)
2	Dinas Kesehatan	9.927.285.000,00	Belanja Listrik tenaga Surya yang dianggarkan di belanja barang habis pakai (SP2D LS Pengadaan Prasarana Listrik (Tenaga Surya) Pembayaran Angsuran Keseluruhan Sebesar 100 % pada CV. Perjuangan)
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	217.852.449,00	Belanja Pemeliharaan yang Melebihi nilai Kapitalisasi
4	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.808.338.200,00	Belanja Pembangunan MCK yang dianggarkan pada Belanja Banguna dan gedung
5	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	193.496.000,00	Pengalihan atau Penyerahan BMD JJI
6	Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	687.798.719,44	Pengalihan atau Penyerahan BMD JJI
7	Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	434.088.682,82	Pengadaan Dari APBD JJI
8	Sekretariat Daerah	148.874.000,00	Belanja Modal
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.010.792.869,00	Belanja Modal
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.708.720.000,00	Belanja Modal
11	Dinas Kesehatan	1.396.650.000,00	Belanja Modal
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	149.700.000,00	Belanja Modal
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	149.000.000,00	Belanja Modal
Jumlah		116.022.155.920,27	

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
Mutasi Kurang			
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.523.800,00	Penghapusan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.323.736.270,00	Direklasifikasi KDP JJI
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.674.074.000,00	Direklasifikasi ke persediaan yang diserahkan ke masyarakat (Jalan desa)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.898.280.000,00	Direklasifikasi ke persediaan yang diserahkan ke masyarakat (pokir DPRD)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.758.800.000,00	Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan Yang dianggarkan dibelanja Jalan Jaringan dan Irigasi
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.677.994.520,00	Rusak Berat
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	193.496.000,00	Mutasi Antar OPD
Jumlah		33.530.904.590,00	

5.3.4.5 Aset Tetap Lainnya	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	71.685.479.704,24	69.912.320.456,24

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.685.479.704,24 mengalami peningkatan sebesar Rp1.773.159.248,00 atau 2,47% dari nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp69.912.320.456,24. Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Lainnya pada Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.86
Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya
Pada Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
Mutasi Tambah			
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.297.374.316,00	Belanja Dana BOS Buku yang dianggarkan pada Belanja Peralatan dan Mesin
2	Sekretariat DPRD	3.996.000,00	Realisasi Belanja Modal
3	Sekretariat Daerah	139.875.000,00	Realisasi Belanja Modal
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.536.000,00	Belanja Modal
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.800.000,00	Belanja Modal
6	Dinas Kesehatan	17.500.000,00	Belanja Modal
7	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	475.784.932,00	Belanja Modal
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.100.000,00	Belanja Modal
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.500.000,00	Belanja Modal
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	109.202.000,00	Belanja Modal
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.000.000,00	Belanja Modal
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.992.000,00	Belanja Modal
13	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	121.866.000,00	Belanja Modal
14	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	4.862.000,00	Belanja Modal

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10.000.000,00	Belanja Modal
Jumlah		2.316.388.248,00	
No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
Mutasi Kurang			
1	Sekretariat DPRD	3.996.000,00	Belanja Modal Audio Visual/Speaker Wireless
2	Sekretariat Daerah	139.875.000,00	Belanja Modal Audio Visual (Kamera) dan Pengadaan POT Bunga
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.536.000,00	Belanja Modal LCD Proyektor/Infokus
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.800.000,00	Interior Ruangan Partisi dan Pengadaan 1 (satu) Unit Infocus, 1 (satu) Unit Layar Infocus/Screen 96 Inchi, 1 (satu) Unit Layar Monitor 23 Inchi & 1 (satu) Unit TV 32 Inchi
5	Dinas Kesehatan	17.500.000,00	Belanja Modal CCTV, Digital LED dan Proyektor
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.100.000,00	Belanja Modal wireless VB
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.500.000,00	Belanja Modal Mic Wireless 1 (satu)
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan	109.202.000,00	Belanja Modal Audio Visual (Pengadaan Wireless)
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.000.000,00	Belanja Modal Audio Visual (Wareles)
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.992.000,00	Belanja Modal TV LED
11	Badan Pendapatan Daerah	121.866.000,00	Belanja Modal Audio Visual (Pengadaan Wireless)
12	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	4.862.000,00	Belanja Modal Wireless Sound Speaker
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10.000.000,00	Belanja Modal TV LED
Jumlah		543.229.000,00	

5.3.4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	26.271.208.831,63	87.250.438.587,09

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan jumlah dari kelompok Aset Tetap yang telah dibayar kepada Pihak Ke-tiga sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan dan secara fisik belum selesai seluruhnya. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.271.208.831,63 mengalami penurunan sebesar Rp60.979.229.755,46 atau 69,89% dari nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp87.250.438.587,09. Rincian mutasi tambah dan kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.87
Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pada Perangkat Daerah TA. 2022

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Penjelasan
Mutasi Tambah			
1	Dinas Perhubungan	1.036.144.022,00	KDP (Pekerjaan Fisik bangunan uji kendaraan Belum 100%)
2	Dinas Kesehatan	8.785.438.000,00	KDP (Pekerjaan Fisik bangunan ruang operasi RSUD Sondasia Belum 100%)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	9.405.000.000,00	KDP (Pekerjaan Fisik bangunan Rawat Inap RSUD Belum 100%)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.615.736.270,00	Utang
5	Dinas Perhubungan	236.111.322,20	Utang
6	Dinas Perhubungan	22.924.700,80	Utang
Jumlah		28.101.354.315,00	
Mutasi Kurang			
1	Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	972.515.893,52	Belanja Peralatan pada pembangunan di RSUD
2	Rumah Sakit Umum Daerah Selaku BLUD	687.798.719,44	Belanja Peralatan pada pembangunan di RSUD
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.246.278.000,00	Reklasifikasi Antar KIB KDP (Kantor Perpustakaan)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	78.513.511.187,09	Reklasifikasi KDP KDP
5	Dinas Kesehatan	635.960.720,40	Pelaksanaan dari Perjanjian Kontrak KDP
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.519.550,00	Pembayaran hutang fisik atas pekerjaan pembangunan jembatan sondasia
Jumlah		89.080.584.070,45	

5.3.5 ASET LAINNYA	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	88.807.717.650,22	51.229.404.904,09

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2022 sebesar Rp88.282.959.475,55 mengalami peningkatan sebesar Rp37.053.554.571,46 atau 41,97% dari nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.229.404.904,09, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.88
Jumlah Aset Lainnya

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Aset Lainnya	88.282.959.475,55	51.701.203.371,42
2.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(524.758.174,67)	(471.798.467,33)
Jumlah Aset Lainnya Neto		87.758.201.300,88	51.229.404.904,09

Adapun rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.89
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	1.320.689.710,00	16.482.688.290,00
2.	Tuntutan Ganti Rugi	9.603.987.909,23	1.465.873.085,43
3.	Aset Tidak Berwujud	1.038.635.000,00	727.020.000,00
4.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(524.758.174,67)	(471.798.467,33)
5.	Aset Lain-lain	76.844.405.030,99	33.025.621.995,99
Jumlah		88.282.959.475,55	51.229.404.904,09

Rincian dan nilai per jenis Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.3.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran	1.320.689.710,00	16.482.688.290,00

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.482.688.290,00. Pada Tahun 2022, ada koreksi tambah atas nilai Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp551.995.940,00, sehingga menjadi sebesar Rp17.034.684.230,00. Namun terhadap nilai Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp17.034.684.230,00 tersebut, telah direklasifikasi ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp72.539.230,00 untuk mengakui nilai jatuh tempo 1 tahun pada Tahun 2023 dan telah diserahkan ke Pemerintah Kota Bima sebesar Rp15.641.455.290,00 pada Januari 2023 berdasarkan dokumen BAST Pemerintah Kabupaten Bima dengan Pemerintah Kota Bima Nomor : 134.4/007/07.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023, sehingga nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.320.689.710,00.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.3.5.2 Tuntutan Ganti Rugi	9.603.987.909,23	1.465.873.085,43

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan jumlah tagihan atas kerugian keuangan daerah dan kerugian keuangan negara yang telah diterbitkan dengan SKTJM. Dimana saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.465.873.085,43, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.90
Rincian Tuntutan Ganti Rugi

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Pengalihan atas Pajak yang belum disetor Bendahara Pengeluaran Dikpora	145.606.322,00
2.	Pengalihan atas Sisa UUDP TA 2014 yang belum disetor Bendahara Setda	33.077.400,00

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
3.	TGR Hasil Pemeriksaan BPK kepada Non Bendahara dan Pihak Ketiga	298.288.864,43
4.	TGR atas Kapitasi Puskesmas Lambu dan Donggo	465.574.757,00
5.	TGR Pajak yang dipungut tahun 2013 Bendahara Setda	67.073.525,00
6.	Hasil Tindak lanjut oleh Tim Inspektorat yang belum tercatat	456.252.217,00
Jumlah		1.465.873.085,43

Namun pada Tahun 2022 terdapat koreksi atas nilai TGR sesuai dengan Matriks TGR BPK Semester II 2022 sebesar Rp8.849.447.127,80. Dari nilai koreksi tersebut, terdapat double catat yang masuk kedalam bagian informasi kerugian sebesar Rp33.077.400,00 dan yang tidak dapat ditelusuri keyakinan nilainya sebesar Rp678.254.904,00, sehingga nilai netto dari Matriks TGR BPK Semester II 2022 menjadi sebesar Rp8.138.114.823,80. Dengan demikian, saldo TGR per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.603.987.909,23 (nilai netto dari Matriks TGR BPK Semester II 2022 sebesar Rp8.138.114.823,80 ditambah dengan saldo awal sebesar Rp1.465.873.085,43).

5.3.5.3 Aset Tidak Berwujud	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	1.038.635.000,00	727.020.000,00

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.038.635.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp311.615.000,00 atau 30% dari nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp727.020.000,00. Rincian Aset Tidak Berwujud pada Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.91
Rincian Aset Tidak Berwujud Pada Perangkat Daerah

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	219.700.000,00	219.700.000,00
2.	RSUD Bima	198.500.000,00	198.500.000,00
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44.000.000,00	44.000.000,00
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000.000,00	100.000.000,00
5.	Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	0,00	127.820.000,00
6.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	230.695.000,00	37.000.000,00
7.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	245.740.000,00	0,00
7.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(524.758.174,67)	(471.798.467,33)
Jumlah Aset Tak Berwujud Netto		513.876.825,33	255.221.532,67

5.3.5.4 Aset Lain-lain	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	76.844.405.030,99	33.025.621.995,99

Aset Lain-lain dicatat sebesar nilai bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.025.621.995,99. Namun pada Tahun 2022 terdapat koreksi terhadap nilai Aset Lain-lain yaitu :

- a. Koreksi kurang karena penghapusan Aset Tetap sebesar Rp4.035.078.584,00
- b. Koreksi tambah, karena :
 - Reklasifikasi nilai TGR yang tidak dapat ditelusuri nilainya sebesar Rp678.254.904,00.
 - Pengakuan pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF (BI) sebesar Rp5.936.263.639,00.
 - Reklasifikasi Aset Tetap Tanah yang diserahkan ke Pemerintah Kota Bima sebesar Rp16.888.102.000,00.
 - Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang diserahkan ke Pemerintah Kota Bima sebesar Rp8.709.785.786,00.
 - Reklasifikasi Tagihan Penjualan angsuran yang diserahkan ke Pemkot Bima sebesar Rp15.641.455.290,00.

Dengan adanya koreksi tambah/kurang tersebut, nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp76.844.405.030,99.

5.3.6 KEWAJIBAN	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	12.533.155.516,75	4.130.954.730,00

5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.533.155.516,75 mengalami peningkatan sebesar Rp8.402.200.786,75 atau 67,04% dari nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.130.954.730,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.92
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	229.683.132,00	215.772.687,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	5.218.652.707,75	0,00
3.	Utang Belanja	4.568.587.074,00	3.641.458.563,00

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.516.232.603,00	273.723.480,00
Jumlah		12.533.155.516,75	4.130.954.730,00

5.3.6.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	229.683.132,00	215.772.687,00

Nilai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp229.683.132,00 mengalami peningkatan sebesar Rp13.910.445,00 atau 6,06% dari nilai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp215.772.687,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.93
Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No.	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Pajak Sekretariat Daerah yang dialihkan ke TP/TGR	0,00	67.073.525,00
2.	RSUD Bima (BLUD)	7.663.195,00	3.092.840,00
3.	Sisa Pajak Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang dialihkan ke TPTGR	0,00	145.606.322,00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.340.090,00	0,00
5.	BPKAD Kabupaten Bima (menyesuaikan saldo awal Utang PFK akibat salah jurnal Unaudited Utang PFK BPKAD Kabupaten Bima).	145.606.322,00	0,00
6.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bima (Untuk menyesuaikan saldo awal Utang PFK akibat salah jurnal Unaudited Utang PFK).	67.073.525,00	0,00
Jumlah		229.683.132,00	215.772.687,00

5.3.6.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	5.218.652.707,75	0,00

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.218.652.707,75, sementara nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.94
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
14.	RSUD Bima	1.666.667,00	0,00
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.216.986.040,75	0,00
Jumlah		5.218.652.707,75	3.641.458.563,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.3.6.1.3 Utang Belanja	4.568.587.074,00	3.641.458.563,00

Nilai Utang Beban per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.568.587.074,00 mengalami peningkatan sebesar Rp927.128.511,00 atau 20,29% dari nilai Utang Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.641.458.563,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.95
Rincian Utang Belanja

No.	Nama Perangkat Daerah	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	868.552.080,00	625.458.008,00
2.	Dinas Kesehatan	291.516.870,00	199.336.142,00
3.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.357.451,00	4.856.076,00
4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	0,00
5.	Dinas Pariwisata	0,00	2.407.373,00
6.	Kecamatan Bolo	0,00	4.440.212,00
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.456.442,00	14.304.885,00
8.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.649.654,00	43.222.115,00
9.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	119.866.076,00	114.373.843,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	50.658.788,00	12.936.017,00
11.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20.176.122,00	20.863.589,00
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.266.242,00	2.178.730,00
13.	Sekretariat Daerah	0,00	34.149.424,00
14.	RSUD Bima	3.055.329.517,00	2.445.293.396,00
15.	Dinas Sosial	0,00	6.594.033,00
16.	Dinas Perhubungan	2.090.000,00	6.392.920,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	1.753.980,00
18.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	2.665.754,00
19.	Dinas Lingkungan Hidup	2.519.937,00	0,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.841.921,00	17.010.502,00
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.852.321,00	7.852.321,00
22.	Inspektorat	8.889.040,00	8.889.040,00
23.	Kecamatan Wera	0,00	2.659.130,00
24.	Kecamatan Donggo	6.422.653,00	6.422.653,00
25.	Kecamatan Wawo	2.967.111,00	0,00
26.	Kecamatan Wera	2.659.130,00	0,00
27.	Kecamatan Ambalawi	7.762.088,00	0,00
28.	Kecamatan Lambitu	2.820.846,00	0,00
29.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.187.689,00	11.515.100,00
30.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	9.210.317,00	11.557.712,00
31.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.511.766,00	2.592.659,00
33.	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	16.608.604,00
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	8.003.807,00
35.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	7.120.538,00
36.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.791.852,00	0,00
37.	Dinas Koperasi dan UMKM	5.216.400,00	0,00
38.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.014.761,00	0,00
Jumlah		4.568.587.074,00	3.641.458.563,00

5.3.6.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	2.516.232.603,00	273.723.480,00

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya atas Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.516.232.603,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.242.509.123,00 atau 89,12% dari nilai Utang Jangka Pendek Lainnya atas Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp273.723.480,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.96
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Atas Pihak Ketiga

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	40.583.000,00	40.583.000,00
2.	Sekretariat Daerah	410.930,00	410.930,00
3.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.950.000,00	9.950.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.292.000.000,00	214.079.550,00
5.	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	8.700.000,00
6.	RSUD Bima	502.731.050,00	0,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00
8.	Dinas Perhubungan	259.036.023,00	0,00
9.	Sekretariat DPRD (Untuk mencatat reklasifikasi sisa utang pada pekerjaan Belanja Pakaian dan Atribut DPRD)	211.521.600,00	0,00
Jumlah		2.516.232.603,00	273.723.480,00

Penjelasan terhadap rincian Utang Pendek Lainnya atas Pihak Ketiga TA. 2022, sebagai berikut :

a. RSUD Bima atas belanja BMHP , pada :

- PT. Mitra Fajar Selaras sebesar Rp21.090.000,00
- CV. Bayu Bangun Sakti sebesar Rp43.592.640,00
- PT. Deka Arfindo Pratama sebesar Rp20.246.400,00
- PT. Milenium Pharmacon International Tbk sebesar Rp2.433.564,00
- PT. Transmedic Indonesia sebesar Rp9.193.820,00
- PT. Tri Sapta Jaya sebesar Rp14.291.993,00
- PT. Trinusa Darma Satha sebesar Rp35.398.918,00
- PT. Putra Restu Ibu sebesar Rp356.483.715,00

b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima, terdiri dari:

- Kegiatan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian (Pembangunan Masjid SP. 2 Tambora) oleh CV. Berkah sebesar Rp50.000.000,00 dengan Nomor SPK : 10/PPK.APBD-P/TRANS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

- Kegiatan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian (Pembangunan Rumah Singgah Tambora) oleh CV. Berkah sebesar Rp150.000.000,00 dengan Nomor SPK : 12/PPK.APBD-P/TRANS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

c. Dinas Perhubungan

Kegiatan Pembangunan Gedung Pengujian oleh CV. Putri Dalilah dengan Nomor Adendum Surat Perjanjian (Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan): 550/11/PPK-PGP/DISHUB/XII/2022, tanggal 19 Agustus 2022 atas Surat Perjanjian Nomor: 550/09/PPK-PGP/DISHUB/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp259.036.023,00

d. Sekretariat DPRD

Pengadaan Penyediaan Pakaian dan Atribut DPRD oleh ZEENS PENJAHIT dengan Nomor Kontrak :175/02/PPBJ-Setwan/XI/2022 senilai Rp211.521.600,00.

5.3.7 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	0,00	0,00

Keadaan per 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Bima tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.8 EKUITAS	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	2.930.077.812.654,65	2.910.020.422.052,91

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bima per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.930.077.812.654,65 mengalami peningkatan sebesar Rp20.057.390.601,74 atau 0,68% dari nilai ekuitas per 31 Desember 2022 senilai Rp2.910.020.422.052,91.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menggambarkan peningkatan/penurunan kinerja Pemerintah Kabupaten Bima selama 1 (satu) tahun anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

5.4.1 PENDAPATAN – LO	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	1.597.664.125.969,27	1.805.899.574.805,7

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Bima yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022 sebesar Rp1.597.664.125.969,27 dan realisasi TA. 2021 sebesar Rp1.805.899.574.805,70, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97
Realisasi Pendapatan-LO

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	141.136.209.185,27	164.136.626.935,70	(23.000.417.750,43)	(14,01)
Pendapatan Transfer	1.438.187.259.706,00	1.554.154.643.137,00	(116.467.383.431,00)	(7,49)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.340.657.078,00	87.608.304.733,00	(69.267.647.655,00)	(79,07)
Jumlah	1.597.664.125.969,27	1.805.899.574.805,70	(208.735.448.836,43)	(11,56)

Realisasi masing-masing komponen Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut :

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	141.136.209.185,27	164.136.626.935,70

Pendapatan Asli Daerah - LO TA. 2022 sebesar Rp141.136.209.185,27, dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.98
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	141.136.209.185,27	164.136.626.935,70	(23.000.417.750,43)	(14,01)
Pendapatan Transfer	1.438.187.259.706,00	1.554.154.643.137,00	(116.467.383.431,00)	(7,49)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.340.657.078,00	87.608.304.733,00	(69.267.647.655,00)	(79,07)
Jumlah	1.597.664.125.969,27	1.805.899.574.805,70	(208.735.448.836,43)	(11,56)

Realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO adalah sebagai berikut :

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.1 Pajak Daerah – LO	18.936.412.583,20	19.595.435.396,00

Pajak Daerah – LO TA. 2022 sebesar Rp18.936.412.583,20 merupakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Pajak – LRA yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bima selama TA. 2022 sebesar Rp16.013.801.499,00 ditambah dengan penambahan Piutang Pajak Daerah TA. 2022 sebesar Rp2.922.611.084,20. Pajak Daerah – LO TA. 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.99
Pajak Daerah - LO TA. 2022

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
PAJAK DAERAH – LO	18.936.412.583,20	19.595.435.396,00	(659.022.812,80)	(3,36)
Pajak Hotel-LO	134.668.050,00	61.691.951,00	72.976.099,00	118,29
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	134.668.050,00	61.691.951,00	72.976.099,00	118,29
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	134.668.050,00	61.691.951,00	72.976.099,00	118,29
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	263.310.251,00	45.738.800,00	217.571.451,00	475,68
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	119.331.855,00	45.738.800,00	73.593.055,00	160,90
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	119.331.855,00	45.738.800,00	73.593.055,00	160,90
Pajak Reklame Kain-LO	120.948.946,00	0,00	120.948.946,00	100,00
Pajak Reklame Berjalan-LO	120.948.946,00	0,00	120.948.946,00	100,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	23.029.450,00	0,00	23.029.450,00	100,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	23.029.450,00	0,00	23.029.450,00	100,00
Pajak Parkir-LO	4.505.000,00	1.200.000,00	3.305.000,00	275,41
Pajak Air Tanah-LO	4.505.000,00	1.200.000,00	3.305.000,00	275,41
Pajak Sarang Burung Walet-LO	4.505.000,00	1.200.000,00	3.305.000,00	275,41
Pajak Pasir dan Kerikil-LO	180.455.250,00	88.905.750,00	91.549.500,00	102,97
Pajak Tanah Liat-LO	135.245.950,00	88.905.750,00	46.340.200,00	52,12
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	135.245.950,00	88.905.750,00	46.340.200,00	52,12
PBBP2-LO	45.005.300,00	0,00	45.005.300,00	100,00
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	45.005.300,00	0,00	45.005.300,00	100,00
Pajak Reklame Berjalan-LO	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00
Pajak Reklame Berjalan-LO	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00
Pajak Penerangan Jalan-LO	12.387.162.800,00	9.017.309.972,00	3.369.852.828,00	37,37
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	0,00	9.017.309.972,00	(9.017.309.972,00)	(100,00)
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	0,00	9.017.309.972,00	(9.017.309.972,00)	(100,00)
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	12.387.162.800,00	0,00	12.387.162.800,00	100,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	12.387.162.800,00	0,00	12.387.162.800,00	100,00
Pajak Parkir-LO	49.711.400,00	47.493.000,00	2.218.400,00	4,67
Pajak Parkir-LO	49.711.400,00	47.493.000,00	2.218.400,00	4,67
Pajak Parkir-LO	49.711.400,00	47.493.000,00	2.218.400,00	4,67
Pajak Air Tanah-LO	48.077.000,00	28.392.000,00	19.685.000,00	69,33
Pajak Air Tanah-LO	48.077.000,00	28.392.000,00	19.685.000,00	69,33
Pajak Air Tanah-LO	48.077.000,00	28.392.000,00	19.685.000,00	69,33
Pajak Sarang Burung Walet-LO	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.173.355.885,20	717.334.975,00	456.020.910,20	63,57
Pajak Pasir dan Kerikil-LO	282.608.050,00	0,00	282.608.050,00	100,00
Pajak Pasir dan Kerikil-LO	282.608.050,00	0,00	282.608.050,00	100,00
Pajak Tanah Liat-LO	640.593.660,20	0,00	640.593.660,20	100,00
Pajak Tanah Liat-LO	640.593.660,20	0,00	640.593.660,20	100,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	250.154.175,00	717.334.975,00	(467.180.800,00)	(65,13)

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	250.154.175,00	717.334.975,00	(467.180.800,00)	(65,13)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	4.339.512.947,00	9.268.195.448,00	(4.928.682.501,00)	(53,18)
PBBP2-LO	4.339.512.947,00	9.268.195.448,00	(4.928.682.501,00)	(53,18)
PBBP2-LO	4.339.512.947,00	9.268.195.448,00	(4.928.682.501,00)	(53,18)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	355.024.000,00	319.173.500,00	35.850.500,00	11,23
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	355.024.000,00	319.173.500,00	35.850.500,00	11,23
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	355.024.000,00	319.173.500,00	35.850.500,00	11,23
Jumlah	18.936.412.583,20	19.595.435.396,00	(659.022.812,80)	(3,36)

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah – LO	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	13.658.516.958,25	18.087.350.460,00

Retribusi Daerah – LO TA. 2022 sebesar Rp13.658.516.958,25 merupakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Retribusi – LRA yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bima selama TA. 2022 sebesar Rp18.663.813.599,00 ditambah dengan Penetapan Piutang TA. 2022 sebesar Rp2.041.605.600,00 dikurangi realisasi Piutang TA. 2022 sebesar Rp1.055.657.500,00 dikurangi Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas lelang tanah sebesar Rp5.216.986.040,75. Retribusi Daerah – LO TA. 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.100
Realisasi Retribusi Daerah - LO

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
RETRIBUSI DAERAH – LO	13.658.516.958,25	18.087.350.460,00	(4.428.833.501,75)	(24,49)
Retribusi Jasa Umum-LO	11.458.514.392,00	9.863.750.342,00	1.594.764.050,00	16,16
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	9.343.784.192,00	7.881.872.242,00	1.461.911.950,00	18,55
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	9.287.858.692,00	6.428.712.725,00	2.859.145.967,00	44,47
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	55.925.500,00	1.363.514.517,00	(1.307.589.017,00)	(95,89)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	0,00	89.645.000,00	(89.645.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	101.465.000,00	96.317.500,00	5.147.500,00	5,34
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	101.465.000,00	96.317.500,00	5.147.500,00	5,34
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	19.777.000,00	8.995.000,00	10.782.000,00	119,86
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	19.777.000,00	8.995.000,00	10.782.000,00	119,86
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.221.136.600,00	1.155.130.000,00	66.006.600,00	5,71
Retribusi Kios-LO	1.221.136.600,00	1.155.130.000,00	66.006.600,00	5,71
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	7.275.000,00	0,00	7.275.000,00	100,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	7.275.000,00	0,00	7.275.000,00	100,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00	100,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00	100,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	756.001.600,00	721.435.600,00	34.566.000,00	4,79
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	756.001.600,00	721.435.600,00	34.566.000,00	4,79

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Jasa Usaha-LO	1.388.740.358,25	6.384.774.556,00	(4.996.034.197,75)	(78,25)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	921.583.458,25	6.034.973.056,00	(5.113.389.597,75)	(84,73)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	529.271.458,25	5.736.229.056,00	(5.206.957.597,75)	(90,77)
Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	64.000.000,00	159.700.000,00	(95.700.000,00)	(59,92)
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	287.720.000,00	45.140.000,00	242.580.000,00	537,39
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	8.000.000,00	32.704.000,00	(24.704.000,00)	(75,54)
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	32.592.000,00	61.200.000,00	(28.608.000,00)	(46,74)
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	55.392.400,00	54.150.000,00	1.242.400,00	2,29
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	55.392.400,00	54.150.000,00	1.242.400,00	2,29
Retribusi Terminal-LO	54.318.500,00	33.859.000,00	20.459.500,00	60,42
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	54.318.500,00	33.859.000,00	20.459.500,00	60,42
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	3.400.000,00	44.179.500,00	(40.779.500,00)	(92,30)
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	3.400.000,00	44.179.500,00	(40.779.500,00)	(92,30)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	14.405.000,00	200.000,00	14.205.000,00	7.102,50
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	14.405.000,00	200.000,00	14.205.000,00	7.102,50
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	110.760.000,00	116.900.000,00	(6.140.000,00)	(5,25)
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	110.760.000,00	116.900.000,00	(6.140.000,00)	(5,25)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	6.769.000,00	4.849.000,00	1.920.000,00	39,59
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	6.769.000,00	4.849.000,00	1.920.000,00	39,59
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	23.840.000,00	14.664.000,00	9.176.000,00	62,57
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	23.840.000,00	14.664.000,00	9.176.000,00	62,57
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	198.272.000,00	81.000.000,00	117.272.000,00	144,78
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	198.272.000,00	81.000.000,00	117.272.000,00	144,78
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	811.262.208,00	1.838.825.562,00	(1.027.563.354,00)	(55,88)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	777.747.208,00	1.802.341.736,00	(1.024.594.528,00)	(56,85)
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	777.747.208,00	1.802.341.736,00	(1.024.594.528,00)	(56,85)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	24.840.000,00	21.033.826,00	3.806.174,00	18,09
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	24.840.000,00	21.033.826,00	3.806.174,00	18,09
Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	8.675.000,00	15.450.000,00	(6.775.000,00)	(43,85)
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO	8.675.000,00	14.250.000,00	(5.575.000,00)	(39,12)
Jumlah	13.658.516.958,25	18.087.350.460,00	4.428.833.501,75	24,49

5.4.1.1.3 Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

2022	2021
(Rp)	(Rp)
9.101.091.549,67	5.875.428.663,41

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA. 2022 sebesar Rp9.101.091.549,67 merupakan pendapatan yang bersumber dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bima selama TA. 2022 sebesar Rp5.552.260.418,00 ditambah dengan kenaikan ekuitas atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebesar

Rp3.548.831.131,67. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA. 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.101
Realisasi Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	9.101.091.549,66	5.875.428.663,41	3.225.662.886,25	54,90
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	0,00	5.049.293.415,67	(5.049.293.415,67)	(100,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	0,00	5.049.293.415,67	(5.049.293.415,67)	(100,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	0,00	5.049.293.415,67	(5.049.293.415,67)	(100,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	9.101.091.549,66	826.135.247,74	8.274.956.301,92	1.001,64
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	9.101.091.549,66	826.135.247,74	8.274.956.301,92	1.001,64
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	9.101.091.549,66	826.135.247,74	8.274.956.301,92	1.001,64
Jumlah	9.101.091.549,67	5.875.428.663,41	3.225.662.886,26	54,90

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	99.440.188.094,15	120.578.412.416,29

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO TA. 2022 sebesar Rp99.440.188.094,15 merupakan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bima selama TA. 2022 sebesar Rp99.780.352.780,70 ditambah dengan Penetapan TA. 2022 sebesar Rp1.132.408.400,00, ditambah Jasa Giro Dana BOS TA 2022 sebesar Rp1.125.773,23, ditambah Penyesuaian sisa kas BOP PAUD Negeri yang diakui sebagai SILPA (LRA) dan Kas di Bendahara BOP PAUD (NERACA) berdasarkan memo dari Disdik kepada BPKAD sebesar Rp3.908.211,98, ditambah saldo rekening bank Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dan Puskesmas yang terdiri dari bendahara penerimaan penggunaan untuk menampung dana klaim BPJS (non kapitasi) (Dinas Kesehatan) dan bendahara pengeluaran pembantu rekening BOK Puskesmas (FKTP) sebesar Rp224.053.200,59, ditambah penerimaan remunerasi dari BI atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD sebesar

Rp1.439.724,46, ditambah koreksi pembayaran jasa giro Kas BOS Tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp31.710.276,52, ditambah sebesar Rp1.992.261,83, dikurangi realisasi Piutang TA. 2021 sebesar Rp1.297.067.144,00, dikurangi Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas ATM sebesar Rp1.666.667,00 dan dikurangi realisasi Piutang Penjualan Angsuran sebesar Rp175.279.000,00. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO TA. 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.102
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LO	99.440.188.094,15	120.578.412.415,99	(21.138.224.321,84)	(17,53)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	17.725.595.275,70	(17.725.595.275,70)	(100,00)
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	17.725.595.275,70	(17.725.595.275,70)	(100,00)
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	0,00	17.725.595.275,70	(17.725.595.275,70)	(100,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.450.000,00	1.108.890.000,00	(1.106.440.000,00)	(99,78)
Hasil Sewa BMD-LO	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	100,00
Hasil Sewa BMD-LO	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	100,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	0,00	1.108.890.000,00	(1.108.890.000,00)	(100,00)
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	0,00	1.108.890.000,00	(1.108.890.000,00)	(100,00)
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	224.053.200,59	0,00	224.053.200,59	100,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	224.053.200,59	0,00	224.053.200,59	100,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	224.053.200,59	0,00	224.053.200,59	100,00
Jasa Giro-LO	1.904.281.002,70	2.933.768.643,54	(1.029.487.640,84)	(35,09)
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.865.230.527,91	2.933.768.643,54	(1.068.538.115,63)	(36,42)
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.865.230.527,91	2.933.768.643,54	(1.068.538.115,63)	(36,42)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	1.992.261,83	0,00	1.992.261,83	100,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	1.992.261,83	0,00	1.992.261,83	100,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	35.618.488,50	0,00	35.618.488,50	100,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	35.618.488,50	0,00	35.618.488,50	100,00
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	1.439.724,46	0,00	1.439.724,46	100,00
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	1.439.724,46	0,00	1.439.724,46	100,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	1.449.993,00	17.166.678,00	(15.716.685,00)	(91,55)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	1.449.993,00	17.166.678,00	(15.716.685,00)	(91,55)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	1.449.993,00	17.166.678,00	(15.716.685,00)	(91,55)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	2.976.454.285,14	493.864.806,48	2.482.589.478,66	502,68
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	2.976.454.285,14	493.864.806,48	2.482.589.478,66	502,68
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	2.976.454.285,14	493.864.806,48	2.482.589.478,66	502,68
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	694.189.618,00	2.601.671.896,00	(1.907.482.278,00)	(73,32)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	694.189.618,00	2.601.671.896,00	(1.907.482.278,00)	(73,32)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	694.189.618,00	2.601.671.896,00	(1.907.482.278,00)	(73,32)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	658.776.388,86	0,00	658.776.388,86	100,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	658.776.388,86	0,00	658.776.388,86	100,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	658.776.388,86	0,00	658.776.388,86	100,00

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	10.938.327,00	235.694.433,00	(224.756.106,00)	(95,36)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	3.527.027,00	165.298.603,00	(161.771.576,00)	(97,86)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	3.527.027,00	165.298.603,00	(161.771.576,00)	(97,86)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	7.411.300,00	70.395.830,00	(62.984.530,00)	(89,47)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	7.411.300,00	70.395.830,00	(62.984.530,00)	(89,47)
Pendapatan dari BLUD-LO	74.102.672.278,86	73.239.461.733,27	863.210.545,59	1,18
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	74.102.672.278,86	73.239.461.733,27	863.210.545,59	1,18
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	74.102.672.278,86	73.239.461.733,27	863.210.545,59	1,18
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	18.858.923.000,00	22.222.298.950,00	(3.363.375.950,00)	(15,13)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	18.858.923.000,00	22.222.298.950,00	(3.363.375.950,00)	(15,13)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	18.858.923.000,00	22.222.298.950,00	(3.363.375.950,00)	(15,13)
Jumlah	99.440.188.094,15	120.578.412.416,29	(21.138.224.322,14)	(17,53)

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO	1.438.187.259.706,00	1.554.154.643.137,00

Pendapatan Transfer – LO TA. 2022 sebesar Rp1.438.187.259.706,00, dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.103
Rincian Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.360.163.186.937,00	1.269.627.636.325,00	90.535.550.612,00	7,13
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.986.471.000,00	227.084.884.000,00	(221.098.413.000,00)	(97,36)
3.	Transfer Antar Daerah	72.037.601.769,00	57.442.122.812,00	14.095.478.957,00	24,54
	Jumlah	1.438.187.259.706,00	1.554.154.643.137,00	(116.467.383.431,00)	(7,49)

Realisasi masing-masing komponen Pendapatan Transfer - LO adalah sebagai berikut :

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO	1.360.163.186.937,00	1.269.627.636.325,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO TA. 2022 sebesar Rp1.360.163.186.937,00 merupakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bima selama TA. 2022 sebesar Rp1.363.301.623.000,00 ditambah pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF (BI) sebesar Rp5.936.263.639,00, ditambah pemotongan DAU berdasarkan KMK 34/KM.7/2021 sebesar Rp 80.250.000,00, ditambah Penetapan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp 71.537.601.769,00, dikurangi transfer dana desa (non provinsi) sebesar Rp185.155.477.000,00, dikurangi Realisasi atas Piutang Tahun 2021 sebesar Rp5.629.153.000,00 dan dikurangi Realisasi Piutang Tahun 2022 sebesar Rp66.145.431.325,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO TA. 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.104
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	1.360.163.186.937,00	1.269.627.636.325,00	90.535.550.612,00	7,13
- Dana Bagi Hasil Pajak	76.166.011.723,00	44.414.924.345,00	31.751.087.378,00	71,49
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dana Alokasi Umum	835.225.095.639,00	832.682.655.000,00	2.542.440.639,00	0,31
- Dana Alokasi Khusus - Fisik	220.041.099.096,00	202.764.780.561,00	17.276.318.535,00	8,52
- Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	228.730.980.479,00	189.765.276.419,00	38.965.704.060,00	20,53

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya – LO	5.986.471.000,00	37.470.839.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya – LO TA. 2022 sebesar Rp5.986.471.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.484.368.000,00 dari TA. 2021 sebesar Rp37.470.839.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya – LO TA. 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.105
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.986.471.000,00	227.084.884.000,00	(221.098.413.000,00)	(97,36)
- Dana Alokasi Desa	0,00	189.614.045.000,00	(189.614.045.000,00)	(100,00)
- Dana Insentif Daerah	5.986.471.000,00	37.470.839.000,00	(31.484.368.000,00)	(84,02)

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	72.037.601.769,00	57.442.122.812,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO TA. 2022 sebesar Rp72.037.601.769,00 merupakan pendapatan yang bersumber dari Transfer Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bima selama TA. 2022 dari pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp71.537.601.769,00 dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Daerah Lainnya sebesar Rp500.000.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.106
Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Dana Transfer Pemerintah Provinsi	72.037.601.769,00	57.442.122.812,00	14.595.478.957,00	25,41
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	71.537.601.769,00	57.442.122.812,00	14.095.478.957,00	24,54
- Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Daerah Lainnya	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	100,00

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	18.340.657.078,00	87.608.304.733,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA. 2022 sebesar Rp18.340.657.078,00 mengalami penurunan sebesar Rp69.267.647.655,00 dari TA. 2021 sebesar Rp87.608.304.733,00

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	18.340.657.078,00	18.560.834.733,00

Pendapatan Hibah – LO TA. 2022 sebesar Rp18.340.657.078,00 mengalami penurunan sebesar Rp220.177.655,00 dari TA. 2021 sebesar Rp18.560.834.733,00, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.107
Realisasi Pendapatan Hibah – LO

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hibah	18.340.657.078,00	18.560.834.733,00	(220.177.655,00)	(1,19)

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	69.047.470.000,00

Pendapatan Lainnya – LO TA. 2022 sebesar Rp0,00 dan TA. 2021 sebesar Rp69.047.470.000,00.

Tabel 5.108
Realisasi Pendapatan Lainnya Hibah Dana BOS - LO

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Lainnya	0,00	69.047.470.000,00	(69.047.470.000,00)	(100,00)
- Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dana Alokasi Desa dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dana BOS	0,00	69.047.470.000,00	(69.047.470.000,00)	(100,00)

5.4.1 BEBAN

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan nilai ekuitas. Beban Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.109
Rincian Beban - LO

Uraian	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Operasi	1.317.695.081.918,45	1.160.112.387.204,80	157.582.694.713,65	13,58
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	151.760.231.317,72	131.699.134.751,75	20.061.096.565,97	15,23
Beban Transfer	100.190.229.455,00	288.871.544.698,00	(188.681.315.243,00)	(65,32)
Beban Tak Terduga	11.946.886.392,00	-	11.946.886.392,00	100,00
Jumlah	1.581.592.429.083,17	1.580.683.066.654,55	909.362.428,62	0,06

Penjelan atas rincian Beban – LO diuraikan sebagai berikut :

5.4.1.1 BEBAN OPERASI	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	1.317.695.081.918,45	1.160.112.387.204,80

Beban Operasi TA. 2022 sebesar Rp1.317.695.081.918,45, dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.110
Rincian Beban Operasi

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	750.789.280.221,00	749.729.275.324,00	1.060.004.897,00	0,14
Beban Barang dan Jasa	487.305.927.782,56	357.182.906.630,40	130.123.021.152,16	36,43
Beban Hibah	55.339.991.867,00	45.190.722.150,00	10.149.269.717,00	22,46
Beban Bantuan Sosial	16.254.498.500,00	0,00	16.254.498.500,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang	2.099.905.922,73	5.894.381.236,43	(3.794.475.313,70)	(64,37)

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Dana Bergulir	2.431.250,13	2.083.331,90	347.918,23	16,70
Beban Transfer dan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penghapusan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Investasi	5.903.046.375,03	2.113.018.532,07	3.790.027.842,96	179,37
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.317.695.081.918,45	1.160.112.387.204,80	157.582.694.713,65	13,58

5.4.1.1.1 Beban Pegawai	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	750.789.280.221,00	749.729.275.324,00

Beban Pegawai TA. 2022 sebesar Rp750.789.280.221,00 merupakan beban dari Belanja Pegawai sebesar Rp749.862.151.710,00, ditambah utang Belanja Pegawai sebesar Rp3.528.220.055,00, dikurangi lebih saji Realisasi Beban Pegawai sebesar Rp161.000,00 dan dikurangi pembayaran Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.601.091.544,00. Rincian Beban Pegawai TA. 2022 pada masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.111
Rincian Beban Pegawai pada Masing-Masing Perangkat Daerah

No.	Beban Pegawai	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	395.780.025.319,00	406.736.398.422,00	(10.956.373.103,00)	(2,69)
2.	Dinas Kesehatan	59.102.434.365,00	56.233.442.762,00	2.868.991.603,00	5,10
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	59.472.218.671,00	49.691.306.005,00	9.780.912.666,00	19,68
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.153.918.416,00	11.664.899.719,00	489.018.697,00	4,19
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.254.727.530,00	5.052.684.239,00	(797.956.709,00)	(15,79)
6.	Dinas Sosial	3.611.825.548,00	3.648.843.906,00	(37.018.358,00)	(1,01)
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.491.248.067,00	4.191.907.854,00	299.340.213,00	7,14
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	6.411.598.987,00	6.399.293.931,00	12.305.056,00	0,19
9.	Dinas Ketahanan Pangan	2.649.272.226,00	2.296.382.342,00	352.889.884,00	15,37
10.	Dinas Lingkungan Hidup	3.797.675.113,00	3.300.401.784,00	497.273.329,00	15,07
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.249.179.994,00	3.099.929.553,00	149.250.441,00	4,81
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.626.632.435,00	3.449.004.070,00	177.628.365,00	5,15
13.	Dinas Perhubungan	5.586.331.052,00	5.512.831.916,00	73.499.136,00	1,33
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.121.095.626,00	2.887.240.370,00	233.855.256,00	8,10
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.468.029.336,00	2.435.009.641,00	33.019.695,00	1,36
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.278.322.598,00	3.384.898.854,00	(106.576.256,00)	(3,15)
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.932.877.122,00	2.501.961.512,00	430.915.610,00	17,22

No.	Beban Pegawai	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.930.717.242,00	6.768.307.559,00	162.409.683,00	2,40
19.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	28.020.045.243,00	28.126.460.960,00	(106.415.717,00)	(0,38)
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.721.732.819,00	11.283.313.715,00	438.419.104,00	3,89
21.	Dinas Pariwisata	3.903.921.686,00	3.746.474.420,00	157.447.266,00	4,20
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.061.791.726,00	4.161.207.818,00	(99.416.092,00)	(2,39)
23.	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Sekretariat Daerah	15.689.730.786,00	16.851.840.317,00	(1.162.109.531,00)	(6,90)
26.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24.570.704.586,00	24.432.395.431,00	138.309.155,00	0,57
27.	Inspektorat	7.250.550.379,00	7.009.131.850,00	241.418.529,00	3,44
24.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.979.325.592,00	1.961.944.474,00	17.381.118,00	0,89
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	5.014.371.310,00	4.848.173.985,00	166.197.325,00	3,43
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.008.659.325,00	3.122.201.000,00	(113.541.675,00)	(3,64)
31.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.187.351.287,00	5.366.244.815,00	(178.893.528,00)	(3,33)
32.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24.666.520.566,00	30.557.968.416,00	(5.891.447.850,00)	(19,28)
33.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	3.368.347.675,00	3.664.779.875,00	(296.432.200,00)	(8,09)
34.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.801.593.653,00	0,00	2.801.593.653,00	100,00
35.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.572.419.894,00	0,00	1.572.575.894,00	100,00
36.	Kecamatan Lambu	1.570.565.536,00	1.432.479.766,00	138.085.770,00	9,64
37.	Kecamatan Sape	1.163.060.620,00	1.405.615.108,00	(242.554.488,00)	(17,26)
38.	Kecamatan Wawo	1.332.145.680,00	1.410.369.302,00	(78.223.622,00)	(5,55)
39.	Kecamatan Langgudu	1.223.092.660,00	1.140.883.864,00	82.208.796,00	7,21
40.	Kecamatan Wera	1.649.100.753,00	1.724.065.077,00	(74.964.324,00)	(4,35)
41.	Kecamatan Ambalawi	1.380.511.377,00	1.325.033.143,00	55.478.234,00	4,19
42.	Kecamatan Belo	1.026.450.110,00	1.008.553.793,00	17.896.317,00	1,77
43.	Kecamatan Monta	1.398.997.353,00	1.469.607.932,00	(70.610.579,00)	(4,80)
44.	Kecamatan Dongggo	1.058.928.418,00	1.261.016.508,00	(202.088.090,00)	(16,03)
45.	Kecamatan Sanggar	1.469.382.526,00	1.562.939.074,00	(93.556.548,00)	(5,99)
46.	Kecamatan Tambora	1.355.524.675,00	1.370.821.636,00	(15.296.961,00)	(1,12)
47.	Kecamatan Madapangga	2.013.667.044,00	1.906.315.571,00	107.351.473,00	5,63
48.	Kecamatan Bolo	1.862.627.719,00	1.835.179.020,00	27.448.699,00	1,50
49.	Kecamatan Woha	1.850.624.860,00	1.946.911.665,00	(96.286.805,00)	(4,95)
50.	Kecamatan Parado	977.290.191,00	991.785.740,00	(14.490.549,00)	(1,46)
51.	Kecamatan Soromandi	1.182.839.982,00	1.164.202.088,00	18.637.894,00	1,60
52.	Kecamatan Lambitu	1.206.320.636,00	1.091.049.338,00	115.271.298,00	10,57
53.	Kecamatan Palibelo	1.332.953.907,00	1.296.005.184,00	36.948.723,00	2,85
	Jumlah	750.789.280.221,00	749.729.275.324,00	1.059.725.897,00	0,14

Beban Pegawai tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

Tab 5.112
Uraian Beban Pegawai

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
I	BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	516.046.548.496,00	526.291.072.695,00
1	Beban Gaji Pokok ASN	394.652.228.037,00	402.151.223.108,00
-	Beban Gaji Pokok PNS	373.034.543.237,00	386.683.022.397,00
	Beban Gaji Pokok PNS	373.034.543.237,00	386.683.022.397,00
-	Beban Gaji Pokok PPPK	21.617.684.800,00	15.468.200.711,00
	Beban Gaji Pokok PPPK	21.617.684.800,00	15.468.200.711,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	37.201.522.988,00	37.747.939.002,00
-	Beban Tunjangan Keluarga PNS	35.362.377.528,00	36.450.245.148,00
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	35.362.376.886,00	36.450.245.148,00
-	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.839.145.460,00	1.297.693.854,00
	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.839.145.460,00	1.297.693.854,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	9.214.175.000,00	8.844.975.000,00
-	Beban Tunjangan Jabatan PNS	9.214.175.000,00	8.844.975.000,00
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	9.215.955.000,00	8.844.975.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	26.140.480.900,00	25.790.862.500,00
-	Beban Tunjangan Fungsional PNS	26.140.480.900,00	25.790.862.500,00
	Beban Tunjangan Fungsional PNS	26.140.480.900,00	25.790.862.500,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.223.928.000,00	6.546.700.000,00
-	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.859.508.000,00	5.569.195.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.857.728.000,00	5.569.195.000,00
-	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.364.420.000,00	977.505.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.364.420.000,00	977.505.000,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	22.657.610.880,00	23.003.423.396,00
-	Beban Tunjangan Beras PNS	21.184.081.140,00	21.957.678.596,00
	Beban Tunjangan Beras PNS	21.184.081.140,00	21.957.678.596,00
-	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.473.529.740,00	1.045.744.800,00
	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.473.529.740,00	1.045.744.800,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	482.493.932,00	348.882.477,00
-	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	482.493.932,00	348.882.477,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	482.493.932,00	348.882.477,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	5.549.383,00	5.569.639,00
-	Beban Pembulatan Gaji PNS	5.192.585,00	5.318.247,00
	Beban Pembulatan Gaji PNS	5.193.227,00	5.318.247,00
-	Beban Pembulatan Gaji PPPK	356.798,00	251.392,00
	Beban Pembulatan Gaji PPPK	356.798,00	251.392,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.182.225.503,00	18.642.224.779,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.323.304.283,00	18.060.352.723,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.323.304.283,00	18.060.352.723,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	858.921.220,00	581.872.056,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	858.921.220,00	581.872.056,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	808.968.471,00	818.174.549,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	764.463.441,00	787.808.466,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	764.463.441,00	787.808.466,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	44.505.030,00	30.366.083,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	44.505.030,00	30.366.083,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.477.365.402,00	2.391.098.245,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.343.850.320,00	2.300.000.000,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.343.850.320,00	2.300.000.000,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	133.515.082,00	91.098.245,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	133.515.082,00	91.098.245,00
II	BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	54.330.843.484,00	165.017.965.542,00
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	50.749.113.484,00	46.559.278.205,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)	
	-	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	50.717.813.484,00	46.559.278.205,00
		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	50.717.652.484,00	46.559.278.205,00
	-	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	31.300.000,00	0,00
		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	31.300.000,00	-
2		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.000.000,00	0,00
	-	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	80.000.000,00	0,00
		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	80.000.000,00	0,00
	-	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	80.000.000,00	0,00
		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	80.000.000,00	0,00
3		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.501.730.000,00	118.458.687.337,00
	-	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.501.730.000,00	118.458.687.337,00
		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.501.730.000,00	118.458.687.337,00
III		BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN	125.319.093.428,00	14.189.425.200,00
1		Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	114.448.737.720,00	0,00
	-	Beban TKG PNSD	114.448.737.720,00	0,00
		Beban TPG PNSD	114.448.737.720,00	-
2		Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.149.595.700,00	4.526.250.200,00
		Beban TKG PNSD	2.149.595.700,00	4.526.250.200,00
		Beban TKG PNSD	2.149.595.700,00	4.526.250.200,00
3		Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.241.750.000,00	715.250.000,00
	-	Beban Tamsil Guru PNSD	1.241.750.000,00	715.250.000,00
		Beban Tamsil Guru PNSD	1.241.750.000,00	715.250.000,00
4		Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.306.949.558,00	5.731.840.000,00
	-	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.306.949.558,00	5.731.840.000,00
		Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.306.949.558,00	5.731.840.000,00
4		Beban Honorarium	4.160.510.450,00	3.188.185.000,00
	-	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.043.629.200,00	3.042.705.000,00
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.043.629.200,00	3.042.705.000,00
	-	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	116.881.250,00	145.480.000,00
		Beban Jasa Pengelolaan BMD	11.550.000,00	27.900.000,00
		Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11.550.000,00	27.900.000,00
IV		BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD	20.349.686.959,00	20.220.413.100,00
1		Beban Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00
	-	Beban Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00
2		Beban Tunjangan Keluarga DPRD	102.561.480,00	101.238.480,00
	-	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	102.561.480,00	101.238.480,00
3		Beban Tunjangan Beras DPRD	70.696.080,00	65.257.920,00
	-	Beban Tunjangan Beras DPRD	70.696.080,00	65.257.920,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4	Beban Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00
-	Beban Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00
-	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	136.294.200,00	135.380.700,00
-	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	136.294.200,00	135.380.700,00
7	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.103.000.000,00	5.103.000.000,00
-	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.103.000.000,00	5.103.000.000,00
8	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.275.750.000,00	1.275.750.000,00
-	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.275.750.000,00	1.275.750.000,00
9	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	152.996.011,00	115.903.500,00
-	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	152.996.011,00	115.903.500,00
10	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.054.506.688,00	5.970.000.000,00
	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	76.245.120,00	0,00
	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00	0,00
	Beban Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00	0,00
-	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	5.970.000.000,00	5.970.000.000,00
11	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.908.000.000,00	4.908.000.000,00
-	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.908.000.000,00	4.908.000.000,00
V	BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN KDH/WKDH	183.425.604,00	296.612.686,00
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00
-	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.612.000,00	3.612.000,00
-	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.612.000,00	3.612.000,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
-	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.345.200,00	5.069.400,00
-	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.345.200,00	5.069.400,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	536.964,00	543.848,00
-	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	536.964,00	543.848,00
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.440,00	1.640,00
-	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.440,00	1.640,00
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	0,00	76.245.120,00
-	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	0,00	76.245.120,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	2.065.392,00
-	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	2.065.392,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	6.196.176,00
-	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	6.196.176,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	22.050.000,00	49.999.110,00
	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	22.050.000,00	0,00
	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	49.999.110,00

No.	Uraian		Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
VI		BEBAN PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH	752.000.000,00	752.000.000,00
	1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00
	-	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00
	2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	500.000.000,00	500.000.000,00
	-	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	500.000.000,00	500.000.000,00
VII		BEBAN PEGAWAI BLUD	33.808.304.450,00	22.961.786.101,00
	1	Beban Pegawai BLUD	33.808.304.450,00	22.961.786.101,00
	-	Beban Pegawai BLUD	33.808.304.450,00	22.961.786.101,00
Jumlah			750.789.902.421,00	749.729.275.324,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.1.1.2 Beban Barang dan Jasa	487.305.927.782,56	357.182.906.630,40

Beban Barang dan Jasa TA. 2022 sebesar Rp487.305.927.782,56 merupakan beban dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp458.571.697.276,56, ditambah reklasifikasi Aset Tetap, reklasifikasi dari Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya dan pemakaian saldo persediaan sebesar Rp70.944.544.028,00. Kemudian dikurangi saldo persediaan, reklasifikasi Aset tetap dan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp42.016.618.522,00. Rincian Beban Barang dan Jasa TA. 2022 pada masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.113
Rincian Beban Barang dan Jasa Pada Masing-Masing Perangkat Daerah

No.	Beban Persediaan	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	85.259.635.236,56	82.384.804.071,40	1.529.324.066,16	1,86
2.	Dinas Kesehatan	82.824.138.815,00	84.074.682.715,00	(1.756.768.747,00)	(2,09)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	38.803.061.747,00	30.460.752.898,00	8.312.451.453,00	27,29
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.879.778.779,00	8.841.209.491,00	48.041.569.288,00	543,38
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.468.205.391,00	19.914.590.234,00	(3.446.384.843,00)	(17,31)
6.	Dinas Sosial	1.730.074.714,00	1.664.128.511,00	65.946.203,00	3,96
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.019.925.602,00	1.389.901.525,00	630.024.077,00	45,33
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	8.799.697.198,00	7.101.552.012,00	1.647.445.575,00	23,20
9.	Dinas Ketahanan Pangan	5.680.364.955,00	1.147.857.693,00	4.532.507.262,00	394,87
10.	Dinas Lingkungan Hidup	3.192.460.967,00	2.247.690.353,00	944.770.614,00	42,03
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.881.366.942,00	2.510.778.910,00	370.588.032,00	14,76
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.079.198.198,00	1.182.493.528,00	1.886.904.670,00	159,57
13.	Dinas Perhubungan	6.579.407.700,00	901.159.327,00	5.678.248.373,00	630,10

No.	Beban Persediaan	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.384.415.011,00	1.488.746.948,00	(105.031.937,00)	(7,06)
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.514.697.150,00	1.206.279.512,00	1.308.417.638,00	108,47
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.202.076.705,00	1.619.902.910,00	582.173.795,00	35,94
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	886.089.965,00	766.290.700,00	119.799.265,00	15,63
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.613.505.816,00	5.138.075.500,00	8.475.430.316,00	164,95
19.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	45.315.925.353,00	21.899.129.880,00	23.404.510.473,00	106,87
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.468.387.809,00	1.442.741.676,00	3.912.428.633,00	271,18
21.	Dinas Pariwisata	2.132.131.170,00	1.493.525.950,00	630.613.220,00	42,22
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.958.149.125,00	1.873.802.130,00	2.084.346.995,00	111,24
23.	Sekretariat Daerah	30.299.775.040,00	24.049.869.541,00	6.106.204.499,00	25,39
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18.377.838.750,00	16.174.297.500,00	2.448.653.150,00	15,14
25.	Inspektorat	5.112.845.536,00	4.165.031.324,00	947.814.212,00	22,76
26.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.779.635.550,00	2.301.408.200,00	476.109.850,00	20,69
27.	Satuan Polisi Pamong Praja	7.855.602.000,00	7.265.169.000,00	590.433.000,00	8,13
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.555.760.425,00	3.849.222.241,00	(1.293.461.816,00)	(33,60)
29.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.996.996.652,00	2.660.136.563,00	2.320.876.089,00	87,25
30.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.129.775.786,00	6.905.921.206,00	2.223.854.580,00	32,20
31.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	2.828.552.486,00	3.169.939.124,00	(341.386.638,00)	(10,77)
32.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.905.917.547,00	0,00	2.905.917.547,00	100,00
33.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.923.925.092,00	0,00	1.923.925.092,00	100,00
34.	Kecamatan Lambu	297.105.000,00	220.700.000,00	76.405.000,00	34,62
35.	Kecamatan Sape	434.160.000,00	402.540.000,00	31.620.000,00	7,86
36.	Kecamatan Wawo	363.050.000,00	307.611.000,00	55.439.000,00	18,02
37.	Kecamatan Langgudu	456.300.000,00	390.100.000,00	66.200.000,00	16,97
38.	Kecamatan Wera	443.194.800,00	398.646.750,00	42.538.050,00	10,67
39.	Kecamatan Ambalawi	405.830.000,00	353.195.850,00	52.634.150,00	14,90
40.	Kecamatan Belo	323.683.000,00	278.034.100,00	44.648.900,00	16,06
41.	Kecamatan Monta	428.068.276,00	358.579.882,00	69.488.394,00	19,38
42.	Kecamatan Dongggo	345.700.000,00	282.250.000,00	63.450.000,00	22,48
43.	Kecamatan Sanggar	320.005.000,00	267.101.850,00	52.903.150,00	19,81
44.	Kecamatan Tambora	338.480.000,00	271.082.650,00	67.397.350,00	24,86
45.	Kecamatan Madapangga	414.902.500,00	378.620.000,00	36.282.500,00	9,58
46.	Kecamatan Bolo	551.080.000,00	508.279.750,00	42.800.250,00	8,42
47.	Kecamatan Woha	554.500.000,00	500.368.200,00	54.131.800,00	10,82
48.	Kecamatan Parado	292.799.994,00	215.615.450,00	77.184.544,00	35,80
49.	Kecamatan Soromandi	335.070.000,00	292.880.200,00	42.189.800,00	14,41
50.	Kecamatan Lambitu	256.300.000,00	207.650.000,00	48.650.000,00	23,43
51.	Kecamatan Palibelo	306.380.000,00	258.559.775,00	47.820.225,00	18,49
	Jumlah	487.305.927.782,56	357.182.906.630,40	128.130.037.099,16	35,87

Beban Barang dan Jasa tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

Tab 5.114
Uraian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
I.	BEBAN BARANG	185.974.124.763,00	97.834.217.450,20
	Beban Barang Pakai Habis	185.973.596.763,00	97.812.574.450,20
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.134.106.100,00	469.610.290,00
	Beban Bahan-Bahan Kimia	200.070.481,00	323.850.000,00
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.427.433.765,00	4.835.530.891,00
	Beban Bahan-Bahan Baku	218.115.510,00	9.606.800,00
	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.129.505.140,00	1.183.731.500,00
	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	8.000.000,00
	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	290.661.000,00	482.505.686,00
	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	209.406.000,00	1.630.727.000,00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	353.644.000,00	701.536.174,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.822.694.484,00	2.275.086.403,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	10.959.000,00	58.296.050,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	9.414.577,00	152.283.306,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	66.288.781,00	209.191.150,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.649.318.539,00	-490.009.412,80
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.166.000,00	81.931.320,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.402.459.780,00	7.463.076.032,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	548.348.200,00	626.814.818,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	100.367.500,00	24.431.400,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	721.337.009,00	466.763.376,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	742.795.400,00	2.200.559.940,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.049.751.181,00	524.554.493,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	67.507.500,00	153.035.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	46.583.000,00	9.200.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	109.400.000,00	99.000.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	394.825.300,00	671.105.040,00
	Beban Obat-Obatan-Obat	7.588.201.240,00	12.123.761.235,00
	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.685.975.444,00	3.867.152.571,00
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	108.207.314.097,00	21.246.637.067,00
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.954.470.000,00	15.530.662.000,00
	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.209.933.900,00	273.281.400,00
	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	0,00	2.250.000,00
	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	-239.094.506,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	16.789.354.549,00	12.976.719.673,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.586.204.210,00	3.219.511.500,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	29.700.000,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	681.661.032,00	123.870.000,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	543.060.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	442.589.000,00	364.608.500,00
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	197.120.000,00	324.819.000,00
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	87.878.700,00	185.130.000,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	198.049.450,00	92.565.000,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	188.968.100,00	79.623.500,00
	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	67.132.800,00	110.020.000,00
	Beban Pakaian Penyelamatan	3.000.000,00	52.140.000,00
	Beban Pakaian Adat Daerah	180.512.950,00	105.625.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional	334.212.450,00	235.234.000,00
	Beban Pakaian Olahraga	153.828.800,00	300.234.500,00
	Beban Pakaian Jas/Safari	0,00	198.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	543.060.000,00
	Beban Komponen-Komponen Jembatan Baja	0,00	19.800.000,00
	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	528.000,00	1.843.000,00
II.	BEBAN JASA	142.789.992.890,00	116.941.817.638,00
	Beban Jasa Kantor	102.464.184.678,00	86.032.856.167,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.587.283.999,00	1.454.447.579,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.448.921.500,00	5.662.488.400,00
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.400.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	778.600.000,00	563.100.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan	700.000,00	5.400.000,00
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.500.000,00	10.000.000,00
	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	252.110.000,00	28.294.000,00
	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	329.200.000,00	317.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	3.329.560.000,00	2.442.390.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	30.960.917.396,00	23.887.517.975,00
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	83.964.000,00	38.900.000,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.382.350.000,00	1.285.426.500,00
	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	815.600.000,00	254.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	702.000.000,00	817.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	366.400.000,00	430.550.000,00
	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	10.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	24.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	16.500.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	204.900.000,00	178.150.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	31.582.928.500,00	29.570.133.500,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	3.617.955.000,00	3.247.489.017,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	922.300.000,00	574.450.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli	723.813.500,00	862.408.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.520.040.666,00	1.783.189.625,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	520.900.000,00	675.850.000,00
	Beban Jasa Tenaga Supir	311.100.000,00	248.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	39.600.000,00	71.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	19.174.723,00	5.000.000,00
	Beban Jasa Tata Rias	10.000.000,00	10.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.098.126.400,00	992.992.000,00
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	55.097.900,00	74.483.400,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	299.206.000,00	46.877.000,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	377.725.000,00	117.650.000,00
	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	35.600.000,00
	Beban Jasa Kalibrasi	21.000.000,00	59.031.720,00
	Beban Jasa Pengolahan Sampah	146.250.000,00	3.360.000,00
	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	5.000.000,00	149.620.000,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	389.090.000,00	485.550.000,00
	Beban Tagihan Telepon	398.053.795,00	229.374.309,00
	Beban Tagihan Air	14.957.116,00	22.573.424,00
	Beban Tagihan Listrik	5.573.584.166,00	5.101.790.662,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	397.825.000,00	394.794.499,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.247.271.191,00	1.507.514.752,00
	Beban Paket/Pengiriman	101.809.800,00	11.175.000,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	405.904.282,00	290.931.805,00
	Beban Pengolahan Air Limbah	273.850.000,00	0,00
	Beban Lembur	3.088.714.744,00	2.083.953.000,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.336.541.774,00	0,00
	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	0,00	2.931.759.600,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.272.827.800,00	10.322.620.000,00
	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	180.062.400,00	1.006.191.200,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	120.000.000,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	120.326.340,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	117.382.740,00	0,00
	Beban Sewa Tanah	0,00	50.000.000,00
	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	50.000.000,00
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.138.215.500,00	1.912.584.000,00
	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	7.500.000,00	3.000.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	421.243.400,00	48.450.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	43.500.000,00	10.000.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	708.239.500,00	534.495.000,00
	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	12.000.000,00	0,00
	Beban Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	53.188.000,00	24.250.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.125.844.000,00	852.475.000,00
	Beban Sewa Mebel	350.410.000,00	206.164.000,00
	Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat	2.900.000,00	0,00
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	354.965.000,00	224.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.519.000,00	0,00
	Beban Sewa Peralatan Umum	48.906.600,00	0,00
	Beban Sewa Personal Computer	0,00	1.000.000,00
	Beban Sewa Peralatan Mainframe	0,00	2.000.000,00
	Beban Sewa Elektronik/Electric	0,00	1.750.000,00
	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	5.000.000,00
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.092.579.976,00	889.750.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	25.200.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	3.500.000,00	0
	Beban Sewa Bangunan Kesehatan	103.500.000,00	79.000.000,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	364.100.000,00	348.280.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	2.700.000,00
	Beban Sewa Bangunan Terbuka	10.000.000,00	19.500.000,00
	Beban Sewa Taman	7.050.000,00	0,00
	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	120.000.000,00	120.000.000,00
	Beban Sewa Asrama	50.000.000,00	0,00
	Beban Sewa Hotel	350.406.000,00	245.010.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	80.280.000,00	50.060.000,00
	Beban Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	3.743.976,00	0,00
	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.100.000,00	10.661.600,00
	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.100.000,00	0,00
	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	0,00	10.661.600,00
	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	6.700.000,00
	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	0,00	6.700.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	6.722.059.200,00	5.733.358.750,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	293.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	373.066.450,00	251.022.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	28.270.000,00	44.400.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	847.854.500,00	471.355.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	548.195.000,00	75.545.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	5.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	551.800.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	667.012.000,00	927.035.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	306.738.000,00	542.823.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	59.953.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	199.606.000,00	125.597.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	487.183.250,00	592.296.750,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	692.982.000,00	1.328.420.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.058.750.000,00	662.500.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	558.630.000,00	473.650.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	3.900.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	46.762.000,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	14.000.000,00	9.000.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	900.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	89.072.000,00	119.100.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	470.669.000,00	393.718.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	93.767.000,00	28.765.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	4.050.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	10.000.000,00	52.965.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	39.334.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	238.638.000,00	35.000.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	88.930.000,00	79.046.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	98.406.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	95.486.000,00
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	633.300.000,00	728.091.621,00
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	0,00	106.936.441,00
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	633.300.000,00	577.560.000,00
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	0,00	43.595.180,00
	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	4.620.000,00	326.250.000,00
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	2.500.000,00	0
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	2.120.000,00	251.250.000,00
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	75.000.000,00
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.131.219.553,00	6.597.276.700,00
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	4.379.345.053,00	3.018.005.200,00
	Beban Sosialisasi	4.146.599.500,00	1.547.793.500,00
	Beban Bimbingan Teknis	2.605.275.000,00	1.949.778.000,00
	Beban Diklat Kepemimpinan	0	81.700.000,00
III	Beban Pemeliharaan Tanah	2.609.230.000,00	410.379.668,00
	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	7.500.000,00	325.728.668,00
	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	0,00	10.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	69.980.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	40.000.000,00	74.651.000,00
	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	2.491.750.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.244.270.660,56	3.272.095.591,00
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	-1.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	66.970.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	17.955.000,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	30.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	83.712.250,00	8.468.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	393.767.314,00	29.553.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.560.000,00	13.305.350,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	97.000.000,00	174.860.750,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	132.479.623,00	272.833.850,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	49.952.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	329.675.500,00	134.288.600,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	15.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.991.231,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	3.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.114.879.884,56	1.320.654.607,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	127.196.000,00	46.050.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	327.133.699,00	218.104.496,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	106.331.717,00	91.714.800,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	35.961.880,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	23.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	1.221.950,00
	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	5.997.750,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	50.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	55.451.342,00	50.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	34.507.000,00	35.116.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	231.228.850,00	278.340.114,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	42.698.850,00	13.574.250,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	63.240.000,00	219.403.094,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	10.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	23.405.000,00	12.415.250,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	13.482.400,00	4.900.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.550.000,00	49.454.850,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	19.980.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.345.469.380,00	13.276.472.680,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.222.745.680,00	3.020.812.900,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	275.789.780,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	-175.773.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	8.439.620.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	194.600.000,00	249.156.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	261.946.000,00	149.900.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	158.490.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	278.830.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	166.200.000,00	134.090.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	14.886.300,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	0,00	571.804.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	40.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	55.234.400,00	159.278.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	98.750.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	49.560.000,00	74.490.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	99.690.000,00
	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	61.842.000,00
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	370.357.000,00	4.716.892.645,00
	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	0,00	586.420.000,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	353.200.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	0,00	149.850.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	3.732.757.645,00
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	150.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	17.400.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	149.757.000,00	247.865.000,00
	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	15.730.000,00
	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	15.730.000,00
IV	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.497.046.380,00	30.643.705.800,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	709.433.620,00	1.643.267.085,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.171.154.505,00	13.507.479.742,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.705.000,00	175.040.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22.588.753.255,00	15.317.918.973,00
V	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.369.893.180,00	348.021.750,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	738.321.500,00	133.295.750,00
	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	741.571.680,00	84.600.000,00
	Beban Beasiswa	0,00	20.000.000,00
	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	110.126.000,00
	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.890.000.000,00	0,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.870.196.333,00	249.476.000,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.515.307.833,00	236.726.000,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	354.888.500,00	12.750.000,00
VI	Beban Barang dan Jasa BOS	61.282.125.033,56	62.362.554.012,20
	Beban Barang dan Jasa BOS	61.282.125.033,56	62.362.554.012,20
VII	Beban Barang dan Jasa BLUD	36.886.252.392,00	29.269.509.394,00
	Beban Barang dan Jasa BLUD	36.886.252.392,00	29.269.509.394,00
	Jumlah	487.305.927.782,56	357.182.906.630,40

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.3 Beban Hibah	55.339.991.867,00	45.190.722.150,00

Beban Hibah TA. 2022 sebesar Rp55.339.991.867,00 merupakan beban dari Belanja Hibah sebesar Rp32.064.985.100,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.149.269.717,00 dari TA. 2021 sebesar Rp45.190.722.150,00.

Beban Hibah tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.115
Uraian Beban Hibah

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	875.000.000,00	857.470.500,00
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	875.000.000,00	857.470.500,00
	- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	875.000.000,00	857.470.500,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	30.395.933.100	29.794.504.050
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.195.296.100	1.315.000.000
	- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	7.195.296.100	1.315.000.000
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	23.682.740.000	31.794.504.050
	- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.794.504.050	1.870.000.000
	- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.794.504.050	1.870.000.000
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	23.682.740.000	24.535.850.000
	- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	23.682.740.000	24.535.850.000
	Belanja Hibah kepada Koperasi	20.000.000,00	0,00
	- Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	20.000.000,00	0,00
Jumlah		55.339.991.867,00	45.190.722.150,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.1.1.4 Beban Bantuan Sosial	Rp16.254.498.500,00	0,00

Beban Bantuan Sosial TA. 2022 sebesar Rp16.254.498.500,00 merupakan beban dari Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp16.254.498.500,00 pada Perangkat Daerah, antara lain :

Tabel 5.116
Rincian Beban Bantuan Sosial Pada Masing-Masing Perangkat Daerah

No.	Beban Bantuan Sosial	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.685.000.000,00	0,00	13.685.000.000,00	100
2.	Dinas Sosial	2.131.498.500,00	0,00	2.131.498.500,00	100
3.	Sekretariat Daerah	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100
3.	DP3AP2KB	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	100
4.	Dinas Ke;autan dan Perikanan	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100
5.	Dinas Pariwisata	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100
Jumlah Beban Bantuan Sosial		16.254.498.500,00	0,00	16.254.498.500,00	100

5.4.1.1.5 **Beban Penyisihan Piutang**

2022 (Rp)	2021 (Rp)
Rp2.099.905.922,73	5.894.381.236,43

Beban Penyisihan Piutang TA. 2022 sebesar Rp2.099.905.922,73 untuk mencatat nilai penyisihan piutang pada Perangkat Daerah, antara lain :

Tabel 5.117
Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	5.662.042,00	6.485.336,00	(823.294,00)	(12,69)
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	247.801.072,50	105.782.812,50	142.018.260,00	134,25
3.	Sekretariat Daerah	998.001.000,00	535.889.000,00	462.112.000,00	86,23
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.840.000,00	5.236.045.415,93	(5.230.205.415,93)	(99,89)
5.	Dinas Kominfo	12.598.500,00	10.178.672,00	2.419.828,00	23,77
6.	Badan Pendapatan Daerah	830.003.308,23	0	830.003.308,23	100,00
Jumlah		2.099.905.922,73	5.894.381.236,43	(3.794.475.313,70)	(64,37)

Beban Penyisihan Piutang tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.118
Uraian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
I.	BEBAN BANTUAN SOSIAL UANG KEPADA INDIVIDU	13.739.918.200,00	3.714.683.400,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	13.008.750.000,00	3.440.800.000,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	13.008.750.000,00	3.440.800.000,00
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	731.168.200,00	273.883.400,00
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	731.168.200,00	273.883.400,00
	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	725.000.000,00	0,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	90.000.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	90.000.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	635.000.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	635.000.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	1.484.945.000,00	2.167.131.050,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.470.000.000,00	2.083.700.450,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.470.000.000,00	2.083.700.450,00
	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	14.945.000,00	83.430.600,00
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	14.945.000,00	83.430.600,00
	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	304.635.300,00	484.559.900,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non	260.000.000,00	440.000.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	260.000.000,00	440.000.000,00
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	44.635.300,00	44.559.900,00
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	44.635.300,00	44.559.900,00
	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	13.739.918.200,00	3.714.683.400,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	13.008.750.000,00	3.440.800.000,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	13.008.750.000,00	3.440.800.000,00
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	731.168.200,00	273.883.400,00
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	731.168.200,00	273.883.400,00
	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	725.000.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	90.000.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	90.000.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	635.000.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	635.000.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	1.484.945.000,00	2.167.131.050,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.470.000.000,00	2.083.700.450,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.470.000.000,00	2.083.700.450,00
	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	14.945.000,00	83.430.600,00
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	14.945.000,00	83.430.600,00
	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	304.635.300,00	484.559.900,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	260.000.000,00	440.000.000,00
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	260.000.000,00	440.000.000,00
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	44.635.300,00	44.559.900,00
	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	44.635.300,00	44.559.900,00
	Jumlah	2.099.905.922,73	5.894.381.236,43

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.1.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi	151.760.231.317,72	131.699.134.751,75

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA. 2022 sebesar Rp151.760.231.317,72 mengalami peningkatan sebesar Rp20.061.096.565,97 dari TA 2021 sebesar Rp131.699.134.751,75. Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.119
Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	63.394.146.104,38	50.607.406.335,37
	- Beban Penyusutan Alat Besar	830.122.274,00	882.207.513,00
	- Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	31.058.982,00	1.107.888,00
	- Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	295.452.984,00	295.452.995,00
	- Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	324.419.988,00	324.420.000,00
	- Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	339.996,00	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	84.892.204,00	29.361.729,00
	- Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	136.992,00	136.992,00
	- Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	0,00	25.786.002,00
	- Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	199.992,00	0,00
	- Beban Penyusutan Alat Bantu-Feeder	10.500.000,00	148.888.889,00
	- Beban Penyusutan Alat Bantu-Compressor	2.260.392,00	1.625.000,00
	- Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	2.655.000,00	11.323.014,00
	- Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	76.765.756,00	42.665.008,00
	- Beban Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	399.996,00	399.996,00
	- Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	1.039.992,00	1.040.000,00
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan	7.650.749.637,56	6.763.271.839,65
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	687.802.407,00	872.406.153,00
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.203.046.390,00	1.932.249.675,65
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	401.107.464,00	494.342.360,00
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.537.489.858,00	1.569.867.708,00
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	10.264.338,00	12.050.070,00
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	3.459.572.699,00	1.305.372.905,00
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	31.653.315,00	92.846,00
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	57.854.940,00	71.751.442,00
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	65.539.874,00	93.293.836,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	4.950.000,00	4.950.000,00
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	191.468.352,00	201.667.067,00
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	-	205.227.777,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	666.945.695,00	590.379.444,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	18.477.978,00	23.802.409,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1.708.850,00	3.346.281,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	3.614.268,00	6.723.143,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	5.537.946,00	8.467.514,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	5.360.040,00	10.720.290,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	6.414.120,00	6.414.281,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	7.644.978,00	14.457.144,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	12.988.810,00	6.954.559,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	187.289.908,00	190.920.956,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	23.529.192,00	20.516.664,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	1.641.744,00	2.360.000,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	34.166.256,00	13.910.884,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	687.396,00	764.400,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	1.717.596,00	3.127.092,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	3.435.192,00	3.762.083,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	399.996,00	399.996,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	219.600,00	439.200,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	0,00	2.251.600,00
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	238.499.654,00	102.042.324,00
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	600.000,00	600.000,00
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	1.980.000,00	1.980.000,00
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	4.932.008,00	4.093.096,00
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	22.200.154,00	36.040.643,00
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	76.745.036,00	39.736.136,00
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	0,00	14.937.665,00
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	0,00	64.948.700,00
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Specific Set	0,00	492.984,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	0,00	169.400,00
	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	7.154.973,00	6.000.000,00
	Beban Penyusutan Alat Pertanian	496.260.041,00	457.999.444,00
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	39.680.714,00	114.740.816,00
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.072.901,00	4.499.992,00
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	367.293.435,00	278.108.636,00
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	18.127.604,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	11.223.974,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	5.340.588,00	9.525.000,00
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	51.520.825,00	51.125.000,00
	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.015.945.926,45	18.163.333.712,31
	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	8.896.971,00	23.117.927,00
	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.999.996,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.231.130.441,21	836.474.005,00
	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.559.472.392,44	11.473.629.317,00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	3.992.875.570,26	3.131.719.391,00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	3.172.212,00	1.866.642,00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	102.529.333,00	69.579.392,00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.096.580.076,00	450.238.918,00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	37.043.447,00	18.643.836,00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.251.775.200,73	1.465.590.735,00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	72.853.148,00	67.290.396,00
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	176.780.781,82	239.242.993,31
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	64.124.448,00	52.214.414,00
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	145.408.999,00	160.830.244,00
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	3.751.560,00	15.071.509,00
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5.655.492,00	8.466.687,00
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	35.209.786,00	37.245.590,00
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	218.686.071,99	112.111.716,00
	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.155.936.682,00	1.056.058.232,00
	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	272.595.759,00	309.173.624,00
	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	519.374.547,00	419.958.637,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	-	8.338.000,00
	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	9.587.348,00	3.576.022,00
	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	21.160.492,00	37.325.058,00
	Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	12.893.266,00	7.070.000,00
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	175.618.693,00	99.161.004,00
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	6.621.389,00
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	2.444.445,00	19.081.875,00
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	2.444.445,00
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	57.806.580,00	69.750.493,00
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	38.333.304,00	23.138.890,00
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	266.664,00	0,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	12.108.364,00	11.957.458,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW	3.681.360,00	1.606.000,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	26.674.692,00	22.778.980,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	395.112,00	867.624,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	2.996.056,00	150.000,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	0,00	400.000,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	0,00	10.583.333,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	0,00	2.075.400,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.605.060.167,48	8.819.967.180,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	13.435.626.473,50	6.817.760.894,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	1.618.439.096,00	99.394.907,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	124.008.695,00	1.421.071,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	1.767.053.875,00	599.127.974,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.632.758.333,98	723.206.855,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	246.651.121,00	46.442.118,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	93.914.576,00	53.423.350,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.744.299.007,00	443.445.512,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	4.314.756,00	359.563,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	8.887.992,00	8.888.000,00
	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	273.333,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	18.788.520,00	2.912.499,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	26.229.381,00	18.068.577,00
	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	883.815.008,00	5.515.860,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.975.362.523,89	1.956.970.911,33
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	1.124.435.960,00	558.172.707,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	11.348.868,00	617.667,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	14.419.330,00	6.342.693,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	429.860.322,99	335.809.492,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/ Geologi	187.026.907,00	15.482.644,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	15.437.066,00	16.051.242,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	16.191.792,00	1.386.458,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	17.394.456,00	15.114.211,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0,00	6.153.093,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	9.554.187,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	93.750,33
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0,00	20.690.375,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	0,00	375.000,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	0,00	412.500,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan	0,00	1.512.500,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	0,00	421.330,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi	0,00	281.250,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	0,00	756.250,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	0,00	7.807.250,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	0,00	7.471.090,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	697.992,00	4.320.991,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	0,00	1.250.000,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	18.489.575,00	17.750.000,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0,00	7.795.635,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Analytical Instrument	596.904,00	49.742,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Instrument Probe/Sensor	300.000,00	300.000,00
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-General Laboratory Tool	12.313.608,00	0,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Laboratory Safety Equipment	14.765.364,00	11.111,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	378.870.846,96	436.337.223,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	44.536.607,19	59.843.065,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	12.577.968,84	11.233.426,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	120.002.124,00	97.621.322,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	2.274.734,00	11.036.348,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	19.815.696,00	27.127.296,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	14.537.560,00	14.535.216,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	4.734.588,00	13.893.564,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	1.207.383,91	18.421.858,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	17.568.804,00	21.179.289,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting And Scientific Electronic	15.197.568,00	4.428.452,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System	60.000,00	60.000,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	5.728.530,00	5.732.392,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	15.847.776,00	15.847.776,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	3.185.832,00	389.988,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics	28.873.260,00	26.509.356,00
	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	299.496,00	299.496,00
	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	3.277.433,00	0,00
	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi	1.999.992,00	2.000.000,00
	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	4.324.320,00	4.324.320,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	44.312.142,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	128.031.761,00	950.667,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	6.053.112,00	6.053.142,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	3.064.286,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	131.401.419,00	53.782.137,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	0,00	28.585.714,00
	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Towing Carriage	10.752,00	10.752,00
	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	57.183.996,00	57.268.335,00
	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Cavitation Tunnel	13.995.864,00	0,00
	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Peralatan Umum	862.080,00	595.152,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	31.748.455,00	2.421.465,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	499.992,00	499.992,00
	Beban Penyusutan	143.997.572,00	112.622.447,00
	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Genggam	2.100.452,00	1.919.900,00
	Beban Penyusutan Peralatan Non Senjata Api-Alat Keamanan	16.449.996,00	16.436.102,00
	Beban Penyusutan Peralatan Non Senjata Api-Non Senjata Api	14.888.892,00	16.426.669,00
	Beban Penyusutan Peralatan Non Senjata Api-Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	110.558.232,00	77.839.776,00
	Beban Penyusutan Komputer	16.287.167.771,00	10.376.022.803,08
	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	37.538.061,00	62.750.606,00
	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	14.060.443.281,00	8.562.885.236,00
	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	33.653.292,00	29.565.875,00
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	147.239.161,00	79.526.626,00
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	49.663.787,00	42.797.334,00
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.129.950.901,00	754.449.948,08
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	801.793.151,00	834.563.914,00
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	26.886.137,00	9.483.264,00
	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	34.383.625,00	27.714.395,00
	Beban Penyusutan Alat Deteksi-Suara	279.996,00	279.996,00
	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman	420.000,00	420.000,00
	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00	1.000.002,00
	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	321.240,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	2.700.014,00	1.749.984,00
	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	15.922.756,00	23.024.429,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	12.645.123,00	1.239.984,00
	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Fasklektrik	2.094.496,00	0,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga	824.988,00	824.988,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	824.988,00	824.988,00
	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	93.744,00	93.744,00
	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment	93.744,00	93.744,00
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	552.293.513,00	510.180.223,00
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	71.567.324,00	41.852.438,00
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	460.806.189,00	448.407.785,00
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	19.920.000,00	19.920.000,00
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	982.745.920,00	889.759.459,00
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	5.355.012,00	3.599.988,00
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	111.282.649,00	96.398.660,00
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	601.849.104,00	587.324.085,00
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	25.608.332,00	0,00
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	238.650.823,00	202.436.726,00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.018.360.862,00	27.393.822.105,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	29.574.074.931,00	27.082.082.790,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.470.851.574,00	10.206.032.894,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	120.770.737,00	42.510.480,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	102.695.496,00	102.695.546,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	189.093.276,00	96.678.512,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	195.004.757,00	211.068.872,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	6.249.976.657,00	1.621.806.682,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.325.268.966,00	115.178.650,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	469.345.727,00	611.040.576,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.377.678.849,00	10.537.940.922,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	385.262.690,00	383.702.259,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.044.580.612,00	998.739.115,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	70.820.781,00	46.280.943,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	47.327.052,00	36.699.390,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pematong Hewan	15.718.433,00	14.892.800,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	620.542.186,00	474.495.137,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	23.707.032,00	63.368.340,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	206.252.206,00	205.042.466,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	7.759.516,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	16.179.936,00	16.180.000,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	19.229.748,00	19.229.791,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	230.027.544,00	39.525.569,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	39.105.502,00	34.918.144,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	381.388,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	166.709.316,00	166.709.360,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	79.730.310,00	19.738.201,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	204.572.952,00	332.655.796,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	63.763.740,00	59.994.026,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	14.752.584,00	37.021.986,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	527.202.480,00	381.381.813,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	82.499.568,00	27.533.000,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Asrama	11.968.416,00	11.968.420,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Hotel	185.293.404,00	160.000.000,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	10.001.496,00	7.053.100,00
	Beban Penyusutan Monumen	55.525.344,00	78.350.182,00
	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	3.931.140,00	26.226.000,00
	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	50.003.304,00	48.380.192,00
	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	1.590.900,00	3.743.990,00
	Beban Penyusutan Bangunan Menara	8.877.612,00	6.473.250,00
	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	3.902.616,00	1.498.250,00
	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	4.974.996,00	4.975.000,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	376.138.999,00	226.915.883,00
	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	62.660.484,00	24.663.840,00
	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	300.026.539,00	202.252.043,00
	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	13.451.976,00	-
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	58.294.764.644,00	53.629.996.176,70
	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	41.712.954.192,00	35.499.638.953,00
	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional	189.559.992,00	15.796.667,00
	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	31.352.948.580,00	25.437.360.205,00
	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Desa	1.876.260.218,00	3.338.309.777,00
	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	5.622.882.834,00	4.060.526.287,00
	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	30.855.816,00	118.788,00
	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.473.297.301,00	2.466.190.368,00
	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	158.120.760,00	141.819.201,00
	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	8.780.568,00	8.780.580,00
	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	248.123,00	30.737.080,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air	11.959.192.871,00	13.107.594.462,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	233.011.416,00	624.790.182,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	944.029.070,00	943.382.036,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	4.388.037.753,00	3.982.802.686,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	8.137.572,00	7.948.000,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	156.227.521,00	149.720.155,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	301.700.896,00	301.736.219,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	43.787.988,00	43.788.000,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	10.921.068,00	10.921.080,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	117.206.796,00	117.206.922,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	22.215.900,00	22.215.920,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut	2.940.000,00	2.940.000,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	15.455.988,00	15.456.000,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	62.560.344,00	8.214.399,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	92.212.404,00	92.212.480,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	11.252.904,00	1.331.900.300,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	982.378.461,00	1.001.355.874,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		
	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.667.123.943,00	2.640.451.500,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	256.114.644,00	255.288.012,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	33.274.159,00	11.185.833,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	4.793.696,00	4.021.920,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	19.266.660,00	19.266.668,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	12.663.252,00	22.537.988,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	30.004.260,00	29.866.034,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	7.287.697,00	22.616.250,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	76.285.656,00	53.427.751,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	997.892.808,00	993.791.697,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	275.270.076,00	242.512.886,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	124.645.868,00	92.524.195,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	31.011.786,00	53.255.350,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	23.699.181,00	2.475.000,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	7.783.104,00	7.783.125,00
	Beban Penyusutan Instalasi	1.967.861.452,00	2.512.449.190,70
	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	48.136.874,00	726.398.482,00
	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	12.234.468,00	100.000,00
	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	34.099.668,00	33.241.730,00
	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	16.978.435,00	12.893.676,00
	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.174.171.585,00	1.221.262.088,00
	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	833.332,00	0,00
	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	376.958,00	0,00
	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	25.705.992,00	25.831.120,70

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	7.926.168,00	1.676.200,00
	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	142.122.816,00	133.070.398,00
	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	405.343.992,00	297.734.080,00
	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	474.996,00	474.996,00
	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	90.406.284,00	50.734.176,00
	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	9.049.884,00	9.032.244,00
	Beban Penyusutan Jaringan	2.654.756.129,00	2.510.313.571,00
	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	1.975.661.412,00	1.778.794.830,00
	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	147.015.672,00	153.083.201,00
	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	85.704.036,00	85.704.116,00
	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	10.123.308,00	3.883.888,00
	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	75.953.450,00	76.003.679,00
	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	280.103.508,00	330.847.522,00
	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	47.792.496,00	47.792.500,00
	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	4.561.572,00	637.833,00
	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	3.499.992,00	0,00
	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	6.633.324,00	6.633.334,00
	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	15.186.032,00	26.932.668,00
	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	2.521.327,00	0,00
	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	52.959.707,34	67.910.134,00
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	52.959.707,34	67.910.134,00
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	52.959.707,34	67.910.134,00
	Jumlah	151.760.231.317,72	131.699.134.751,75

5.4.1.1.7 Beban Penyisihan Dana Bergulir	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	2.431.250,13	2.083.331,90

Beban Penyisihan Dana Bergulir TA. 2022 sebesar Rp2.431.250,13 merupakan Penyisihan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima. Beban Penyisihan Dana Bergulir tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.120
Uraian Beban Penyisihan Dana Bergulir

No.		Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	t	Beban Penyisihan Piutang	2.431.250,13	2.083.331,90
	-	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.431.250,13	2.083.331,90
	-	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.431.250,13	2.083.331,90
Jumlah			2.431.250,13	2.083.331,90

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.7 Beban Transfer dan Bagi Hasil	100.190.229.455,00	288.871.544.698,00

Jumlah Beban Transfer dan Bagi Hasil TA. 2022 sebesar Rp100.190.229.455,00 mengalami peningkatan sebesar Rp188.681.315.243,00 dari TA. 2021 Rp288.871.544.698,00.

Tabel 5.121
Uraian Beban Transfer dan Bagi Hasil

No.		Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
I.		BEBAN BAGI HASIL	3.752.265.309,00	3.318.427.272,00
	1	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.752.265.309,00	3.318.427.272,00
	-	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.752.265.309,00	3.318.427.272,00
	-	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.752.265.309,00	3.318.427.272,00
II		Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	96.437.964.146,00	285.553.117.426,00
	1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	95.437.964.146,00	285.553.117.426,00
		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	95.437.964.146,00	285.553.117.426,00
	1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	1.000.000.000,00	0,00
		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	1.000.000.000,00	0,00
Jumlah			100.190.229.455,00	288.871.544.698,00

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.8 Beban Investasi	<u>5.903.046.375,03</u>	<u>2.113.018.532,07</u>

Beban Investasi TA. 2022 sebesar Rp5.903.046.375,03 untuk mencatat penurunan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah - BPR NTB sebesar Rp5.431.610.173,03 dan untuk mencatat penurunan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah - Perumda BKS sebesar Rp471.436.202,00. Beban Investasi tersebut merupakan Beban Investasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima. Beban Investasi tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.122
Uraian Beban Investasi

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
I.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.903.046.375,03	2.113.018.532,06
	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.903.046.375,03	2.113.018.52,06
Jumlah		5.903.046.375,03	2.113.018.52,06

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.9 Beban Lain-lain	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Lain-lain TA. 2022 sebesar Rp0,00 dan TA. 2021 sebesar Rp0,00, sehingga ada kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00.

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.10 Beban Tak Terduga	<u>11.946.886.392,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Tak Terduga TA. 2022 sebesar Rp11.946.886.392,00, terdiri dari beban pegawai sebesar Rp6.736.714.286 dan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp4.797.929.250.

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	<u>16.071.696.886,10</u>	<u>225.216.508.151,15</u>

Surplus/Defisit Dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit Dari Operasi

selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.123
Surplus/Defisit Dari Operasi

No.	Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan	1.597.664.125.969,27	1.805.899.574.805,70	(208.735.448.836,43)	(11,56)
2.	Beban	1.581.592.429.083,17	1.580.683.066.654,55	909.362.428,62	0,06
	Jumlah	16.071.696.886,10	225.216.508.151,15	(209.644.811.265,05)	(93,09)

5.4.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
NON OPERASIONAL	3.543.673.881,00	17.871.049.810,28

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA. 2022 sebesar Rp3.543.673.881,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.124
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	3.543.673.881,00	17.871.049.810,28	(14.327.375.929,28)	(80,17)

Jumlah tersebut di atas merupakan jumlah surplus/defisit sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.125
Uraian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	8.700.000,00	0,00
3	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	8.700.000,00	0,00
-	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	8.700.000,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	8.700.000,00	0,00
I	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	974.000.000,00	35.062.000,00
1	Defisit Penjualan Tanah-LO	974.000.000,00	0,00
-	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO	974.000.000,00	0,00
2	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	35.062.000,00
-	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO	0,00	35.062.000,00
II	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	25.939.210.373,00	9.180.640.795,00
1	Defisit Tukar Menukar Tanah-LO	9.931.170.000,00	0,00
-	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO	1.490.750.000,00	0,00
-	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO	8.085.800.000,00	0,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	- Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO	87.500.000,00	0,00
	- Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO	267.120.000,00	0,00
3	Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO	3.689.019.479,00	0,00
	- Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	3.444.545.888,00	0,00
	- Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO	53.325.891,00	0,00
	- Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir-LO	27.829.670,00	0,00
	- Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III-LO	163.318.030,00	0,00
4	Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO	3.522.403,00	0,00
	- Defisit Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi-LO	3.522.403,00	0,00
7	Defisit Tukar Menukar Aset Lain-Lain-LO	12.315.498.491,00	9.180.640.795,00
	- Defisit Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	4.327.156.065,00	803.647.233,00
	- Defisit Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO	7.988.342.426,00	8.376.993.562,00
IV	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.472.874.381,00	2.200.000,00
1	Defisit Penghapusan Tanah-LO	1.028.300.000,00	0,00
	- Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO	1.028.300.000,00	0,00
2	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	9.800.000,00	2.200.000,00
	- Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-LO	0,00	2.200.000,00
	- Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat-LO	9.800.000,00	0,00
3	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	434.774.381,00	0,00
	- Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	353.234.738,00	0,00
	- Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah-LO	9.697.677,00	0,00
	- Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO	18.530.596,00	0,00
	- Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool-LO	4.539.915,00	0,00
	- Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO	48.771.455,00	0,00
V	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(24.833.710.873,00)	8.653.147.015,28
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(24.833.710.873,00)	8.653.147.015,28
	- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(24.833.710.873,00)	8.653.147.015,28
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	3.552.373.881,00	17.871.049.810,28
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.543.673.881,00)	(17.871.049.810,28)

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa TA. 2022 dan TA. 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.126
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

Uraian	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Luar Biasa	0,00	27.864.429.306,00	(27.864.429.306,00)	(100,00)

Jumlah tersebut di atas merupakan jumlah Beban Luar Biasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.127
Rincian Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

No	Beban Luar Biasa	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	27.864.429.306,00	(27.864.429.306,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Luar Biasa	-	27.864.429.306,00	(27.864.429.306,00)	(100,00)

5.4.4. SURPLUS/DEFISIT-LO	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
	4.267.860.639,72	12.528.023.005,10

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.128
Rincian Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

No.	Surplus/Defisit LO	Realisasi TA. 2022 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Surplus/Defisit dari Operasi	16.071.696.886,10	225.216.508.151,15	(209.644.811.265,05)	-93,09
2.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3.543.673.881,00)	(17.871.049.810,28)	(28.637.351.858,57)	160,24
3.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(0,00)	(27.864.429.306,00)	(27.864.429.306,00)	(100,00)
	Surplus/Defisit – LO	12.528.023.005,10	129.481.029.034,87	179.481.029.034,87	(27.864.429.306,00)

5.5 LAPORAN ARUS KAS

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	221.810.565.564,14	280.364.333.544,50

Nilai Arus Kas Dari Aktivitas Operasi merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dikurangi Arus Keluar Kas. Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi TA. 2022 sebesar Rp221.810.565.564,14 mengalami penurunan sebesar Rp58.553.767.980,36 atau 20.88% dari jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi TA. 2021 sebesar Rp280.364.333.544,50. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, terdiri dari:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.1.1 Arus Masuk Kas	1.775.856.490.997,70	1.775.825.126.383,90

Jumlah Arus Masuk TA. 2022 sebesar Rp1.775.856.490.997,70 mengalami peningkatan sebesar RpRp31.364.613.80 atau 0.002% dari jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi TA. 2021 sebesar Rp1.775.825.126.383,90, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.129
Rincian Arus Masuk Kas TA. 2022

Arus Masuk Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	16.013.801.499,00	13.778.957.369,00
Penerimaan Retribusi Daerah	18.663.813.599,00	18.134.336.488,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.552.260.418,00	5.049.293.415,67
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99.780.352.780,70	104.745.670.493,23
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	76.166.011.723,00	23.167.175.386,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	21.247.748.959,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	829.208.582.000,00	832.682.655.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	220.041.099.096,00	202.764.780.561,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	228.730.980.479,00	189.765.276.419,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.986.471.000,00	37.470.839.000,00
Penerimaan Dana Desa	185.155.477.000,00	189.614.045.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	71.774.584.325,00	55.497.334.660,00
Hibah	18.283.057.078,00	12.859.543.633,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya	500.000.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	69.047.470.000,00
Jumlah	1.775.856.490.997,70	1.775.825.126.383,90

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.1.2 Arus Keluar Kas	1.554.045.925.433,56	1.495.460.792.839,40

Jumlah Arus Kas Keluar TA. 2022 sebesar Rp1.554.045.925.433,56 mengalami peningkatan sebesar Rp58.585.293.594,16 atau 3.92% dari jumlah Arus Kas

Keluar TA. 2021 sebesar Rp1.495.460.792.839,40, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.130
Rincian Arus Keluar Kas TA. 2022

Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pembayaran Pegawai	749.862.151.710,00	746.772.807.523,00
Pembayaran Barang dan Jasa	458.571.697.276,56	393.472.602.462,40
Pembayaran Belanja Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah	32.064.985.100,00	31.715.077.500,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	16.254.498.500,00	6.764.331.350,00
Pembayaran Tak Terduga	11.946.886.392,00	27.864.429.306,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	3.752.265.309,00	3.318.427.272,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	281.593.441.146,00	285.553.117.426,00
Jumlah	1.554.045.925.433,56	1.495.460.792.839,40

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 2022 (Rp) 2021 (Rp)
250.239.191.263,00 **261.575.868.883,00**

Nilai Arus Kas Dari Aktivitas Investasi merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dikurangi Arus Keluar Kas. Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi TA. 2022 sebesar Rp250.239.191.263,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.336.677.620,00 atau 4.33% dari jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi TA. 2021 sebesar Rp261.575.868.883,00, dengan rincian sebagai berikut :

5.5.2.1 Arus Masuk Kas 2022 (Rp) 2021 (Rp)
0,00 **0,00**

Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi TA. 2022 sebesar Rp0,00 dan TA. 2021 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut ini :

Tabel 5.131
Rincian Arus Masuk Kas TA. 2022

Arus Masuk Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan atas <i>Contra Post</i> Belanja Modal	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.2.2 Arus Keluar Kas	250.239.191.263,00	261.575.868.883,00

Jumlah Arus Keluar Kas TA. 2022 sebesar Rp250.239.191.263,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.336.677.620,00 atau 4.33% dari jumlah Arus Keluar Kas TA. 2021 sebesar Rp261.575.868.883,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.132
Rincian Arus Keluar Kas TA. 2022

Arus Keluar Kas	Tahun 2022 ,(Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Perolehan Tanah	3.226.152.975,00	9.029.972.745,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	74.233.412.208,00	76.612.973.881,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	65.996.875.279,00	119.582.091.453,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.563.736.869,00	56.014.878.804,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.019.013.932,00	335.952.000,00
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.200.000.000,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	250.239.191.263,00	261.575.868.883,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	44.999.994,00	457.166.681,00

Nilai Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dikurangi Arus Keluar Kas. Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan TA. 2022 sebesar Rp44.999.994,00 mengalami penurunan sebesar Rp412.166.687,00 atau 90.16% dari jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan TA. 2021 sebesar Rp457.166.681,00, dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.3.1 Arus Masuk Kas	44.999.994,00	457.166.681,00

Jumlah Arus Masuk Kas TA. 2022 sebesar Rp44.999.994,00 mengalami penurunan sebesar Rp412.166.687,00 atau 90.16% dari jumlah Arus Masuk Kas TA. 2021 sebesar Rp457.166.681,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.133
Rincian Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan TA. 2022

Arus Masuk Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penerimaan Sisa UUDP	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman (dana bergulir)	44.999.994,00	457.166.681,00
Penerimaan Piutang	0,00	0,00
Jumlah	44.999.994,00	457.166.681,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas 2022 (Rp) 2021 (Rp)
0,00 **0,00**

Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan TA. 2022 sebesar Rp0,00 dan TA. 2021 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.134
Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan TA. 2022

Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dan Obligasi	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris 2022 (Rp) 2021 (Rp)
84.441.915,79 **0,00**

Nilai Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dikurangi dengan Arus Keluar Kas. Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris TA. 2022 sebesar Rp84.441.915,79, sementara Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris TA. 2021 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

5.5.4.1 Arus Masuk Kas 2022 (Rp) 2021 (Rp)
94.997.686.544,00 **90.607.375.205,00**

Jumlah Arus Masuk Kas TA. 2022 sebesar Rp94.997.686.544,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.390.311.339,00 atau 4,85% dari jumlah Arus Kas Masuk TA. 2021 sebesar Rp90.607.375.205,00. Arus Masuk Kas TA. 2022 terdiri dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp 94.894.355.088,00 dan Pelunasan TGR Dikpora yang belum diakui Tahun 2021 sebesar Rp103.331.456,00. Berikut disajikan rincian Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga TA. 2022 :

Tabel 5.134
Rincian Arus Kas Dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga TA. 2022

No	Uraian	Penerimaan TA. 2022 (Rp)	Penerimaan TA. 2021 (Rp)
1.	IWP	32.621.912.148,00	33.286.107.475,00
2.	Taperum	29.235.314,00	332.640,00
3.	Askes	6.011.773,00	17.437.199,00
4.	PPh Psl. 21	22.632.053.359,00	22.871.154.100,00
5.	PPh Psl. 22	1.905.168.396,00	1.605.476.165,00

No	Uraian	Penerimaan TA. 2022 (Rp)	Penerimaan TA. 2021 (Rp)
6.	PPh Psl. 23	572.330.781,00	242.563.163,00
7.	PPh Psl 4 (2)	3.689.068.926,00	4.784.159.311,00
8.	PPN	33.437.290.123,00	27.799.159.442,00
9.	PPh Psl 25	182.050,00	985.710,00
10.	PPh Psl 26	796.318,00	0,00
11.	Lainnya	305.900,00	0,00
Jumlah		94.894.355.088,00	90.607.375.205,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas 2022 (Rp) 2021 (Rp)
94.913.244.628,21 90.607.375.205,00

Jumlah Arus Keluar Kas TA. 2022 sebesar Rp94.913.244.628,21 mengalami peningkatan sebesar Rp4.305.869.423,21 atau 4,75% dari jumlah Arus Kas Masuk TA. 2021 sebesar Rp90.607.375.205,00. Arus Keluar Kas TA. 2022 terdiri dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp94.880.444.643,00 dan setoran Utang PFK Tahun 2020 dan 2021 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bima sebesar Rp32.799.985,21. Berikut disajikan rincian Arus Keluar Kas dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga TA. 2022 :

Tabel 5.135
Rincian Arus Kas Dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga TA. 2022

No	Uraian	Penerimaan TA. 2022 (Rp)	Penerimaan TA. 2021 (Rp)
1.	IWP	32.621.912.148,00	33.286.107.475,00
2.	Taperum	29.235.314,00	332.640,00
3.	Askes	6.011.773,00	17.437.199,00
4.	PPh Psl. 21	22.632.053.359,00	22.871.154.100,00
5.	PPh Psl. 22	1.905.168.396,00	1.605.476.165,00
6.	PPh Psl. 23	566.323.489,00	242.563.163,00
7.	PPh Psl 4 (2)	3.689.068.926,00	4.784.159.311,00
8.	PPN	33.429.386.970,00	27.799.159.442,00
9.	PPh Psl 25	182.050,00	985.710,00
10.	PPh Psl 26	796.318,00	0,00
11.	Lainnya	305.900,00	0,00
Jumlah		94.880.444.643,00	90.607.375.205,00

Berdasarkan jumlah arus kas penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga TA. 2022 dengan arus kas pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga TA. 2022, terdapat saldo penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga TA. 2022 sebesar Rp17.003.285,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang PFK (PPh Pasal 23) pada RSUD Bima sebesar Rp17.003.285,00.
2. Utang PFK (PPN dan PPh Pasal 23) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bima sebesar Rp9.340.090,00, dengan rincian :
 - PPN sebesar Rp7.903.153
 - PPh Pasal 23 sebesar Rp1.436.937.

Namun pada TA. 2022 terdapat mutasi kas atas Pengeluaran BLUD (Utang PFK TA. 2021) dan telah dilakukan penyetoran di TA. 2022 sebesar Rp 3.092.840,00.

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas 2022 (Rp)
(28.299.183.789,07) 2021 (Rp)
19.245.631.342,50

Penurunan Kas tahun 2022 senilai (Rp28.299.183.789,07) mengalami penurunan sebesar (Rp47.544.815.131,57) atau (247,04%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp19.245.631.342,50.

Kenaikan/penurunan Kas diperoleh dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dan ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.136
Rincian Kenaikan/penurunan Kas TA. 2022

No.	Uraian	TA. 2022 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	221.810.565.564,14	280.364.333.544,50	(58.553.767.980,36)	(20,88)
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(250.239.191.263,00)	(261.575.868.883,00)	11.336.677.620,00	(4,33)
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	44.999.994,00	457.166.681,00	(412.166.687,00)	(90,16)
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	84.441.915,79	0,00	84.441.915,79	100,00
		(28.299.183.789,07)	19.245.631.342,50	(47.544.815.131,57)	(247,04)

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD dan Saldo Akhir Kas 2022 (Rp)
58.282.454.791,73 2021 (Rp)
39.104.262.080,02

Saldo Awal Kas di BUD 1 Januari 2022 sebesar Rp 58.349.893.422,52. Namun terdapat koreksi kurang terhadap saldo awal sebesar Rp67.438.630,79 untuk menyesuaikan saldo awal Utang PFK akibat salah jurnal Unaudited Utang PFK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, sehingga Saldo Awal Kas di BUD setelah koreksi sebesar Rp58.282.454.791,73. Dibanding dengan Saldo Awal Kas di BUD 1 Januari 2021 sebesar Rp39.104.262.080,02, maka saldo Saldo Awal Kas di BUD 1 Januari 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp19.178.192.711,71 atau 49,04%.

5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD 2022 (Rp)
29.983.271.002,66 2021 (Rp)
58.282.454.791,73

Saldo Akhir Kas di BUD dan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.983.271.002,66 mengalami penurunan sebesar Rp28.299.183.789,07 atau 48,56% dibandingkan dengan saldo akhir Kas di BUD

per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.282.454.791,73, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas di BUD sebesar Rp10.431.307.035,93.
2. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp216.768.905,83.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp24.437.556,59.
4. Kas di Bendahara FKTP (JKN) sebesar Rp2.036.520.023,00.
5. Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp17.201.965.594,24
6. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp59.023.585,08.
7. Kas di Bendahara BOP PAUD sebesar Rp3.908.211,98.
8. Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp9.340.090,00.

5.5.8 Saldo Akhir Kas Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	0,00	3.092.840,00

Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sementara per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.092.840,00.

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang berfungsi untuk melihat perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Bima pada awal tahun sampai dengan akhir tahun. Laporan Perubahan Ekuitas dipengaruhi oleh surplus/defisit pada Laporan Operasional. Adapun rincian Rincian Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022, sebagai berikut :

Tabel 5.137
Rincian Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bima TA. 2022

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
EKUITAS AWAL	2.910.020.422.052,91	2.703.455.743.348,54
Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
- Koreksi <i>Double</i> Catat dan Koreksi Kesalahan	0,00	0,00
Saldo Ekiutas 1 Januari 2018 setelah koreksi	2.910.020.422.052,91	2.703.455.743.348,54
SURPLUS/DEFISIT – LO	12.528.023.005,10	174.683.355.134,87
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	7.529.367.596,64	31.881.323.569,50
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas	(6.061.473,81)	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	(7.828.591,00)	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan	105.921.778,00	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya	8.816.369.727,80	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban	(212.679.847,00)	0,00

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Koreksi Ekuitas Lainnya	(1.166.353.997,35)	0,00
EKUITAS AKHIR	2.930.077.812.654,65	2.910.020.422.052,91

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.6.1. Ekuitas Awal	2.910.020.422.052,91	2.703.455.743.348,54

Ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp2.910.020.422.052,91, sementara Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp2.703.455.743.348,54.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.6.2 Surplus / Defisit – LO	12.528.023.005,10	179.481.029.034,87

TA. 2022 Pemerintah Kabupaten Bima mengalami Suplus-LO sebesar Rp12.528.023.005,10 merupakan selisih antara Pendapatan LO dikurangi Beban dan Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional. Dimana Pendapatan LO TA. 2022 sebesar Rp1.597.664.125.969,27, Beban senilai Rp1.581.592.429.083,17 dan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 8.700.000,00 dan Pos Luar Biasa sebesar (Rp3.543.673.881,00).

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.6.3 Ekuitas Akhir	2.930.077.812.654,65	2.910.020.422.052,91

Nilai Ekuitas Akhir TA. 2022 Sebesar Rp2.930.077.812.654,65 yang merupakan mutasi dari nilai ekuitas awal TA. 2021 ditambah dengan surplus/defisit-LO Tahun 2022 dan dipengaruhi oleh dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagaimana diuraikan di atas. Nilai Ekuitas TA. 2022 jika dibandingkan dengan nilai ekuitas tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp20.057.390.601,74 atau 0,68% dibandingkan dengan ekuitas TA. 2021 sebesar Rp2.910.020.422.052,91.

BAB VI
P E N U T U P

Laporan Keuangan Pemerrintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2022 secara keseluruhan.


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE